



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, R-KPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1)huruf adanhuruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah serta penambahan kegiatan baru yang yang tidak perlu merubah RPJMD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, Rancangan Ekonomi daerah beserta Kerangka Pendanaan, Prioritas dan sasaran Pembangunan, dan Rencana Program Prioritas daerah.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2017.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016).

(5) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal Iangka 1 merupakan Pedoman dalam Peyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2017.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1), adalah sebagai berikut :

BUKU I :PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2017

BAB I : Pendahuluan

BAB II :Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Tahun 2015 dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III:Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah

BAB IV:Prioritas danSasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2017

BAB V :Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasa III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 57

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK

N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M. Hum

Nip. 19700127 199803 2 004



PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2017

BUKU I

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	8
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2017	9
1.5. Maksud dan Tujuan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	14
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok	24
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	24
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	32
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	46
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	46
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	51
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	52
2.1.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah	53
2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia	57
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi	57
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	59
2.2.1. Capaian Kinerja Program Unggulan	66
2.2.2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan dan Program MDG's	69

2.3. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	70
2.4. Permasalahan Pembangunan.....	120
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	149
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017	149
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017.....	160
3.1.2.1. Ekonomi Nasional	160
3.1.2.2. Ekonomi Provinsi Jawa Barat	165
3.1.2.3. Ekonomi Kota Depok	168
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	173
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	173
3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	174
3.2.1.2. Dana Perimbangan	175
3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	177
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	179
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	183
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	189
4.2. Prioritas Pembangunan	197
4.2.1. Permasalahan dan Tantangan	197
4.2.2. Isu Strategis	200
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2017	203
4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2017	213
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	217
BAB VI PENUTUP	218

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan	15
Tabel 2.2 Sebaran dan Luas SITU di Kota Depok	20
Tabel 2.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2015.....	23
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Persentase dan Sex Ratio di Kota Depok Tahun 2015.....	23
Tabel 2.5. Produksi Domestik Regional Bruto, Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio Kota Depok Tahun 2010 – 2014	30
Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Depok Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2015.....	32
Tabel 2.7. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2009- 2015.....	34
Tabel 2.8. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	34
Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Kota Depok Tahun 2015.....	38
Tabel 2.10. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2014	43

Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014	45
Tabel 2.12. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesehatan dan Indeks Kesejahteraan Sosial Lainnya Kota Depok Tahun 2015.....	45
Tabel 2.13. Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah dan Status Pendidikan Di Kota Depok, Tahun 2014	47
Tabel 2.14. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2010-2014	51
Tabel 2.15. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) Di Kota Depok Sampai dengan Tahun 2015.....	53
Tabel 2.16. Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota Tahun 2015....	54
Tabel 2.17. Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir.....	56
Tabel 2.18. Realisasi Perizinan Dari Tahun 2009-2014	58
Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok Tahun 2015	60
Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Depok Tahun 2015.....	65
Tabel 2.21. Realisasi Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2015.....	66
Tabel 2.22. Capaian IKM Kota Depok Tahun 2015	68
Tabel 2.23. Capaian Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan dan MDG's Kota Depok Tahun 2011-2014.....	69
Tabel 2.24. Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	71
Tabel 2.25 IPM Menurut Kecamatan dengan Metode Baru	124
Tabel 3.1. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2014	156
Tabel 3.2. TPAK, TPT,dan TKK Tahun 2011 – 2014 Di Kota Depok.....	157
Tabel 3.3. Gambaran Ekonomi Makro 2015-2019.....	164
Tabel 3.4. Target Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	166

Tabel 3.5.	Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Depok Tahun 2006-2015.....	174
Tabel 3.6.	Perkembangan Target dan Kontribusi Dana Perimbangan pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2016.....	176
Tabel 3.7.	Perkembangan Target dan Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2011-2016.....	177
Tabel 3.8.	Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2016.....	180
Tabel 3.9	Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2011-2016.....	184
Tabel 3.10.	Skenario APBD dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017.....	188
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Depok.....	192
Tabel 4.2.	Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok.....	199
Tabel 4.3.	Target Indikator Indikator Kinerja Daerah tahun 2017 terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok.....	200
Tabel 4.4.	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	211
Tabel 4.5.	Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok	213

DAFTAR GRAFIK

	Halaman	
Grafik 2.1	Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010–2015.....	22
Grafik 2.2.	PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2014 (dalam juta rupiah)	26
Grafik 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2010-2014.....	27
Grafik 2.4.	Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2010 – 2014(ADHB) (Dalam %)	28

Grafik 2.5.	PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi PDRB Dan Gini Ratio Kota Depok Tahun 2010-2014	30
Grafik 2.6.	IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010- 2015	33
Grafik 2.7.	Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2010 – 2015...	35
Grafik 2.8.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2010 - 2015.....	36
Grafik 2.9.	Nilai AHH Kota Depok Tahun 2010 – 2015	40
Grafik 2.10.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2008 – 2014.....	43
Grafik 2.11.	Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2009-2014	52
Grafik 2.12.	Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2007-2014 ..	53
Grafik 2.13.	Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2015	58
Grafik 2.14.	Total Anggaran Kemiskinan Dan Prosentase Anggaran Kemiskinan Terhadap APBD (Tahun 2011-2014).....	70
Grafik 2.15.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015.....	134
Grafik 2.16.	Angka Ketergantungan Kota Depok Tahun 2010-2015.....	135
Grafik 2.17.	Pyramida Penduduk Kota Depok Tahun 2015.....	136
Grafik 2.18.	Jumlah Penduduk Lansia (usia 60 tahun keatas) Kota Depok Tahun 2010-2015.....	137
Grafik 3.1.	PDRB Kota Depok Tahun 2009 – 2014.....	150
Grafik 3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2010 – 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000 ...	151
Grafik 3.3.	Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2010 – 2015 (ADHK) (Dalam %)	153
Grafik 3.4.	Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2010-2015.....	154
Grafik 3.5.	<i>Economic Outlook</i> Global Dan Nasional	160

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Pola Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok.....	16
Gambar 3.1. Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 - 2019	152
Gambar 4.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Depok	215
Gambar 4.2. Rencana Pusat Pelayanan di Kota Depok	215
Gambar 4.3. Tematik Kewilayahan RTRW	216

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah Daerah Wajib menyusun RKPD yang merupakan Penjabaran dari RPJMD untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program Strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek Pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Kesatuan Sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen Masyarakat dan Pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 bahwa RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi

Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD dan penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang mengakibatkan diperlukannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 antara lain :

1. Penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
2. Penyesuaian terhadap prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah.
3. Perubahan dan penambahan kegiatan prioritas yang mengacu pada RPJMD dan perkembangan kebutuhan tahun berjalan serta perubahan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD mempunyai Kedudukan, peran dan Fungsi yang sangat Strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa RKPD harus memuat :

1. Secara Substansial, memuat Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Prakiraan Maju, dan OPD penanggungjawab yang Wajib dilaksanakan Pemerintahan Daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara Normatif, menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara Operasional, memuat arahan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintahan di bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala OPD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD; dan

4. Secara Faktual, menjadi Tolok Ukur untuk menilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Merealisasikan Program dan Kegiatan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun pertama secara utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016– 2021. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok dilakukan melalui pendekatan Politis, Teknokratik, Demokratis, Partisipatif, *Bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang dapat memenuhi Program/ janji walikota terpilih, sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan *bottom-up* dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota, hal ini untuk menjaring Aspirasi Masyarakat sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat. Sementara pendekatan *top-down* diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Substansi RKPD adalah Program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah, oleh karena itu proses penyusunannya dilakukan secara terpadu antar OPD, sehingga memungkinkan untuk melengkapi dan saling memberi masukan. Secara Garis besar RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana kerja dan pendanaannya, serta Prakiraan Pagu.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2017 disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);

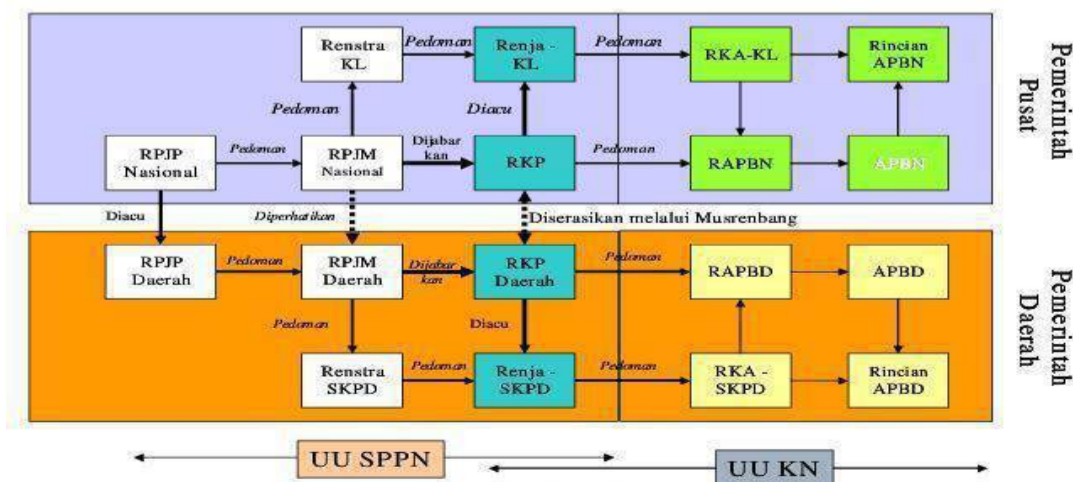
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Depok Nomor 37 Tahun 2016);

1.3 Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kota Depok Tahun 2017 merupakan satu bagian yang utuh dari Manajemen Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok khususnya dalam menjalankan agenda Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan arahan RKP Nasional Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Gambar 1.1.

Pola Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Perubahan RKPD Kota Depok 2017 ini nantinya akan menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 disusun mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian, Proses Penyusunan dan Kedudukan RKPD, keterkaitan dengan RPJMD, Renja-OPD serta RAPBD.

1.2 Asumsi Perubahan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

Menjelaskan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2017.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2017.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan secara Ringkas Proses Penyusunan RKPD Tahun 2017 dan bagaimana Hubungan Antar Dokumen Pembangunan dalam Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2017

Mengemukakan Sistematika Perubahan RKPD terkait dengan Pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

1.6 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Menjelaskan tentang Evaluasi Pembangunan tahun sebelumnya, Kondisi Ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup:

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015, Tahun Berjalan dan RPJMD.
- 2.3 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
- 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kondisi Ekonomi Tahun 2015 dan perkiraan Tahun 2017 serta mencakup Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sumber-sumber Pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam Pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, mencakup :

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

Menjelaskan tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan Capaian Kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi isu Strategis dan masalah mendesak ditingkat Daerah dan Nasional, Rancangan kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka Pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta Indikasi Prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD. Bahasan pada bab ini mencakup :

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 5 (lima) tahunan.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang merupakan Gambaran Prioritas Pembangunan tahun Rencana yang diambil dan dikaitkan dengan Program Pembangunan Daerah (RPJMD).

4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2017

Menjelaskan Keselarasan Pembangunan Kota Depok dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah yang mengacu pada Capaian Kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. Penutup

Memuat kaidah Pelaksanaan dan Penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan pelaku Pembangunan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017 adalah:

- a. Mengarahkan Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja OPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- b. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017;
- c. Menjadi Instrumen untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan fungsi dan urusan Wajib dan pilihan Pemerintah Daerah;
- d. Menjadi Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Jangka Menengah;
- e. Menjadi Instrumen pemerintah daerah untuk mengukur Capaian Target Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Menjadi Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- g. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah .
- h. Mewujudkan Sinergitas antara pelaksanaan Program dan pengawasannya serta Efisiensi Alokasi Sumberdaya.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah untuk:

- a. Mewujudkan Sinergitas antara Perencanaan Program, Anggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan antar Wilayah, Sektor Pembangunan dan Antar Pemerintahan, serta
- b. Mewujudkan Efisiensi Alokasi Sumberdaya dalam Pembangunan Daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Depok secara Geografis terletak pada koordinat 6°19'00" - 6°28'00" Lintang Selatan dan 106°43'00" - 106° 55'30" Bujur Timur, dengan luas kurang lebih 20.029 Ha. Wilayah perencanaannya meliputi 11 kecamatan dan 63 Kelurahan, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.

Batas-batas Wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

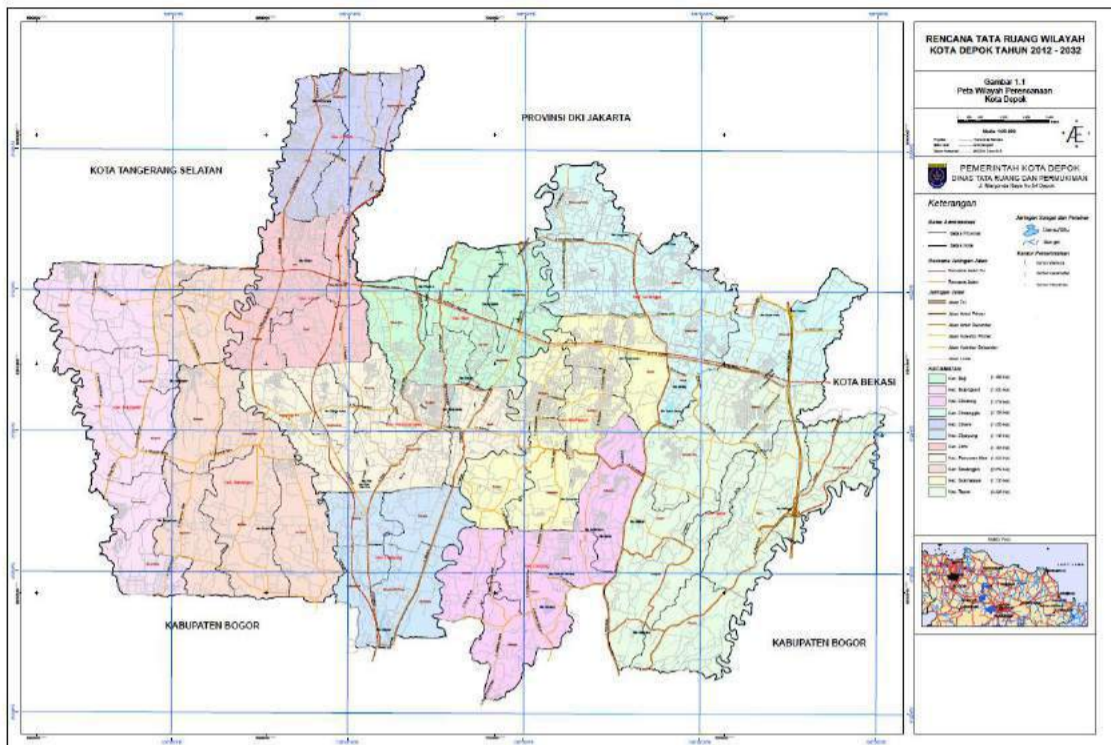
Secara Administratif, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, jumlah kecamatan berubah dari semula 6 Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dan Gambar 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1,456	VII	CINERE	1,055
1	Beji	194	33	Cinere	366
2	Beji Timur	71	34	Gandul	264
3	Kemiri Muka	169	35	Pangkalan Jati	268
4	Pondok Cina	335	36	Pangkalan Jati Baru	158
5	Kukusan	340	VIII	CIMANGGIS	2,158
6	Tanah Baru	347	37	Cisalak Pasar	181
II	PANCORAN MAS	1,803	38	Mekarsari	385
7	Pancoran Mas	350	39	Tugu	542
8	Depok Jaya	119	40	Pasirgunung Selatan	271
9	Depok	366	41	Harjamukti	592
10	Rangkapan Jaya Baru	382	42	Curug	187
11	Rangkapan Jaya	370	IX	TAPOS	3,326
12	Mampang	217	43	Tapos	632
III	CIPAYUNG	1,145	44	Leuwinanggung	425
13	Cipayung	214	45	Sukatani	476
14	Cipayung Jaya	235	46	Sukamaju Baru	425
15	Ratujaya	305	47	Jatijajar	265
16	Bojong Pondok Terong	220	48	Cilangkap	614
17	Pondok Jaya	171	X	SAWANGAN	2,619
IV	SUKMAJAYA	1,735	50	Sawangan	329
18	Sukmajaya	333	51	Kedaung	211
19	Mekarjaya	326	52	Cinangka	343
20	Baktijaya	253	53	Sawangan Baru	276
21	Abadijaya	267	54	Pengasinan	406
22	Tirtajaya	288	55	Bedahan	586
23	Cisalak	268	56	Pasir Putih	469
V	CILODONG	1,619	XI	BOJONGSARI	1,930
24	Sukamaju	433	57	Bojongsari	206
25	Cilodong	218	58	Bojongsari Baru	197
26	Kalibaru	328	59	Pondok Petir	307
27	Kalimulya	305	60	Serua	321
28	Jatimulya	335	61	Curug	421
VI	LIMO	1,184	62	Duren Mekar	191
29	Limo	413	63	Duren Seribu	287
30	Meruyung	216	KOTA DEPOK		20.029
31	Grogol	364			
32	Krukut	191			

Sumber : Naskah Akademis RTRW 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok



Su

mber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

TOPOGRAFI

Secara umum Topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan Daerah Dataran Rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai Luas Wilayah sekitar 200,29 km², dengan kondisi Geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Bagian Utara umumnya berupa Dataran Rendah, sedangkan di Wilayah bagian Selatan umumnya merupakan Daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas.

Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

GEOLOGI

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan Pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang-tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi Fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.
- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari Tufa Vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap Erosi, tekstur halus.
- f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

KLIMATOLOGI

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh Wilayah di Daerah Kota Depok Relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

- a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian Utara Wilayah Kota Depok,
- b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian Utara Wilayah Kota Depok,
- c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian Tengah Wilayah Kota Depok,
- d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di Wilayah Selatan–Timur Kota Depok.

POTENSI SUMBER DAYA AIR

Di Kota Depok terdapat dua Sumber Daya Air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan Saluran Irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota Depok berjumlah 31 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Beberapa Situ sudah mati karena mengalami alih fungsi menjadi Perumahan dan Pemukiman.

Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter..

Situ-situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai Sumber Air Bersih. Penduduk Kota Depok masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih bagi kegiatan Masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan empat belas persen (14%) berasal dari PDAM. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.

Tabel 2.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

NO	SITU	LOKASI (KELURAHAN)	LUAS (ha)
1	Rawa Gede	Harjamukti	1,40
2	Gemblung	Harjamukti	7,20
3	Tipar	Mekarsari	8
4	Pedongkelan	Tugu	6,25
5	Gadog	Cisalak Pasar	1,30
6	Rawa Kalong	Curug	8,25
7	Patinggi	Tapos	5,50
8	Jatijajar	Jatijajar	6,50
9	Cilangkap	Cilangkap	6,00
10	Asih Pulo	Rangkapan Jaya	4,40
11	Rawa Besar	Depok Jaya	13,00
12	Pitara	Pancoran Mas	0,60
13	Telaga Subur	Pancoran Mas	1,50
14	Citayam	Bojong Pondok Terong	7,00
15	Pengasinan	Pengasinan	6,00
16	Bojongsari	Sawangan	28,50
17	Pladen	Beji	1,50
18	Universitas Indonesia (UI) 1, UI 2, UI 3, UI 4	Pondok Cina	17,50
19	Pasir Putih	Pasir Putih	-
20	Ciming	Bakti Jaya	1,50
21	Bunder	Cisalak	2,00
22	Sidomukti	Sukmajaya	7,50
23	Pengarengan	Cisalak	7,00
24	Cilodong	Kalibaru	9,50
25	Bahar	Sukamaju	1,25
26	Krukut	Krukut	-
27	Lembah Gurame	Depok Jaya	-
28	Cinere	Pangkalan Jati	-

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

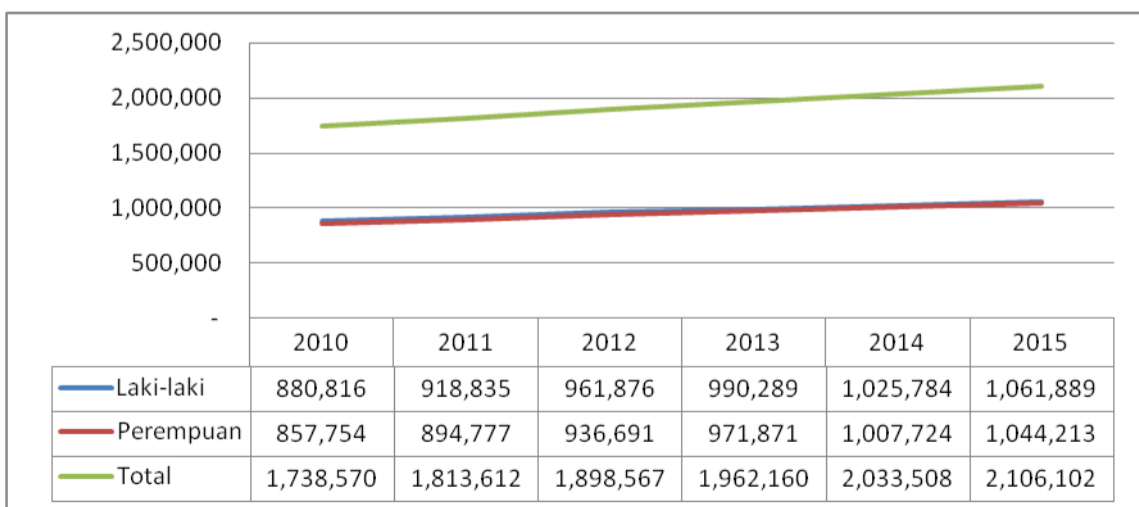
POTENSI BENCANA ALAM

Potensi Rawan Bencana yang terdapat di Kota Depok adalah Rawan Bencana banjir, Rawan Bencana longsor dan Rawan Bencana Kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada Daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang, Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayang. Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah lama dan intensitas hujan yang tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai, dan sistem Drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan rawan Bencana Kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat Penduduk dan Bangunan di Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.

KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan Proyeksi BPS, Kota Depok pada Tahun 2015 dihuni oleh 2.106.102 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.044.213 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.061.889 jiwa. Persentase pertumbuhan penduduk Tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik2.1. Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010–2015



Sumber: Depok Dalam Angka 2010 – 2015

Pertumbuhan Penduduk yang demikian tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan kelahiran di Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai Daerah yang sangat Strategis dilihat dari seluruh Fungsi Kota, terutama Jasa, Perdagangan dan permukiman.

Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2015 mencapai 10.515 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (15.608 jiwa/km²) disusul Kecamatan Beji (14.064 jiwa/km²) dan Pancoran Mas (14.011 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Sawangan (5.777 jiwa/km²) dan Bojongsari (6.098 jiwa/km²).

Berdasarkan usianya, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 71 persen, usia muda (0-14 tahun) sebanyak 25,76 persen, dan usia lanjut (65 tahun keatas) mencapai 3,24 persen. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok mencapai 40,84 persen pada Tahun 2015. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Persentase dan *Sex Ratio* di Kota Depok Tahun 2015 tersaji pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/ (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sawangan	76.254	73.441	149.695	25,91	5.777
2	Bojongsari	61.392	59.426	120.818	19,81	6.098
3	Pancoran Mas	128.384	126.632	255.016	18,20	14.011
4	Cipayung	78.785	76.173	154.958	11,63	13.323
5	Sukmajaya	139.707	141.710	281.417	18,03	15.608
6	Cilodong	76.545	74.896	151.441	16,08	9.417
7	Cimanggis	148.301	144.831	293.132	21,22	13.813
8	Tapos	131.705	130.218	261.923	32,33	8.101
9	Beji	101.824	99.151	200.975	14,29	14.064
10	Limo	53.963	52.582	106.545	12,32	8.648
11	Cinere	65.029	65.149	130.178	10,47	12.433
	Kota Depok	1.061.889	1.044.213	2.106.102	200,29	10.515

Sumber : BPS Kota Depok tahun 2015, Proyeksi Penduduk

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Persentase dan Sex Ratio di Kota Depok Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 - 4	104.353	98.478	202.831	9,63	105,97
5 - 9	92.320	87.579	179.899	8,54	105,41
10 - 14	81.604	78.192	159.796	7,59	104,36
15 - 19	85.866	89.744	175.610	8,34	95,68
20 - 24	95.383	96.824	192.207	9,13	98,51
25 - 29	96.283	98.720	195.003	9,26	97,53
30 - 34	101.330	100.883	202.213	9,60	100,44
35 - 39	96.726	95.061	191.787	9,11	101,75
40 - 44	87.119	81.976	169.095	8,03	106,27
45 - 49	68.975	66.600	135.575	6,44	103,57
50 - 54	53.298	52.182	105.480	5,01	102,14
55 - 59	40.163	38.543	78.706	3,74	104,20
60 - 64	25.546	24.177	49.723	2,36	105,66
65 - 69	16.705	15.528	32.233	1,53	107,58
70 - 75	9.264	9.457	18.721	0,89	97,96
75+	6.954	10.269	17.223	0,82	67,72
Jumlah	1.061.889	1.044.213	2.106.102	100	101,69

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015, Proyeksi Penduduk

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi serta Kesejahteraan di bidang Sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat, mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di bidang Pembangunan Ekonomi, salah satu Indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga Konstan.

Penyajian PDRB atas dasar harga Konstan mengalami Perubahan mendasar sebagai Konsekuensi Logis berubahnya tahun Dasar yang digunakan.

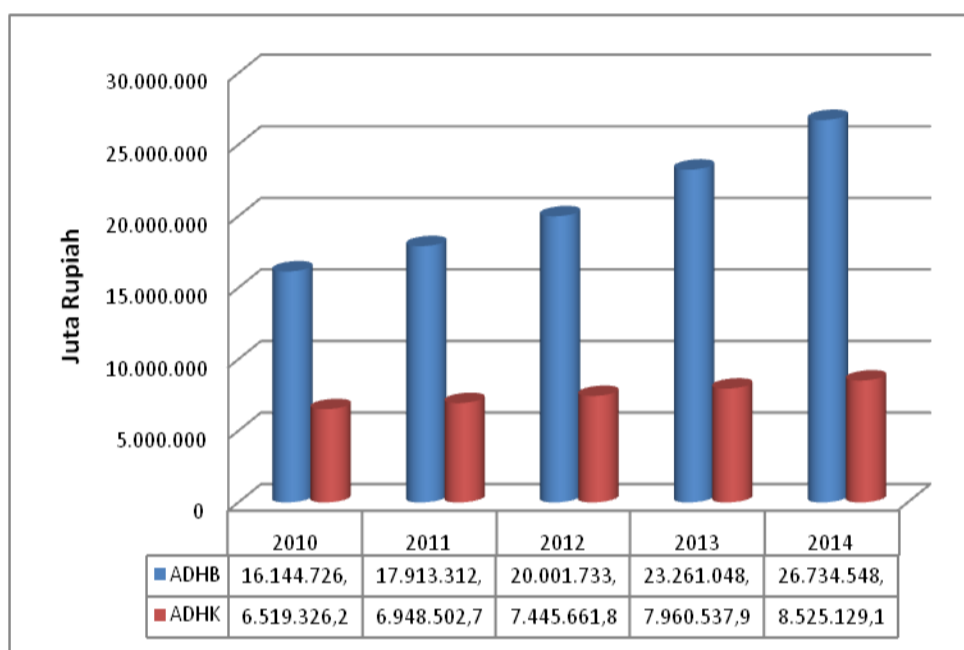
Selain menjadi bahan dalam Penyusunan Perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan Evaluasi hasil-hasil Pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angkaPDRB ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan setiap Sektor Ekonomi, mencakup Sektor Pertanian; Pertambangan dan penggalian; Industri Pengolahan; listrik, Gas, dan air bersih; Konstruksi; Perdagangan, restoran dan Hotel; Pengangkutan dan komunikasi; lembaga Keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
- b. Untuk mengetahui Struktur Perekonomian;
- c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita Penduduk sebagai salah satu Indikator tingkat Kemakmuran/Kesejahteraan;
- d. Untuk mengetahui tingkat Inflasi/Deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga Produsen.

Dari sisi produksi (*supply side*), dengan tolok ukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2014 (Data yang dipublikasikan BPS pada Tahun 2015), kondisi Ekonomi Kota Depok mencapai Rp. 8.525.129,16 jutaatas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2000. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2013 (ADHK 2000) yang mencapai Rp. 7.960.537,94 juta, maka dimensi Ekonomi Wilayah Kota Depok mengalami peningkatan. PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan Ekonomi suatu Wilayah karena Faktor Inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dikhawatirkan Analisis perkembangan Ekonomi suatu Wilayah memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah Produk tidak meningkat tetapi akibat harga Produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan Ekonomi.

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari 2010-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.2. Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil di Kota Depok. Peningkatan nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan Investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatnya Pendapatan para Pekerja (masyarakat).

Grafik 2.2. PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2014 (dalam juta rupiah)

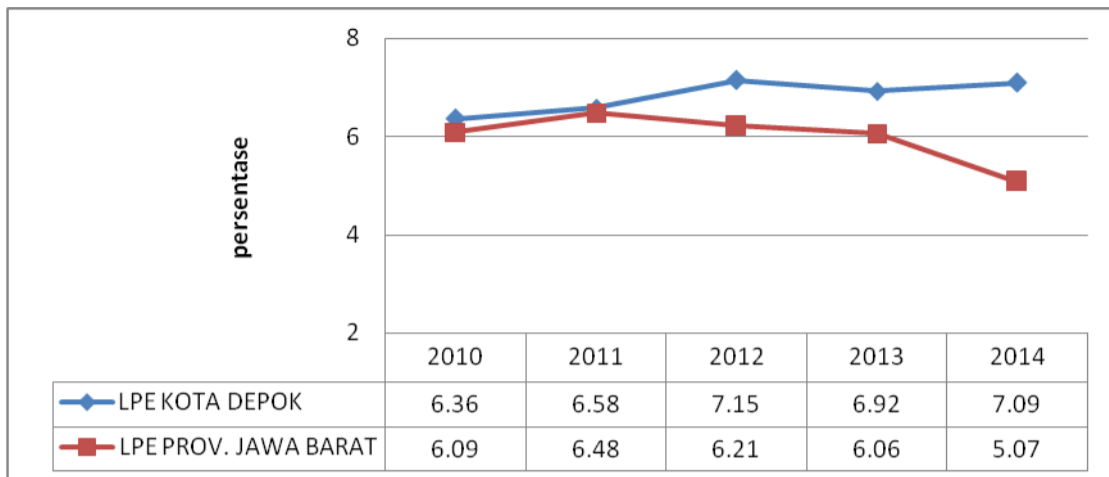


Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2014), berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2015 adalah sebesar 7,09 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (6,92 persen). Angka ini juga lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat, yaitu 5,07 persen, juga diatas laju pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,02 persen. Perkembangan laju pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dalam kurun 6 tahun, dapat dicermati pada Grafik 2.3.

Grafik2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2010-2014



Sumber: PDRB Kota Depok Tahun 2014

Peningkatan Ekonomi Kota Depok tahun 2014 ini ditopang oleh kenaikan Kontribusi sektor jasa Pemerintahan umum dan Swasta yang meliputi Jasa Sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan Rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, serta angkutan dan komunikasi. Inflasi Kota Depok Tahun 2014 sebesar 7,32 persen yang berdampak pada kurangnya daya beli masyarakat pada sektor Industri Olahan, perdagangan, Hotel, Restoran serta angkutan dan komunikasi. Kebijakan nasional tentang kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga-harga bahan Pokok yang ikut melambung sehingga mengganggu pertumbuhan Industri Olahan dan kenaikan tarif Angkutan kota serta Sektor Distribusi dan Logistik.

Struktur perekonomian

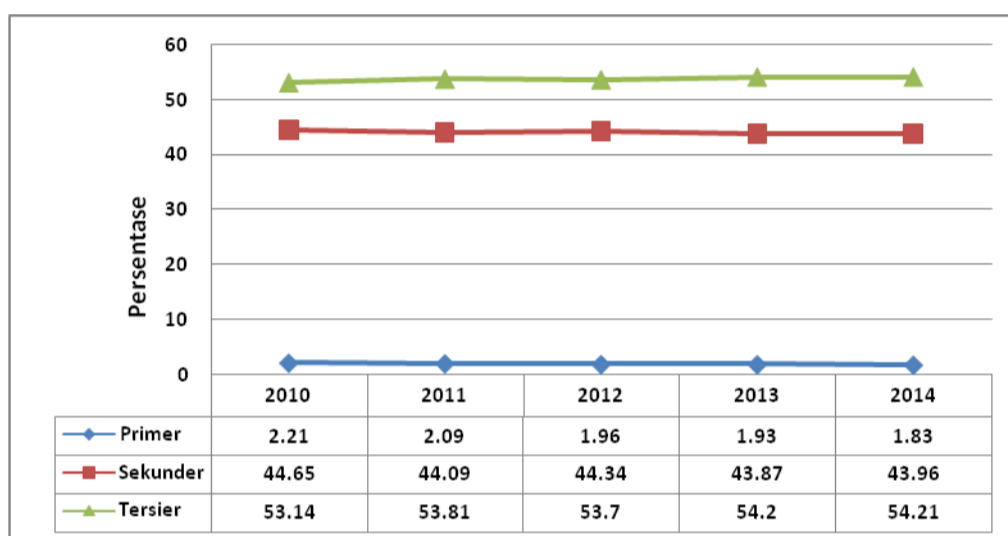
Kondisi Ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari Distribusi PDRB menurut Sektor-sektor yang menunjukkan Struktur Perekonomian suatu Wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

1. **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan Sumber-sumber alam seperti tanah dan Deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian.
2. **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan.

3. **Sektor Tersier**, atau dikenal sebagai Sektor Jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa.

Pada grafik 2.4 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2014 didominasi oleh sektor tersier (54,21%) dan sektor sekunder (43,96%).

Grafik2.4.Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2010 – 2014(ADHB) (dalam %)



Sumber: BPS Kota Depok 2014

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014). Sedangkan peranan kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014). Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).

PDRB Per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

PDRB perkapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp 11.854.685,- pada Tahun 2013 menjadi Rp 13.147.009 pada Tahun 2014 atau meningkat 10,90 persen.

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas Dasar harga konstan. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas Dasar harga konstan mengalami kenaikan dari Rp 4.056.982,- pada Tahun 2013 menjadi Rp 4.192.326,- pada Tahun 2014 atau naik 3,34 persen.

Tabel 2.5. PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi PDRB Dan Gini Ratio Kota Depok Tahun 2010-2014

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Rp)	9.228.226	9.825.302	10.571.847	11.854.685	13.147.009
PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Rp)	3.726.407	3.811.195	3.935.379	4.056.982	4.192.326
Pertumbuhan Ekonomi	6,42	6,22	6,36	6,58	7,15
Inflasi PDRB	7.93	4.10	4.20	8.77	7.32
Gini Rasio	0,318480	0,355369	0,398417	0,398100	0,365153

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2015

Hasil analisis dari Struktur Perekonomian dan Pertumbuhannya di Kota Depok, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 26.734.548,37 juta, mengalami peningkatan sebesar 14,93 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- b. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 8.525.129,16 juta, mengalami peningkatan sebesar 7,09 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

- c. Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok pada tahun 2014 sebesar 7,09 %, lebih tinggi 2,02 point bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang besarnya 5,07 %.
- d. Selama kurun waktu 2010 s.d 2014, rata-rata pertumbuhan Ekonomi Kota Depok adalah sebesar 6,79 % per tahun. Dan selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan Ekonomi Kota Depok selalu berada di atas Jawa Barat.
- e. Peranan kelompok Sektor Primer dalam Struktur Perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014).
- f. Peranan kelompok Sektor Sekunder dalam Struktur Perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok.
- g. Peranan kelompok Sektor tersier dalam Struktur Perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014).
- h. Sektor yang peningkatan peran dalam Perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).
- i. Inflasi Kota Depok pada Tahun 2014 yang dihitung dengan pendekatan PDRB adalah sebesar 7,32 %. Inflasi pada sektor primer sebesar 7,83 %, sektor tersier 6,72 % dan sektor sekunder 7,90 %. Sementara inflasi Kota Depok berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahun 2015 sebesar 1,87% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 7,49%.
- j. PDRB per Kapita Kota Depok pada Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 13.147.009,-, mengalami peningkatan sebesar 10,90 % jika dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita ini tidak menggambarkan secara utuh pendapatan per kapita Kota Depok, karena besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir masuk belum dapat dihitung, sedangkan penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas ekonomi di luar Kota Depok sangat banyak.
- k. Daya beli masyarakat secara riil meningkat sebesar 3,34 %.

Capaian Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Depok Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2015

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Jumlah koperasi aktif (%)	57.43	62,7 %
		Kontribusi PDRB Pertanian (%)	1.82	1,93
		Kontribusi PDRB industri (%)	37.63	34,16
		Kontribusi PDRB perdagangan (%)	38.73	38.01
		Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	0,04	0,05
		Laju Pertumbuhan investasi (%)	10	33,41
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.22	7,67
		Pendapatan asli daerah (%)	15	13,63
		Pendapatan di luar PAD (%)	11.25	15,56

Sumber : LKPJ Kota Depok Tahun 2015

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

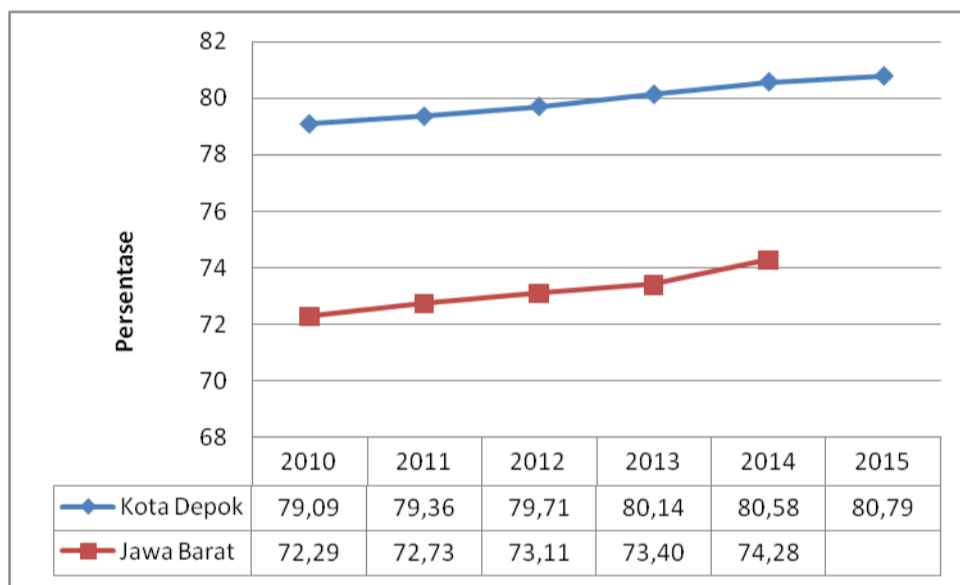
Analisis Kinerja atas Fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap Indikator kesejahteraan Sosial seperti seperti Indeks Pembangunan manusia (IPM), indeks pendidikan, Indeks Kesehatan dan tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran Komprehensif mengenai tingkat pencapaian Pembangunan Manusia di suatu Daerah sebagai dampak dari kegiatan Pembangunan yang dilakukan di Daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan Indikasi Peningkatan atau penurunan Kinerja Pembangunan Manusia pada suatu Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Kualitas SDM di Wilayahnya, baik dari Aspek Fisik (kesehatan), aspek Intelektualitas (Pendidikan), aspek Kesejahteraan Ekonomi (berdaya beli), serta Aspek Moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga Partisipasi rakyat dalam Pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai Indikator utama keberhasilan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2015 mengalami peningkatan 0,21 poin dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 80,79 poin (Tahun 2014 sebesar 80,58 poin) lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat sebesar 74,28. IPM diukur melalui 3 indikator yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya beli. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik.

Grafik 2.6. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2015



Sumber: LKPJ Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat, 2015

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 3 kecamatan dengan kategori IPM tinggi (minimal 80.00), yaitu kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cinere. Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 82,17 sedangkan Kecamatan Cipayung meski menduduki nilai IPM terendah, yaitu 71,08 namun masuk dalam kategori IPM sedang.

Tabel 2.7. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2009-2015

NO	TAHUN	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka melek huruf (AMH)	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Daya Beli	IPM
1	2009	72,97	98,93	10,77	647,69	78,77
2	2010	73,09	98,94	10,94	649,20	79,09
3	2011	73,22	98,96	10,97	651,46	79,36
4	2012	73,34	99,01	10,98	654,95	79,71
5	2013	73,64	99,04	10,98	658,25	80,14
6	2014	73,75	99,07	11,16	661,30	80,58
7	2015	74,10	99,09	11,17	661,35	80,79

Sumber : BPS Kota Depok 2015

Tabel 2.8. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka melek huruf (AMH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Daya Beli	IPM
1	Sawangan	68,73	99,20	10,64	646,22	76,27
2	Bojongsari	69,81	97,46	10,22	636,19	75,40
3	Pancoran Mas	69,25	99,70	11,45	656,55	78,06
4	Cipayung	68,60	97,79	9,36	596,19	71,08
5	Sukmajaya	75,54	99,75	11,99	659,21	82,17
6	Cilodong	74,44	99,04	10,85	618,11	77,39
7	Cimanggis	74,70	99,47	11,11	657,04	80,83
8	Tapos	70,29	98,81	10,88	616,95	74,97
9	Beji	70,22	99,84	12,05	659,20	79,28
10	Limo	70,18	99,25	10,06	659,17	77,65
11	Cinere	72,68	99,08	11,91	667,02	80,98
	Kota Depok	74,10	99,09	11,17	661,35	80,79

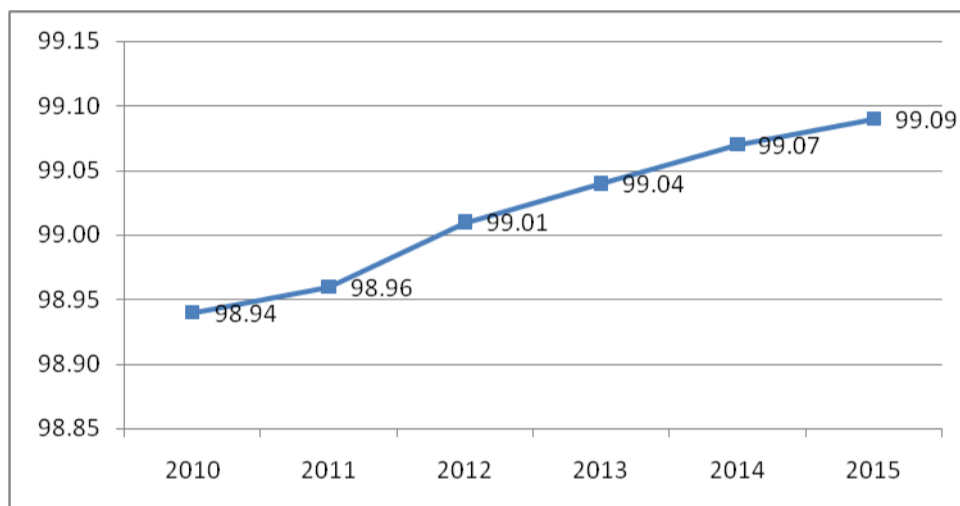
Sumber : BPS Kota Depok 2015

Indeks Pendidikan Masyarakat

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kota Depok, pada Tahun 2015 pencapaian Indeks Pendidikan yaitu dari angka melek huruf mencapai 99,09%, meningkat dibanding capaian Tahun 2014 sebesar 99,07%. Kendati AMH Kota Depok sudah cukup tinggi, namun angka ini menunjukkan bahwa masih ada 0,91% penduduk atau sekitar 19ribu lebih Penduduk Kota Depok yang buta huruf.

Upaya dalam peningkatan Angka Melek Huruf dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya penjangkaran terhadap anak-anak yang putus sekolah dan warga Kota Depok yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP dan SMA untuk mendapatkan Fasilitas Pendidikan melalui jalur Informal yaitu paket A, B dan C serta sekolah terbuka di SMP dan SMA tertentu.

Grafik 2.7 Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2010 – 2015

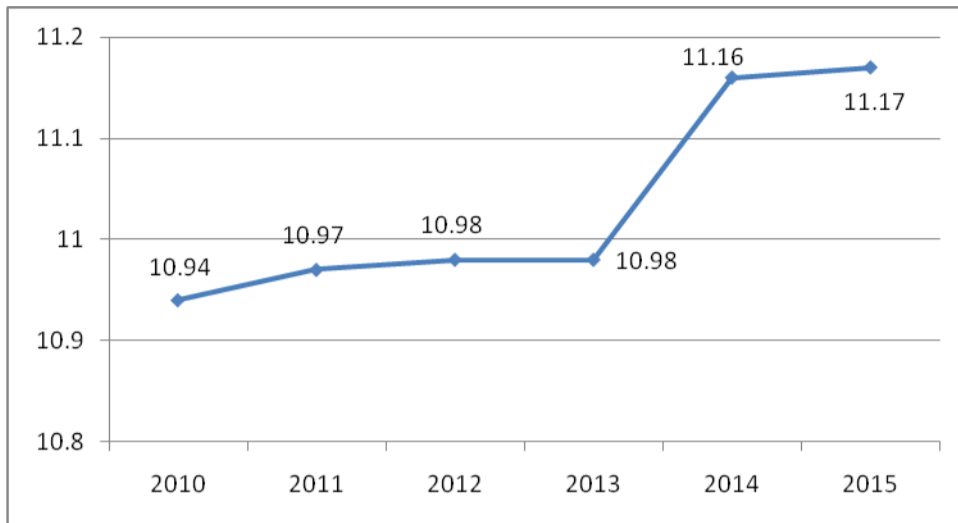


Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015

Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (ARLS) pada Tahun 2015 mencapai 11,17 tahun lebih tinggi dibandingkan Tahun 2014 yaitu 11,16 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata Penduduk Kota Depok mengenyam Pendidikan setara dengan kelas 3 SMA.

Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok terus dilakukan setiap tahunnya seperti Pembangunan Gedung sekolah Dasar dan menengah, peningkatan akses Pembiayaan Pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Grafik 2.8. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (tahun)



Sumber : BPS Kota Depok 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur Proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD/MI/Paket A pada Tahun 2015 mencapai angka 87,92. Nilai APM SMP/MTs/Paket Tahun 2015 sebesar 62,41. Sedangkan Nilai APM SMA/MAN/Paket C Tahun 2015 sebesar 32,90.

Jumlah APM yang belum mencapai 100% menunjukkan masih banyak anak usia sekolah di Kota Depok yang bersekolah di luar Kota Depok sedangkan penurunan APM diperkirakan akibat kurangnya jumlah Sekolah dibanding dengan jumlah anak usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2014 dari 89,76 (tahun 2014). Terhambatnya pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri juga mempengaruhi jumlah daya tampung yang ada di sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B menurun dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu 68,58. Adanya kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri yang terhambat juga mempengaruhi daya tampung di tingkat SMP khususnya SMP Negeri. Hal yang sama terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 36,57 (tahun 2014), hal ini dikarenakan kurangnya daya tampung di tingkat SMA/SMK khususnya SMA/SMK Negeri.

Dalam rangka meningkatkan APM/APK, Dinas Pendidikan Kota Depok telah mengambil Kebijakan menambah Daya tampung SMA dengan membuka Sekolah Baru.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 adalah setara SD : 100,325 %; setara SMP : 83,82 % dan setara SMA : 53,46%.

Penyebab utama belum tercapaiannya capaian APKSMP dan SMA di Kota Depok selain ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang jumlahnya belum memadai dapat menampung seluruh Penduduk usia sekolah, tetapi juga disebabkan banyaknya penduduk usia sekolah tidak bersekolah di Kota Depok tetapi di luar kota Depok (pesantren dan sekolah di luar Kota Depok). Sementara, upaya menekan angka Putus sekolah yaitu dengan memperbanyak Sekolah Terbuka dan kelompok belajar paket A, B dan C, membangun sekolah baru serta melakukan Pembinaan kepada Sekolah Swasta untuk meningkatkan kualitasnya sehingga Animo Masyarakat tidak hanya bertumpu kepada Sekolah Negeri.

Berikut ini Capaian indikator Kinerja pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Kota Depok Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Program (RPJMD)	Capaian Kinerja Tahun 2015	
		Target	Realisasi
1	Angka partisipasi kasar SD (%)	96,21	100,25
	Angka partisipasi kasar SMP (%)	84,44	83,82
	Angka partisipasi kasar SMA/K (%)	83,48	53,46
2	Angka partisipasi PAUD (%)	50	32,61
3	Angka putus sekolah SD (%)	0,60	0,004
	Angka putus sekolah SMP (%)	0,29	0,05
	Angka putus sekolah SMA/K (%)	0,19	0,01
4	Angka Kelulusan SD (%)	100	97,94
	Angka Kelulusan SMP (%)	100	98,74
	Angka Kelulusan SMA (%)	100	97,64
5	Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)	98,66	78,56
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)	86,67	69,70
6	Rasio murid/kelas SD	36	69
	Rasio murid/kelas SMP	36	55
	Rasio murid/kelas SMA	32	48

No	Indikator Kinerja Program (RPJMD)	Capaian Kinerja Tahun 2015	
		Target	Realisasi
7	Jumlah SMA/KN baru yang dibangun (sekolah)	16	17
8	Gratis sekolah SDN (%)	100	100
	Gratis sekolah SMPN	100	100
	Gratis sekolah SMAN	100	100
9	Beasiswa kuliah (orang)	20 Org	35 Orang
10	Jumlah guru berijazah S1/D4 (%)	85	89,55%
11	Jumlah PKBM (unit)	34 Unit	31 Unit

Sumber : LKPJ 2015

Indeks Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH)

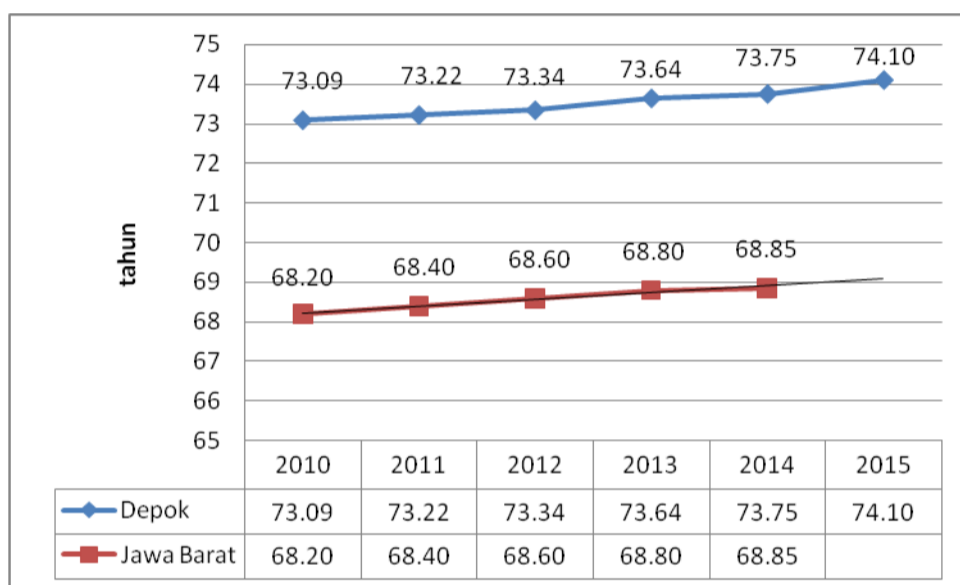
Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Definisi Angka Harapan Hidup adalah Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Penduduk pada umumnya, dan meningkatkan **derajat kesehatan** pada khususnya.

Sedangkan Indikator utama *derajat kesehatan* masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)*. Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan, dan gizi bayi itu sendiri sebagai faktor tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh sebab itu, perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita merupakan awal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kekurangan gizi pada bayi akan berakibat terhadap munculnya masalah kesehatan yang lain, dan akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2000).

Apabila terdapat Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu Daerah, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan evaluasi dan Peningkatan Kinerja Program Pembangunan Kesehatan dan Program Sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan Keluarga khususnya ibu hamil dan balita, Program peningkatan kecukupan gizi dan kalori dan program penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2015 Angka Harapan Hidup Kota Depok terakhir mencapai 74,10 tahun, meningkat dibanding tahun 2014 (73.75tahun)

Grafik2.9. Nilai AHH Kota Depok Tahun 2010 – 2015



Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015 dan LKPJ Depok 2015, LKPJ Prov Jawa Barat 2015

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu Endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan Sosial Ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung.

Kegunaan AKB untuk Pengembangan Perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor Endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka Program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan Program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 tercatat 1,57 perseribu kelahiran hidup atau 63 bayi dari 40.182 kelahiran hidup lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2011 di Kota Depok sebesar 3,21 perseribu kelahiran hidup atau 119 bayi dari 38.421 dari kelahiran hidup Sementara Angka prevalensi gizi buruk di Kota Depok pada Tahun 2014 sebesar 0,06persen (75 kasus anak gizi buruk lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 0,11persen (129 anak kasus gizi buruk). Penurunan angka balita gizi buruk ini terjadi karena adanya gebrakan dalam penanganan kasus balita gizi buruk di Kota Depok. Diantaranya dengan dibukanya Panti Pemulihan Gizi (PPG) di tiga Puskesmas yaitu Sukmajaya, Cimanggis dan Pancoran Mas. Sedangkan Angka kematian ibu di Kota Depok pada Tahun 2015sebesar 34,84 per 100.000 kelahiran hidup (14kasus dari 40.182 kelahiran hidup lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 59,32per100.000 kelahiran hidup (22 kasus dari 38.421 kelahiran hidup).

Tingkat Kemiskinan.

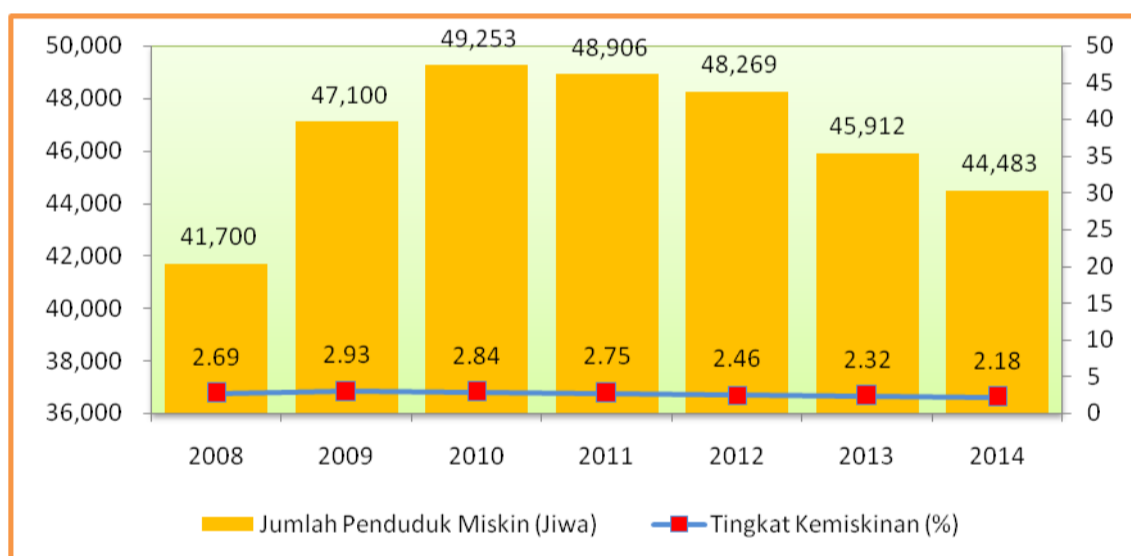
Tingkat Kemiskinan di Kota Depok dilihat dari Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan Formula $(100 - \text{angka kemiskinan}) \%$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi Standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh Individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

- Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap kemiskinan;
- Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar Daerah;
- Menentukan target Penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Berdasarkan Data Kondisi Perekonomian Kota Depok Tahun 2011-2014, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,75 %, Tahun 2012 sebesar 2,46%, pada Tahun 2013 sebesar 2,32% dan pada tahun 2014 sebesar 2,18% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,96 %) maupun Provinsi Jawa Barat (9,18 %). Artinya Penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 97,82%.

Grafik 2.10. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2008 – 2014



Sumber Data : BPS Kota Depok Tahun 2015

Tabel 2.10. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Head Count Index P0	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	Indeks Keparahan Kemiskinan P2	Garis Kemiskinan (Rp)
2010 (dipublikasikan tahun 2011)	49.253	2,84	0,51	0,14	310.279
2011 (dipublikasikan tahun 2012)	48.906	2,75	0,50	0,14	358.259
2012 (dipublikasikan tahun 2013)	48.269	2,46	0,24	0,04	413.638
2013 (dipublikasikan tahun 2014)	45.912	2,32	0,26	0,06	443.302
2014 (dipublikasikan tahun 2015)	44.483	2,18	0,4	0,09	462.069

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015

Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara Angkatan Kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan Angkatan Kerja harus diimbangi dengan Investasi yang dapat menciptakan kesempatan Kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan Angkatan Kerja.

Dalam Ilmu Ekonomi, kesempatan Kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan Pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses Produksi dapat memperoleh Pekerjaan sesuai dengan Keahlian, Keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan Pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai Bagian dari jumlah Penduduk yang mempunyai Pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut Sumber Daya Manusia.

Pada Tahun 2014 berdasarkan data Inkesra Tahun 2014, penduduk Kota Depok yang termasuk ke dalam angkatan kerja sekitar 958.587 orang, terdiri dari atas laki-laki sebanyak 635.613orang dan perempuan 322.974orang.

Dari jumlah tersebut, 877.684 orang yang bekerja, terdiri dari laki-laki sekitar 585.555 orang dan perempuan sebanyak 292.129 orang. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 80.903 orang yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.058 orang dan perempuan 30.845 orang. Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 554.739 orang, dengan rincian 139.380 orang sedang sekolah, 366.062 orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 49.297 orang.

Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014 (dipublikasikan tahun 2015)

Kegiatan Utama (1)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N (2)	% (3)	N (4)	% (5)	N (6)	% (7)
Angkatan Kerja	635.613	83,76	322.974	42,81	958.587	63,34
a. Bekerja	585.555	92,12	292.129	90,45	877.684	91,56
b. Pengangguran	50.058	7,88	30.845	9,55	80.903	8,44
Bukan Angkatan Kerja	123.265	16,24	431.474	57,19	554.739	36,66
a. Sekolah	63.971	51,90	75.409	17,48	139.380	25,13
b. Mengurus Rumahtangga	21.673	17,58	344.389	79,82	366.062	65,99
c. Lainnya	37.621	30,52	11.676	2,71	49.297	8,89
Jumlah	758.878	100,00	754.448	100,00	1.513.326	100,00

Sumber : Inkesra, 2015

Capaian Indikator Kinerja Fokus Indeks Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.12. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesehatan dan Indeks Kesejahteraan Sosial Lainnya Kota Depok Tahun 2015

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
2	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,22	8,44*
4	Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup	25	34,84
		Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 kelahiran hidup (%)	25,30	1,57
		Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92,64	97,82*
		Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)	0,10	0,06*

* Angka tahun 2014 (publikasi 2014)

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap Sistem Pendidikan terhadap Penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor Pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya Partisipasi Sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah Penduduk Usia Sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya Infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Banyaknya Penduduk yang mendapatkan Pendidikan di sekolah merupakan Indikator tersedianya tenaga terdidik atau Sumber Faya Manusia terdidik yang tersedia saat ini. Besaran ini ditunjukkan oleh angka Partisipasi Sekolah.

Tabel 2.13. Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah dan Status Pendidikan Di Kota Depok, Tahun 2014 (dipublikasikan tahun 2015)

Partisipasi Sekolah/ Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,56	2,45	1,49
Masih Sekolah	23,01	20,46	21,13
- SD	25,23	27,11	26,10
- SLTP	28,57	27,46	28,06
- SLTA	25,84	24,65	25,29
- D-1/UNIVERSITAS	20,37	20,78	20,55
Tidak Bersekolah lagi	76,43	77,09	76,76
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

Sumber : Inkesra 2015

Kualitas Penduduk dapat dilihat dari tingkat Pendidikan yang ditamatkan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, makin baik pula Kualitas Penduduknya. Pendidikan merupakan suatu Proses berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan Kecerdasan dan keterampilan manusia.

Dan upaya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ditempuh melalui pelaksanaan berbagai program Pendidikan dan Keterampilan.

Bidang Kesehatan

Rasio Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah Komunikasi alih Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan Pelayanan serta Pembinaan Teknis dari petugas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mempunyai nilai Strategis untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sejak dini. Posyandu merupakan Wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh Pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula Strategi Operasional pemeliharaan dan Perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara Dini, dapat dilakukan di setiap Posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan Analisis Rasio Posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan Fasilitas Pelayanan pemenuhan Kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar Status Gizi maupun Derajat Kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan Idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan Posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah Posyandu yang Efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai Dasar untuk merevitalisasi Fungsi dan peranannya dalam Pembangunan Daerah.

Jumlah balita (0-4 tahun) di Kota Depok berdasarkan Depok Dalam Angka Pada Tahun 2015 adalah sebesar 202.831 anak. Jumlah pos yandu sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 1003 pos yandu. Maka Rasio per satuan Balita di Kota Depok adalah lebih dari 200 balita per pos yandu. Idealnya satu pos yandu melayani 100 balita.

Bidang Lingkungan Hidup

Persentase Penanganan Sampah

Selain dibuang ke TPA Pengelolaan sebagian Sampah di Kota Depok dilakukan di UPS skala kawasan

Meskipun belum berjalan di seluruh Wilayah, Kota Depok telah menerapkan konsep Pengelolaan Sampah terpadu yang ramah lingkungan berupa pemilahan sampah Organik dan Anorganik di tingkat rumah tangga yang dipadukan dengan Pengolahan Sampah Organik di unit Pengolah Sampah (UPS) skala kawasan dan Pengumpulan Sampah Anorganik di Bank Sampah untuk dijual atau diproses menjadi Produk daur ulang. Saat ini terdapat 428 Unit bank sampah yang melayani masyarakat setiap satu minggu sekali, yang merupakan salah satu bentuk Partisipasi masyarakat dalam Sistem Pengelolaan sampah di Kota Depok. Penerapan konsep terpadu ini sangat penting untuk mengurangi beban yang diterima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas Kapasitas lahannya. Sistem Pengelolaan Sampah yang terpadu ini pula yang membawa Kota Depok meraih prestasi dalam Sanipura Award Tahun 2014 yang merupakan penghargaan bergengsi di bidang Inovasi Sanitasi.

UPS yang sudah terbangun sampai dengan 2015 sebanyak 45 UPS. Dari jumlah tersebut pada tahun 2015 telah beroperasi 32 UPS dimana 24 diantaranya merupakan UPS organik. Cakupan penanganan sampah di kota Depok terus mengalami peningkatan dari 48,3% di 2014 menjadi 63,7% di 2015. Meskipun demikian, capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini antara lain dikarenakan sumberdaya Dinas yang meliputi prasarana, sarana dan SDM yang masih belum memadai. Upaya terobosan melalui pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) belum dapat berjalan optimal terkait dengan persoalan teknis dan sosial terutama akibat belum memadainya Sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan yang terdekat dengan lokasi UPS. Diperlukan upaya terobosan lain dalam rangka mendongkrak cakupan Pelayanan persampahan. Teknologi Pengolahan Sampah merupakan salah satu upaya

Alternatif yang dapat dilakukan Kota Depok dalam mensiasati masalah TPA yang sudah mendekati batas kapasitasnya dan meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan Kota Depok, selain dengan menggiatkan Gerakan Depok Memilah dan memperbanyak Komunitas Bank.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian PDAM Kota Depok, pengelolaan air bersih yang sebelumnya dikelola oleh UPT Air Bersih dengan berdirinya PDAM Kota Depok, maka Pengelolaannya diserahkan kepada PDAM Kota Depok. Di tahun 2015 PDAM Kota Depok menerima pengalihan sebagian aset dan SDM dari PDAM kabupaten Bogor yang ada di kota Depok. Jumlah pelanggan Kota Depok sampai dengan tahun 2015 yang dilayani oleh PDAM Kota Depok sebanyak 52.289 SR. Untuk jaringan air bersih Tahun 2015 capaian kinerja layanan penduduk pengguna air bersih perpipaan mencapai 12,41 persen kurang dari target yang ditetapkan sebesar 19 %. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih berasal dari aktor Eksternal dan Internal. Faktor Eksternal antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Masyarakat lebih menyukai menggunakan air bawah tanah,
- b) Belum adanya Regulasi yang membatasi Pemanfaatan air bawah tanah, dan
- c) Masih rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan sebagai konsumen, disamping juga wilayahnya yang sangat menyebar.

Faktor internal antara lain disebabkan karenamasih kurangnya sarana dan prasarana, masih lemahnya kinerja manajemen dan tarik ulur pengelolaan air bersih antara PDAM Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebelum tercapainya kesepakatan pengalihan aset.

Dari data BPS tahun 2014, rumah tangga di Kota Depok menggunakan fasilitas air minum sendiri sebanyak 93,02 persen, dari jumlah tersebut 45,56 persen rumah tangga lebih memilih menggunakan sumber air tanah dengan menggunakan pompa, sedangkan 3,06 persen rumah tangga di Kota Depok menggunakan leding (meteran dan eceran) sebagai sumber air minum.

Tabel 2.14. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Air kemasan	27,31	37,32	44,50	43,1	47,28
Leding	7,16	1,67	2,26	3,3	3,06
Pompa	61,95	57,61	47,82	51,0	46,50
Sumur terlindung	3,28	3,08	5,03	2,5	2,94
Sumur tak terlindung	0	0,32	0	0	0,06
Mata air terlindung	0	0	0,39	0	0,06
Mata air tak terlindung	0	0	0	0	0
Lainnya	0,3	0	0	0,1	0,11
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100

Sumber: Inkesra 2015.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

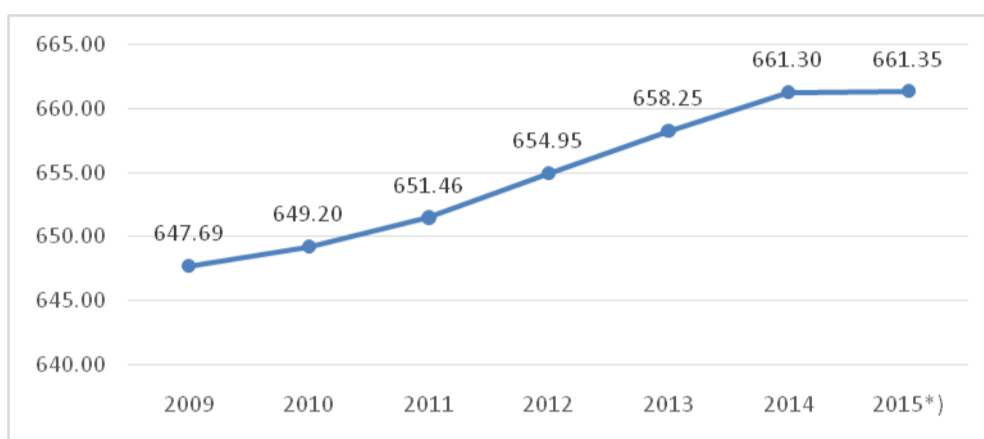
Daya saing Daerah adalah kemampuan Perekonomian Daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, Nasional atau Internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur, Iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis Kinerja atas Aspek kemampuan Ekonomi Daerah dilakukan terhadap Indikator pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan Produktivitas total Daerah.

Dari sisi daya beli masyarakat, pada Tahun 2015 terjadi peningkatan Daya beli di Kota Depok yaitu sebesar 661,335 ribu rupiah dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 661,30 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan daya saing Kota Depok sebagai potensi Pasar juga cukup besar terhadap Wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

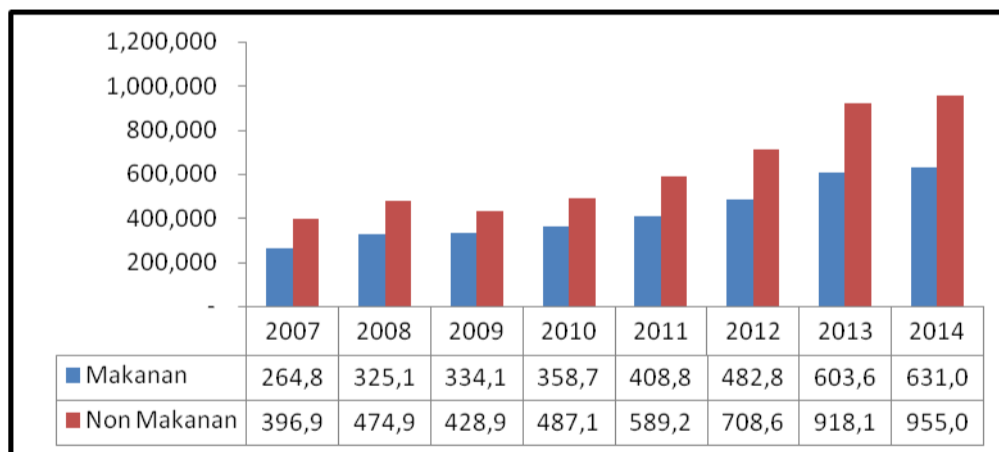
Grafik 2.11. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2009-2014



Sumber: IPM 2015, BPS

Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Depok secara umum sudah lebih Sejahtera.

Grafik 2.12. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2007-2014



Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015

2.1.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja atas Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah dilakukan terhadap kondisi prasarana dan sarana Transportasi, titik kemacetan, titik banjir, dan layanan persampahan.

Dari sisi Prasarana dan Sarana transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat Transportasi antar Kota yang paling banyak diminati, terdapat 5 Stasiun Kereta Api yakni Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam sedangkan rute yang dilayani saat ini adalah Depok – Angke, Depok – Bekasi, Depok – Bojong Gede, Depok – Jakarta Kota, Depok – Manggarai dan Depok – Tanah Abang.

Tabel 2.15. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) Di Kota Depok Sampai dengan Tahun 2015

KEADAAN JALAN	STATUS JALAN						
	JALAN NEGARA		JALAN PROPINSI		JALAN KAB/KOTA		
	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	%	(km)
1	2	3	4	5	6	7	8
JENIS PERMUKAAN							
a. diaspal	41,63		11,67		101,08		
b. kerikil							
c. tanah							
d. Lainnya (Rigid Pavement Perkerasan Kaku/Beton					375,07		
JUMLAH I		41,63		11,67			476,15
KONDISI JALAN							
a. Baik	41,63		9,09		467,69	98,22	
b. Sedang							
c. Rusak			2,58		8,47	1,78	
d. Rusak Berat							
JUMLAH II		41,63		11,67			476,15
KELAS JALAN							
a. Kelas I	41,63						
b. Kelas II			11,67				
c. Kelas IIIa					78,62		
d. Kelas IIIb					397,53		
e. Kelas IIIc					-		
g. Kelas tidak dirinci					-		
JUMLAH III		41,63		11,67			476,15

Sumber : Dinas BMSDA Kota Depok 2015

Jika dirinci menurut Status Pemerintah yang berwenang maka jalan-jalan di kota Depok terdiri dari jalan negara sepanjang 41,63 km, jalan provinsi 11,67 km dan jalan kota sepanjang 476,15km. Secara umum, kondisi jalan kota yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 467,69km(98,22%). Jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton) pada Tahun 2015 sebesar 85,87 %. Sedangkan jumlah angkutan kota menurut Trayek di Kota Depok Tahun 2015 sebanyak 2.884 kendaraan dan beroperasi 2 (dua) Koridor Angkutan Pemandu Moda Depok-Bandara Soekarno Hatta dan APTB sebagai salah satu modal Transportasi Massal.

Tabel 2.16. Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota Tahun 2015

No	Kode	Lintasan	Jumlah
1	D.01	Terminal Depok - Depok Dalam PP.	156
2	D.02	Terminal Depok - Depok II Tengah / Timur PP.	553
3	D.03	Terminal Depok - Parung PP.	548
4	D.04	Terminal Depok - Beji - Kukusan PP.	170
5	D.05	Terminal Depok - Citayam - Bojonggede PP.	376
6	D.06	Terminal Depok - Pasar Cisalak PP.	287
7	D.07	Terminal Depok - Rawa Denok PP.	46
8	D.07A	Terminal Depok - Pitara - Citayam PP.	74
9	D.08	Terminal Depok - BBM - Kampung Sawah PP.	40
10	D.09	Terminal Depok - Studio Alam - Kampung Sawah PP.	56
11	D.10	Terminal Depok - Parung Serab - Kampung Sawah PP.	81
12	D.11	Terminal Depok - Kelapa Dua - Palsigunung PP.	145
13	D.15	Terminal Depok - Jl. R. Sanim - Simpangan- Limo PP.	36
14	D.17	Terminal Jatijajar - Bandaran Pucung - Bhakti ABRI - Tapos - Cibubur	13
15	D.21	Term.Sub Sawangan - Bedahan - Duren Seribu PP.	19
16	D.25	Bedahan - Term.Sub Sawangan - Abdul Wahab - Curug - BSI PP.	31
17	D.26	Term.Sub Sawangan - Citayam PP.	27
18	D.27	Perum Arco - Sawangan - Cinangka PP.	11
19	D.35	Pasar Palsigunung - Sipangan RTM - Pangk. Sugutamu	17
20	D.35 A	Pasar Palsigunung - Pasar Cisalak	5
21	D.69	Pasar Cisalak - Pekapuran - Leuwinanggung PP.	86
22	D.107	Pasar Cisalak - Gas Alam - Leuwinanggung PP.	107
		JUMLAH	2884

Sumber : Dinas DLLAJ Kota Depok 2014

Survei titik kemacetan Tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik kemacetan di Kota Depok. Faktor penyebab kemacetan tersebut beragam, baik akibat terbatasnya kapasitas jalan, percampuran moda lokal dan Regional, proses naik-turun penumpang, radius persimpangan maupun keberadaan PKL dan Angkutan Informal (ojek) yang makin meningkatkan beban jalan. Adapun Fokus penanganan kemacetan pada Tahun 2015 ada di 2 (dua) titik yang ditargetkan yaitu Jl. Asmawi – Jl. Kukusan Raya (lanjutan) dan jalan RTM. Adapun penanganan titik macet dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17. Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir

2011	2012	2013	2014	2015
<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Depok, Kel Sukamaju 2. Jl. Bahagia Keadilan-Jl. Juanda, Kel Bhakti Jaya 3. Jl. Cinere (dari propinsi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Fly over UI Kec. Beji 2. Jl. Margonda (Ramanda-Kartini) 3. Jl. Tembus sejajar Rel Dewi Sartika – Arif Rahman Hakim 4. Jl. Kartini-Citayam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Pitara Raya 2. Jalan Tapos-Cibinong 3. Jalan Tumaritis Depdagri 	<p>Tidak terealisasi pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jalan Kemakmuran, 2. Simpang Jalan Raden Saleh karena pembebasan lahan tidak selesai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Asmawi – Jl. Kukusan Raya (lanjutan) 2. Jl. RTM (lanjutan)

Pertumbuhan Penduduk di Kota Depok berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kondisi ini menyebabkan munculnya simpul-simpul kemacetan. Untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut membutuhkan Solusi yang lebih komprehensif, selain penanganan fisik dibutuhkan juga penanganan masalah Nonfisik/Sosial seperti peningkatan Kesadaran dan penegakan disiplin Masyarakat dalam berlalulintas.

Survei titik banjir menurut Dinas BMSDA Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 52 titik banjir di Kota Depok. Dari sisi program penanggulangan banjir, pemerintah daerah Kota Depok melakukan berbagai kegiatan, yaitu konservasi situ dan sempadan sungai yang terealisasi antara lain : 3 bangunan irigasi, 54 saluran drainase, 8 Daerah Aliran Sungai, 4 sempadan dan 1 setu. Adapun penanganan masalah banjir dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2015 terlaksana di 2 titik lokasi banjir (drainase) yakni di Komplek Marinir Perum Arcadia (Kali Sunter) Kel. Sukatani Kec. Tapos dan Pasar Musi sekitarnya.

Namun demikian, permasalahan banjir masih terlihat diberbagai lokasi yang merupakan masalah yang dihadapi suatu Perkotaan. Sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh untuk mengatasinya, tidak hanya yang berjangka pendek tetapi juga jangka panjang melalui pengendalian tataruang kota secara ketat, gerakan penghijauan, pemeliharaan Drainase yang telah dibangun, dan pentingnya keterlibatan masyarakat.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Kota Depok merupakan Kota dengan jumlah Penduduk yang besar yaitu 2.106.102 jiwa. Penduduk Depok ini menempati hanya sekitar 20.029 km² luas Wilayah Depok sehingga kepadatan Penduduknya mencapai 10.515,26 jiwa/km². Berdasarkan Struktur umur, proporsi jumlah Penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) lebih tinggi daripada Penduduk usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun yaitu 1.495.399 jiwa atau 71 %, sehingga rasio ketergantungan (RK) di Kota Depok tahun 2015 sebesar 40,84%. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2014 sebesar 63,34 atau meningkat dari tahun 2013 sebesar 62,74, namun angka pengangguran tahun 2014 meningkat menjadi 8,44% dari 7,67 % pada tahun 2013.

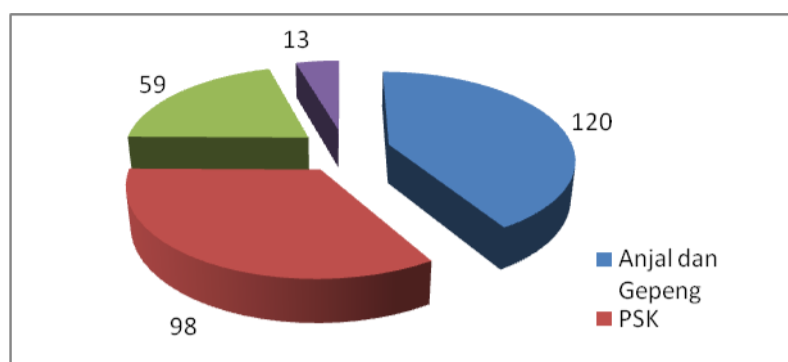
2.1.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim Investasi Kota Depok dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Eksternal. Dari sisi Internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan Investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan Retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi Pasar Lokal dalam menyerap hasil Produksi.

Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan Kriminalitas, penyandang masalah Sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada Tahun 2014, dari total 290 kali penertiban yang dilakukan satpol PP sebanyak anak jalanan (anjali) dan gepeng 120 org, PSK 98 org, spanduk 59 pelanggaran, reklame 13 pelanggaran.

Grafik 2.13. Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2015



Tabel 2.18. Realisasi Perizinan Dari Tahun 2009-2014

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	IPR (Izin Pemanfaatan Ruang)	850	1.158	1.171	1.296	1.543	1.972
2	HO (Izin Gangguan)	807	790	609	976	1.240	1.041
3	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	5.797	9.059	11.429	6.715	6.570	7.536
4	SIUP Kecil	-	-	-	764	794	696
5	SIUP Menengah	842	1.166	1.164	266	301	339
6	SIUP Besar	-	-	-	34	32	34
7	SIUP Mikro	-	-	-	66	50	59
8	Izin Usaha Industri (IUI)	67	106	131	42	53	51
9	TDI (Tanda Daftar Industri)	-	-	-	29	24	43
10	IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	81	70	131	39	83	155
11	Izin Tetap Usaha Pariwisata	110	149	126	123	157	149
12	Izin Sementara Usaha Pariwisata	-	-	-	61	20	-
13	IPABT (Izin Pengambilan Air Bawah Tanah)	101	87	69	17	81	43
14	IPKS (Izin Penyelenggaraan Kesehatan)	86	152	132	74	122	97
15	IPREK (Izin Pemasangan Reklame)	2.154	2.241	1.119	1.863	1.681	1.626
16	SITU (Surat Izin Tempat Usaha)	668	771	775	46	-	-
17	Prinsip	-	-	-	35	9	2
18	Spanduk & Baligo	-	-	-	1.316	1.038	1.000
19	Parkir	18	22	11	6	2	10
20	Izin Lokasi	-	1	3	10	17	10
21	IPLC (Izin Pembuangan & Pemanfaatan Air Limbah)	36	49	15	29	29	26
22	IUKS (Izin Usaha Ketenagaan Listrik Sendiri)	-	10	4	6	-	-
23	IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan)	-	-	-	1	1	-
24	IUTM (Izin Usaha Toko Modern)	-	-	-	14	38	13
25	IUMGB (Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi)	20	7	7	1	-	-
TOTAL		11.637	15.838	16.896	13.829	13.885	14.905

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

RKPD 2015 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016. RPJMD 2011-2016 memuat 9 Prioritas Pembangunan berikut 8 Program Unggulan dan 4 Program Andalan, disertai dengan 29 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJMD dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumberdaya Daerah.

Oleh karena itu, evaluasi RKPD Kota Depok Tahun 2015 menggunakan Indikator Kinerja Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2011-2016, Indikator kinerja pembangunan Kota Depok tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok Tahun 2015

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,43-80,76	80,79
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi		
1.	Daya Beli (ribu Rp)	665,92-666,88	661,335*
2.	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.19	7,09*
3.	PDRB per kapita (berlaku) (rupiah)	13,197,651	13.625.060,33*
4.	PDRB per kapita (konstan) (rupiah)	3,824,080	4.344.767,58*
5.	Indeks Gini	0,2 - 0,3	0,365153*
6.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.64	97,82*
B	Fokus Kesejahteraan Masyarakat		
1.	Angka melek huruf (%)	99,42-99,53	99,09
2.	Angka rata-rata lama sekolah (%)	10,75-10,81	11,17
3.	Angka partisipasi kasar (%)		
	a. SD/MI	96.21	100,25
	b. SMP/MTs	84.44	83,82
	c. SMA/SMK/MA	83.48	53,46
4.	Angka Partisipasi Murni (%):		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94.92	87,92

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83.09	62,41
	c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	79.8	32,90
5.	Angka usia harapan hidup (tahun)	73,13-73,60	74,10
6.	Persentase balita gizi buruk (%)	0.10	
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1	Jumlah gedung (buah)	8	9
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Fokus Layanan Urusan Wajib		
	Pendidikan		
1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99.42	99,99
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	50	32,61
3.	Angka Putus Sekolah (%):		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.6	0,004
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.29	0,05
	c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.19	0,01
4.	Angka Kelulusan (%) :		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	97,94
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	98,74
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	97,64
5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs %	98.66	78,56
6.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	86.67	69,70
	Kesehatan		
1.	Angka Kematian Bayi	22,25-25,30	34,84/100rb KH
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80	79,79
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95	92,88
4.	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100	100
5.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	80	53,77
7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100
8.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
9.	Cakupan kunjungan bayi (%)	98	95,59
10.	Cakupan puskesmas (%)	100	100
11.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	100	100
Pekerjaan Umum			
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	91.56	98,22
2.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	94	-
3.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)	0.16	-
Perumahan			
1.	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)	19	12,41
Perencanaan Pembangunan			
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1RKPD 2016	1 dokumen RKPD 2016 dan 1 dokumen RKPD Perubahan 2015
Perhubungan			
1.	Rasio ijin trayek (%)	0.14	0.28
2.	Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis	2	2
Lingkungan Hidup			
1.	Persentase penanganan sampah (%)	67	63,7
2.	Persentase Penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan (%)	92	92,20
3.	Presentase rumahtangga yang memiliki jamban sehat (%)	94	93,60
4.	Kawasan Lindung	0.035	-
Kependudukan dan catatan sipil			
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	3.6	
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	100	100
3.	Kepemilikan KTP (%)	100	99,48
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	91	25,39
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	93	90,45

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	76.8	72,20
2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	12.2	16,66
Ketenagakerjaan			
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,11-7,92	-
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)		
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
1.	Persentase koperasi aktif (%)	57.43	62,7
Otonomi Daerah			
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0.72	0,47
2.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	16.7	-
3.	Penduduk Miskin (%)	7.36	2,01
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	83.8	80,66
Pemberdayaan masyarakat dan desa			
1.	PKK aktif (%)	100	100
2.	Posyandu aktif (%)	100	100
Statistik			
1.	Buku "Kota Depok dalam angka"	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Kota Depok"	Ada	Ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan			
Komunikasi dan informatika			
1.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	Ada	Ada
Pertanian			
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	1.82	1,83
Pariwisata			
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0.04	-
Kelautan dan perikanan			
1.	Produksi perikanan (ton)	2,153	1.512,47
Perdagangan			
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	38,73	37,98
Perindustrian			

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	37,63	33,92
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
	Fokus Kemampuan ekonomi daerah		
1.	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita (rupiah)	515,077	631.000
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah)	722,939	955.000
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	92	92,20
	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan	19	12,41
	Fokus Sumberdaya Manusia		
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	7.31	-
2.	Rasio ketergantungan (%)	42.32	-

*) data sementara

Sumber : LKPJ AMJ 2015, Inkesra 2015, DDA 2015

Tabel2.20. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Depok Tahun2015

Misi	Indikator Kinerja	Tahun 2015	
		Target	Realisasi
Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	88,06
	Opini BPK	WTP	WTP
	Kepemilikan KTP (%)	100	99,48
	Penegakan Perda	63	73
	Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan	75	61,06
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Jumlah koperasi aktif (%)	57.43	63,85
	Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)	1.82	1,83
	Kontribusi PDRB industri thdp PDRB Kota	37.63	33,92
	Kontribusi PDRB perdagangan thd PDRB Kota	38.73	37,98
	Kont PDRB Pariwisata thd PDRB Kota	0.04	0,04
	Laju Pertumbuhan Investasi	10%	30,57
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.22	8,11
	Pendapatan asli daerah	15	18,24
	Pendapatan di luar PAD	11.25	6,15
Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman	Titik macet yang ditangani (buah/tahun)	2	2
	Titik/lokasi banjir yang ditangani	2	2
	Cakupan layanan persampahan (%)	67	63,7
	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	92	92,20

Misi	Indikator Kinerja	Tahun 2015	
		Target	Realisasi
	Penambahan Lokasi RTH publik	2	4 taman kota, 25 taman RW
Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94.92	87,92
	APM SMP/MTs/Paket B (%)	83.09	62,41
	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)	79.8	32,90
	Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun)	1	4
	Jumlah RW Layak Anak	50	79
	Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (%)	25	100
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup	25	34,84/100rb KH
	Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 kelahiran hidup	25.3	1,57/1000KH
	Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)	1.10	
	Penanganan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)(%)	45	17,98

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok 2015

2.2.1. Capaian Kinerja Program Unggulan

Sesuai amanat RPJMD Kota Depok 2011-2016, Pemerintah Kota memiliki 8 Program Unggulan dan 4 Program Andalan. Realisasi Program tersebut pada tahun 2015 dapat dicermati pada Tabel 2.21. berikut.

Tabel 2.21. Realisasi Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2015

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		KET
			TARGET	REALISASI	
1	Fasilitasi pemberdayaan usaha mikro	Jumlah usaha mikro difasilitasi bantuan sarpras	1000 UKM	-	
2	Pemberdayaan ekonomi pemuda	Jumlah pemuda terbina wirausaha	810org	-	
3	Betonisasi jalan	Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Bertambah 6,66%	-	
		Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Bertambah 1,65%	-	
4	Pembangunan SMAN/SMKN	Jumlah SMA/KN yg dibangun	16	17	
5	Gratis pendidikan SDN, SMPN,	Gratis sekolah SDN	100%	100%	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		KET
			TARGET	REALISASI	
	SMAN	Gratis sekolah SMPN	100%	100%	
		Gratis sekolah SMAN	100%	100%	
6	Pemberian beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi	Beasiswa kuliah	20 orang	39 orang	
7	Pelayanan puskesmas 24 jam dan bantuan gratis rawat inap DBD kls III	Jumlah puskesmas 24 jam	10	9	
		Cakupan penanganan DBD gratis	100%	100%	
8	Pelayanan Santunan kematian	Jml terlayani santunan kematian	100%	100%	

Sumber : LKPJ AMJ 2015

Mencapai dan Melebihi Target

Berdasarkan Tabel 2.20 di atas, terdapat target Indikator Kinerja yang berhasil dicapai yaitu : Opini BPK, Kepemilikan KTP, Penegakan Perda, Jumlah koperasi aktif, Kontribusi PDRB pertanian, Kontribusi PDRB Pariwisata, Laju Pertumbuhan Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan asli Daerah, Pendapatan di luar PAD, Lokasi Banjir yang ditangani, Penambahan Lokasi RTH Publik, Jumlah Lapangan Olahraga yang direhab/dibangun, Jumlah RW Layak Anak, Angka Kematian Bayi, Prevalensi gizi buruk dan Penanganan PMKS

Tidak Mencapai Target

Berdasarkan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah (lihat Tabel 2.19 dan 2.20) terdapat Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yaitu : Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM), tingkat waktu tanggap daerah layanan, Kontribusi PDRB Industri, Kontribusi PDRB perdagangan, Titik macet yang ditangani, Rumah tangga pengguna air bersih, Cakupan layanan persampahan, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Kematian Ibu.

Tabel 2.22. Capaian IKM Kota Depok Tahun 2015

No.	Jenis Pelayanan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ijin Gangguan	87,46	86,80	85,41	83,25	81,35
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	84,73	83,51	82,41	85,00	83,47
3	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	83,90	83,88	83,37	85,75	82,13
4	Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA)	82,64	81,85	80,72	86,50	81,48
5	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	79,31	81,57	81,70	89,50	83,46
6	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	77,70	79,80	79,74	79,75	80,74
7	Ijin Pemasangan Reklame	89,86	89,18	88,03	80,50	81,55
8	Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta	81,07	81,75	82,53	83,75	83,82
9	Kesehatan Dasar	81,04	81,30	81,87	85,25	84,12
10	Pasar	75,51	74,30	73,21	69,50	72,83
11	Kartu Kuning	82,94	83,11	80,86	84,00	85,15
12	Pembayaran Pajak	79,67	81,71	88,70	88,26	88,34
13	Akte Kelahiran Umum	81,83	82,12	84,73	91,00	89,16
14	KTP & Kartu Keluarga	77,84	80,03	75,55	86,25	81,84
15	Pemadam Kebakaran	80,63	80,81	79,22	74,50	75,18
16	Pelayanan Air Bersih	79,30	80,11	79,52	80,70	81,35
17	Rumah Potong Hewan (RPH)	84,73	85,85	83,97	76,75	81,74
18	Pendidikan Dasar & menengah	75,67	76,55	76,85	71,00	77,89
19	Jalan	74,11	73,02	72,91	67,75	69,76
20	Terminal	69,59	69,11	69,21	65,50	69,44
21	Persampahan	73,86	75,22	74,81	80,50	79,11
Rata-Rata IKM		80,16	80,55	80,25	80,18	80,66

Sumber : IKM Kota Depok Tahun 2015

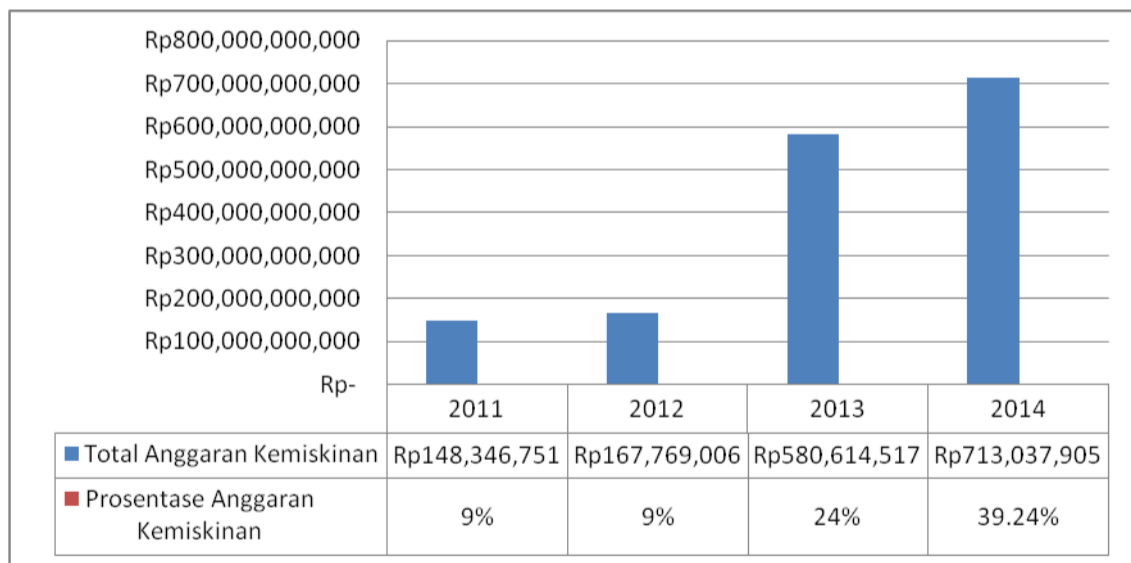
2.2.2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan dan Program MDG's

Hasil Evaluasi capaian kinerja Penanggulangan Kemiskinan dan Program MDG's Kota Depok Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.23. berikut ini :

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan dan MDG's Kota Depok Tahun 2011-2014

No	Tujuan / Goal	Target Akhir RPJMD Tahun 2016	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014
1	Penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. (%)	7,22	2,84	2,75	2,46	2,32
2	Pencapaian pendidikan dasar bagi semua (%)	APM SD : 95.02 APM SMP : 89.18	APM SD : 89.47 APM SMP : 69.71	APM SD : 94.38 APM SMP : 76.24	APM SD : 93.04 APM SMP : 72.43	APM SD : 89,76 APM SMP : 68,58
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (%)	AMH : 100	AMH : 98.96	AMH : 99,01	AMH : 99,04	AMH : 99,07
4	Mengurangi tingkat kematian anak (AKB) / %	25.10	22.16	2.2	0.29	0,04
5	Meningkatkan kesehatan ibu (AKI)	22	22	15	17	36,42
6	Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya(Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC BTA) / %	80	52.20	57.20	55.59	-
7	Memastikan kelestarian lingkungan hidup (Cakupan Layanan Air Bersih)	95	97.26	82.40	87	87,5

Grafik 2.14. Total Anggaran Kemiskinan Dan Prosentase Anggaran Kemiskinan Terhadap APBD (Tahun 2011-2014)



Keberhasilan dalam Pencapaian MDGs sangat tergantung pada Tatakelola yang baik, Kemitraan Produktif dari segenap Komponen Masyarakat, dan Penerapan Pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan yang Inklusif dan peningkatan Layanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat diseluruh Daerah.

2.3. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Hasil Evaluasi Kinerja tahun lalu selain *mereview* RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan Dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel 2.24. berikut ini:

Tabel 2.24. Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan		
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian	
							Target			
1 URUSAN WAJIB										
101	Urusan Pendidikan									
	Dinas Pendidikan									
1	Program : Peningkatan sarana prasarana pendidikan	Rasio murid SD/kelas	32	36	69	52%	36			
		Rasio murid SMP/kelas	32	36	55	66%	36			
		<i>Kegiatan Unggulan:</i>	Rasio murid SMA/kelas	32	32	48	67%	32		
	<i>Pemerataan Pembangunan SMAN/SMKN</i>	Jumlah SMA/KN yang dibangun	16	16	17	106%	16			
2	Program : Peningkatan akses pembiayaan pendidikan	Angka putus sekolah SD/MI	0.59%	0.60%	0.004%	1%	0.60%			
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0.28%	0.29%	0.050%	17%	0.29%			
		Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0.18%	0.19%	0.010%	5%	0.19%			
	<i>Kegiatan Unggulan :</i>	Gratis SDN	100%	100%	100%	100%	100%			
		Gratis SMPN	100%	100%	100%	100%	100%			
		<i>1. Gratis Pendidikan SD,SMP, SMA/SMK</i>	Gratis SMAN	100%	100%	100%	100%	100%		
		<i>2. Pemberian beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi</i>	Gratis SMKN	100%	100%	100%	100%	100%		
		Beasiswa kuliah	100 Orang	20 Orang	39 Orang	195%	20 Orang			
3	Program : Peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan	Angka kelulusan SD/MI	100%	100%	98%	98%	100%			
		Angka kelulusan SMP/MTs	100%	100%	99%	99%	100%			
		Angka kelulusan SMA/SMK/MA	100%	100%	98%	98%	100%			
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100%	98.66%	78.56%	80%	98,66%			
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.53%	86.66%	69.70%	80%	86.66%			
		Jumlah guru berijasah S1/D4	90.00%	85.00%	89.55%	105%	85.00%			
4	Program : Peningkatan pendidikan informal dan nonformal	Jumlah PKBM	35 Unit	34 Unit	31 Unit	91%	34 Unit			
		Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55%	50.00%	56.07%	112%	50.00%			
5	Program : Pengembangan pendidikan kreatif	Tersedianya Grand Design Pengembangan Pendidikan Kreatif	-	-	-	-	-			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-			
		Terbinanya tenaga pendidikan dan kependidikan yang menunjang pendidikan kreatif	-	-	-	-	-			
6	Pogram : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	95%	90%	2100 Org Guru/Kepala Sekolah	na	90%			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
4	Program : Peningkatan kesehatan keluarga	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80%	79.79%	100%	80%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%	92.88%	98%	95%		
		Cakupan kunjungan bayi	98%	98%	95.59%	98%	98%		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Peningkatan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan kesehatan lingkungan	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	95%	92%	92.20%	100%	92%		
		Cakupan rumah tangga yang memiliki jamban sehat	97%	94%	88.80%	94%	94%		
7	Program : Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Meningkatnya pengawasan terhadap bahan dan produk pangan	95%	93%	93.00%	100%	93%		
		Meningkatnya status gizi masyarakat	96%	95%	91.10%	96%	95%		
		Temuan penderita gizi buruk berbahaya	110 Kasus	125 Kasus	77 kasus	62%	125 Kasus		
		Temuan pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan	5%	7%	4.02%	57%	7%		
8	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	100%	94%	100%	106%	94%		
9	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	100%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	100%	4 dok.		
12	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-	-	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	100%	1 Renja 2016		
13	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi			1 Perda Kibbla				

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
9	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO/Akreditasi/ OHSAS	700 SOP/1 Dok. ISO/20 Pelayanan/1 dok. OHSAS	700 SOP/1 Dok. ISO/20 Pelayanan/1 dok. OHSAS	97% (716 SOP/1 Dok. ISO/5 Pelayanan/1 dok. OHSAS)	102%	700 SOP/1 Dok. ISO/20 Pelayanan/1 dok. OHSAS		
10	Program: Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD	Jumlah BLUD	1 BLUD RSUD		1	100%			
103	Urusan Pekerjaan Umum								
1.03.1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air								
1	Program : Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan <i>Kegiatan Unggulan: Betonisasi Jalan</i>	Panjang Jalan kota dalam kondisi baik	92.21	1.65%	2.7 % atau 98,22% sd 2015	98,22%	1.65%		
		Jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton)	60%	6.66%	8.49% atau 85.87% sd 2015	85,87%	6.66%		
2	Program : Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi	Panjang drainase/irigasi terbangun (km)	191.5	17,5	44,66 km atau 242.17 km sd. Th. 2015	242,17	17,5		
3	Program : Pengendalian banjir	Jumlah kegiatan konservasi situ dan sempadan sungai	70	70	124 (101 irigasi, 14 DAS, 7 Sempadan, 2 setu)	177%	70		
4	Program : Penanggulangan kemiskinan terpadu	Berkurangnya kawasan kumuh	30%	5%	3,09%	62%	5%		
5	Program : Penataan jalur Margonda	Tertatanya prasarana bina marga dan SDA	100%		100%	100%			
6	Program : Pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar	Tertatanya prasarana bina marga dan SDA	100%		0.5003	100%			
7	Program : Penataan kawasan terminal Terpadu Margonda	Terbangunnya prasarana bina marga dan SDA	100%		-				
8	Program : Pembangunan gedung pemerintah	Terbangunnya kantor BMSDA	100%		53.50%	54%			
9	Program : Peningkatan layanan bidang pekerjaan umum	Meningkatnya prasarana pelayanan ke PUan	50%	6.66%	11.43%	172%	6.66%		
10	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah (%) aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	100%	4.60%		0%	4.60%		
11	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	95,21%	95%	100%		
12	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	5%	76,07%	1521%	5%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	10 dok	2 dok	2 Dok	100%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	5 dok	1 dok	1 Dok	100%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	60 dok	12 dok	12 Dok	100%	12 dok		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
11	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	10 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	5 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	60 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	20 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok		
12	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sector/urusan	1 dok.			0%			
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-		0%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	100%	1 Renja 2016		
13	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	3 dok		-				
14	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO	6 dok		-				
104	Urusan Perumahan								
1.04.1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman								
1	Program : Peningkatan Pengelolaan air bersih	Cakupan layanan air bersih perpipaan	15624 SR	1000 SR	1272 SR	127%	1000 SR		
		Cakupan layanan air bersih non-perpipaan	27	25	3 titik	12%	25		
2	Program : Pengembangan perumahan rakyat	Jumlah KK terlayani perumahan	81,85%	75.94%	75.94%	100%	75,94%		
		Jumlah rumah tidak layak huni	1228 unit rumah	1342 Unit Rumah	-		1342 Unit Rumah		
3	Program : Pembangunan gedung pemerintah	Terbangunnya gedung dibale II	100%		-				
		Terbangunnya Gedung Perpustakaan Daerah	100%	60%	60%	100%	60%		
		Terbangunnya Gedung Kesenian	100%	60%	0%	0%	60%		
		Terbangunnya Gedung Arsip	100%	40%	40%	100%	40%		
		Terbangunnya Gedung BALAKOP	100%	60%	0%	0%	60%		
		Terbangunnya Gedung Pramuka & Pemuda	100%	55%	100%	100%	55%		
4	Program : Peningkatan Penataan lingkungan permukiman	Lingkungan pemukiman kumuh	4.2%	4,7%	5,74%	6%	4,7%		
105	Urusan Penataan Ruang								
1.04.1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman								
		Tersedianya perencanaan tata ruang	55%	45%	50%	111%	45%		
		Optimalnya penertiban perizinan penggunaan ruang	50%	45%	51.50%	114%	45%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
1	Program : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Pengawasan dan pengendalian bangunan	35%	33%	52.91%	160%	33%		
2	Program : Pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar	Terbangunnya Terminal Jatijajar	30%	30%	-	0%	30%		
3	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	90%	75%	100%	133%	75%		
4	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	19 Orang	18 Orang	-	0%	18 Orang		
5	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
8	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sector/urusan	60%	50%	50%	100%	50%		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Renstra 2011-2016	100%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	100%	1 Renja 2016		
9	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	80%	70%	-	0%	70%		
10	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO	80%	70%	100%	143%	70%		
106	Urusan Perencanaan Pembangunan								
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya RPJMD	1 RPJMD 2016-2021	-	1 RPJMD 2016 -2021 TEKNOKRATIK	100%	-		
		Tersusunnya RKPD	1 dok.	1 dok.	2 Dok (RKPD 2016 dan RKPD P 2015)	200%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	2 Renja (Renja 2016 dan Renja P 2015)	200%	1 Renja 2016		
		Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	-		100%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
2	Program : Peningkatan kordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi	Meningkatnya bantuan pembiayaan program dari Pusat, Provinsi, dan daerah lain	15%	13%	-		13%		
3	Program : Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Jumlah perusahaan pelaksana CSR	-	-	-		-		
4	Peningkatan kerjasama daerah	Jumlah kerjasama dengan daerah lain			-				
		Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi	3	3	-		3		
		Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha			-				
		Jumlah kerjasama dengan para pihak	1	1	2		1		
5	Program : Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan	100%	100%	100%	100%	100%		
		Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi fisik	95%	95%	83%	87.66%	95%		
6	Program : Penanggulangan kemiskinan terpadu	Meningkatnya kinerja TKPKD	80%	70%	70%	100.00%	70%		
		Jumlah Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu	100	100	100	100.00%	100		
7	Program : Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik	Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 dok	1 dok	1 dok	100%	70%		
8	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	100% (Sistem RPKD On Line)	100%	1 dok		
9	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	60	10	4 orang	40%	100%		
10	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
12	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	1 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	100%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	1 dok.	100%	4 dok.		
13	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	-	-	1 dok Naskah Akademis revisi RPJPD ; 2 Dok (RKPDP 2016 dan RKPDP P 2015)	100%			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
14	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO		-	1 ISO	100%	-		
105	Urusan Penataan Ruang								
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
15	Program : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Tersedianya perencanaan tata ruang Optimalnya BKPRD	80%	70%	PERda RTRW 2012-2032; RDTR 50% Naskah Akademis 70%	100.00% 100.00%			
116	Urusan : Penanaman Modal								
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Program : Peningkatan investasi daerah	Tersedianya profil investasi	6 dok	1 dok			1 dok		
		Jumlah kegiatan promosi potensi	6 kali	1 kali	Kegiatan BPM2T		1 kali		
2	Program: Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD	Jumlah BUMD	1 BUMD	-	mulai beroperasi pada Tahun 2013		-		
		Jumlah BLUD	1 BLUD		Penetapan PPK BLUD Puskesmas di 11 Kecamatan				
123	Urusan : Statistik								
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan	Tersusunnya buku Depok Dalam Angka (DDA)/Data pengukuran kinerja	1 dok DDA 2016	1 dok DDA 2015	1 dok DDA 2015	100%	1 dok DDA 2015		
		Tersusunnya buku PDRB Kota	1 dok PDRB 2015	1 dok PDRB 2014	1 dok PDRB 2014	100%	1 dok PDRB 2014		
		Tersedianya data kemiskinan	1 dok (2016)		-				
107	Urusan Perhubungan								
	Dinas Perhubungan								
1	Program : Pengembangan transportasi massal	Jumlah Koridor Angkutan darat	2 koridor angk. darat	-	-		-		
		Terwujudnya moda transportasi massal	1 (feeder busway)	-	-		-		
		Terintegrasinya moda transportasi regional	2 (Park and Ride)	-	-		-		
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya sarpras lalu lintas	40%	2%	1.9%	95.00%	2%		
		Terbangunnya PJU	74%	5%	4.4% (437 titik)	88.00%	5%		
3	Program : Pembangunan gedung pemerintah	Terbangunnya gedung kantor Dishub	100%	30%	0%	0.00%	30%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
4	Program : Penataan jalur Margonda	Tercukupinya sarpras transportasi di jalur Margonda Raya	100%	10%	10%	100.00%	10%		
5	Program : Pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar	Tersedianya Sarpras Terminal Jatijajar	100%	-	-	0.00%	-		
6	Program : Penataan kawasan Terminal Terpadu Margonda	Tersedianya prasarana pendukung Terminal Terpadu Margonda	100%	-	-	0.00%	-		
7	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	16%	16%	100.00%	16%		
8	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	55 org	50 Org	3 Orang	6.00%	50 Org		
9	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	tersedia	100%	100%	100.00%	100%		
10	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	optimal	100%	100%	100.00%	100%		
11	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok	2 dok	2 dok	100.00%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok	1 dok	1 dok	100.00%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100.00%	12 dok		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok	4 dok	4 dok	100.00%	4 dok		
12	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sector/urusan	1 dok	1 dok	1 dok	100.00%	1 dok		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-	0.00%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	100.00%	1 Renja 2016		
13	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	2 revisi perda	-	-	0.00%			
14	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO	1 SOP			0.00%			
15	Program : Peningkatan Layanan bidang Perhubungan	Meningkatnya cakupan pelayanan perhubungan	85%	5%	19%	380.00%	5%		
108	Urusan Lingkungan Hidup								
	Badan Lingkungan Hidup								
1	Program : Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Luas hutan/lahan kritis yang direhabilitasi	50%	43.70%	88,125 Ha/1926 Ha = 4,58% (realisasi kinerja s/d th. 2015 = 38,60%)	38.60%	43.70%		
2	Program : Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	80%	74.50%	83.00%	111%	74.50%		
		Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	29 kasus / 29 kasus = 100% (data terlampir)	100%	100%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
		Jumlah kasus pencemaran yang teridentifikasi	5%	6	29 kasus	483%	Target 6		
3	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	90%	80%	89%	90%		
4	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	14 org	12 org	17 org (data terlampir)	142%	12 org		
5	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	10 dok	2 dok	2 Dokumen	100%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	5 dok	1 dok	1 Dokumen	100%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	60 dok	12 dok	12 Dokumen	100%	12 dok		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	20 dok	4 dok	4 Dokumen	100%	4 dok		
8	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sector/urusan	1 dok	1 dok	12 Dokumen	100%	1 dok		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 draft renstra 2016-2021		-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	100%	1 Renja 2016		
9	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	3 Perda 2 Perwa		1 Perda RPPLH dan 3 Perwal	100%			
10	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO	3 (SPM LH & SOP B3)	1 SPM	1 SPM	100%	1 SPM		
110	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Program : Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kepemilikan KTP	100%	100%	99%	99.5%	100%		
		Kepemilikan akte kelahiran/1000 penduduk	95%	91%	79%	86.7%	91%		
2	Program : Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Penerapan e-KTP (jml penduduk)	100%	100%	102%	101.7%	100%		
3	Program : Pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan	Penertiban Administrasi Kependudukan	33 titik	31 titik	43 titik	138.7%	31 titik		
4	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	100%	100.0%	100%		
5	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional (orang)	478	81	81 Orang	100.0%	81		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPd tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
6	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.0%	100%		
7	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	85%	85.0%	100%		
8	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dok	100.0%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 Dok	100.0%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RfK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Dok	100.0%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 Dok	100.0%	4 dok.		
9	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 Dok	100.0%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Dok	100.0%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Dok	100.0%	1 Renja 2016		
10	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi			1 Dok	100.0%			
11	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO			2 Dok	100.0%			
111	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga								
1	Program : Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah RW Layak Anak (percontohan)	63 RW	50 RW	79 RW	158.00%	50 RW		
2	Program : Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	26.02%	26.02%	26.02%	100.00%	26.02%		
		Angka melek huruf perempuan 15 th ke atas	99.20%	99.15%	99.10%	99.95%	99.15%		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	94.00%	93.00%	92.00%	98.92%	93.00%		
3	Program : Penanggulangan kemiskinan terpadu	Meningkatnya keberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS	1100 Orang	1000 Orang	1.100 Orang	110.00%	1000 Orang		
4	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	100%	100.00%	100%		
5	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah (%) aparatur yang mengikuti diklat	100%	100%	100%	100.00%	100%		
6	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.00%	100%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
7	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100.00%	100%		
8	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dok	100.00%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 Dok	100.00%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Dok	100.00%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 Dok	100.00%	4 dok.		
9	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 Dok	100.00%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-	0.00%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 RENJA 2016	100.00%	1 Renja 2016		
10	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	14 SK Walikota	14 SK Walikota	-		14 SK Walikota		
112	Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga								
11	Program : Peningkatan pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi peserta KB aktif	77.00%	76.80%	74.29%	97%	76.80%		
12	Program : Revitalisasi posyandu dan posbindu	Jumlah posyandu Mandiri	45%	40%	42.00%	105%	40%		
		Jumlah posbindu Mandiri	50%	45%	45.00%	100%	45%		
13	Program : Peningkatan ketahanan keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1	11.30%	12.20%	16.66%	137%	12.20%		
121	Urusan : Ketahanan Pangan								
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga								
14	Program : Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Terkoordinasikannya peningkatan ketahanan pangan	80%	80%	100%	125%	80%		
		Konsumsi beras							
		konsumsi protein							
		Tersalurkannya raskin	100%	100%	1	100%	100%		
121	Urusan : Ketahanan Pangan								
2.01.1	Dinas Pertanian dan Perikanan								
1		Tersusunnya Neraca Bahan Makanan Kota Depok	1 dokumen NBM	1 dokumen NBM			1 dokumen NBM		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPDP tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
	Program Peningkatan Produksi dan	Produksi padi (Ton)	5250	5250	1598		5250		
		Produksi palawija (Ton)	3286.196	3307.44	1442		3307.44		
		Produksi hortikultura / sayuran (Ton)	8373.5834	8250.238263	6484		8250.23826		
		Produksi ikan konsumsi	2.260 Ton	2.153 Ton	1605,83		2.153 Ton		
		Produksi daging (Kg)	16014016	15251443	11814660		15251443		
		Produksi susu (Ltr)	3262926.12	3107548.69	1552800		3107548.69		
		Produksi telur (butir)	55850886	57404790	44360475		57404790		
		Populasi ternak kecil (ekor)	6994	6664	6670		6664		
		Konsumsi beras dan bhn pangan lainnya							
		Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	23,3	23	24		23		
	Konsumsi susu (liter/kap/thn)	1.66	1.66	1.66		1.66			
2	Temuan pangan berbahaya asal hewan								
	Program Peningkatan Kewaspadaan	- Cemaran mikroba	0.15	20%	0.41		20%		
		- Pengawet	0.05	5%	0		5%		
		- Formalin	0.05	10%	0.04		10%		
		- Residu	0.15	0.2	0%		20%		
122	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga								
1	Program : Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Jumlah LPM aktif	0.85	0.85	1	118%	0.85		
		Jumlah PKK aktif			1	100%			
2	Program : Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Keswadayaan masyarakat	85%	85%	1	1.1764706	85%		
	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	1	100%			
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	100%	0.9	1	111%			
4	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	85%	85%	1	118%			
5	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	85%	85%	1	118%			
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dok	100%			
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 Dok	100%			
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Dok	100%			
6	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 Dok	100%			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
		Tersusunnya data sektor/urusan	2 dok.	2 dok.	1 Dok	100%			
		Tersusunnya Renstra OPD	1 dok.	-					
7	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 RENJA 2016	100%			
113	Urusan : Sosial								
	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial								
		Jumlah PMKS dan PSKS tertangani	0.45	0.45	8888/49.437= 17.97 %	0.3993333	0.45		
	Program : Peningkatan Perlindungan	Jumlah yang terlayani santunan ke	1	1	100% (3.145 dari 3.145 ta	100%	100%		
	1 Kegiatan unggulan : Santunan Kem	Penanganan Tanggap darurat bencana	100%	100%	100% (25 Kejadian dari 25 Kejadian)	1	100%		
	2 Program : Peningkatan Rehabilitas	Jumlah sarana sosial (panti asuhan, jompo, rehabilitasi, dll)	35 Panti dan 1 RPSA	35 Panti dan 1 RPSA	35 Panti dan 1 RPSA	100%	35 Panti dan 1 RPSA		
		Turunnya jumlah PMKS	0.0064	0.0065	1.10%	1.6923077	0.0065		
3	Program : Pemberdayaan sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial/pemberdayaan	0.9	0.8	100% (8888 dari 8888 Pe	1.25	0.8		
4	Program : Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Optimalnya peran Satlak Penanggulangan Bencana	90%	80%	100%	1.25	80%		
114	Urusan : Ketenagakerjaan								
	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial								
1	Program : Perlindungan ketenagakerjaan dan dunia usaha	Ditetapkannya UMK Kota Depok	1 Rekomenda	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		1 1 Rekomendasi		
		Jumlah rekomendasi LKS Tripartit	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1.5	2 Rekomendasi		
		Terbentuknya Sarana HI dan Syaker didlm Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	1	30 Perusahaan		
		Jumlah kasus yang ditangani	60 kasus	60 kasus	39 Kasus	0.65	60 kasus		
		Meningkatnya jumlah peserta jam Terdatanya perusahaan secara komputerisasi	500	500	58661	11732%	500		
		Jumlah perusahaan yang diperiksa	575 perusahaan	425 perusahaan	480 Perusahaan dari 742 Perusahan yang diperiksa	113%	425 perusahaan		
		Besaran pengujian sarana prasarana K3 di perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan (666 Peral	1	60 perusahaan		
		Jumlah fasilitasi perluasan kerja	3	3	2x Job Fair, (2942 org yang ditempatkan)	0.6666667	3		
2	Program : Peningkatan Penempata	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	21524 orang	3844 orang	2.942 Orang	0.7653486	3844 orang		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat	40 orang	40 orang	186 orang	4.65	40 orang		
		Persentase tenaga terlatih yang te	140 Orang , (140 Orang , (50 Orang	140 Orang , (50 Orang	163 orang Pelatihan Berb	1.1642857	140 Orang , (50 Orang Kompetensi)		
	3 Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif	0.8	70%	-	0%	70%		
4	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	11 orang	10 orang	-	0	10 orang		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
5	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1	100%		
6	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	80%	0.8	100%		
7	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dokumen	1	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Lap RFK/SIEP, 1 Lakip, 4 Lap.Pengendalian Prog/Keg.	100%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	1	4 dok.		
8	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sector/urusan	1 dok.	1 dok.	-		1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 dok	100%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2015	1	1 Renja 2016		
9	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	1 Perwa/Perda		1 dokumen Perda	1			
10	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO			-				
115	urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
	Dinas Koperasi , UMKM dan Pasar								
	Program : Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
1	Kegiatan unggulan : Fasilitasi pemberdayaan usaha mikro	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi	1000 UMKM	0 UMKM					
		5000 UMKM					1000 UMKM		
2	Program : Pengembangan kewirausahaan	Jumlah usaha kecil dan mikro yang terlayani	1000 UKM	593 UMKM		0	1000 UKM		
	Kegiatan Unggulan :Pemberdayaar	Jumlah Pemuda Yang Terbina	3810	810 orang	0 org	0.00%	810 orang		
3	Program : Penguatan Kelembagaan	Jumlah koperasi yang terlayani	553 unit	509 unit	451 unit	0.8860511	509 unit		
4	Peningkatan akses dan fasilitasi pe	Jumlah koperasi yang difasilitasi	250 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%	50 koperasi		
5	program peningkatan pengelolaan	IKM Pasar	82.5	81.50		72.83	0.8936196	81.50	
6	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih (orang)	5525	1025		600	0.5853659	1025	
7	Program : Penanggulangan kemisk	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	150	30		30	100%	30	
8	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional (orang)	50	10	-	0	10		
9	Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%		1	1	100%	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
10	Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%		1	1	100%	
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 laporan	2 laporan	2 laporan			100%	2 laporan
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1	100%	1 laporan
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		1	100%	12 laporan
11	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		1	100%	4 laporan
		Tersusunnya data sector/urusan			-				
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Draft Renstra 2011-201		100%	100%	-
12	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016		100%	100%	1 Renja 2016
13	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi							
14	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO							
117	Urusan : Kebudayaan								
	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya								
	1 Program : Pengembangan seni dan	Jumlah penyelenggaraan festival s	1 kali	1 kali	1 kali		100%	100%	1 kali
		Benda, situs, kawasan cagar buday	1	0,8	0,4		0,5	0,5	0,8
		Jumlah sarana penyelenggaraan se	5 buah	5 buah	5 buah		100%	100%	5 buah
118	Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga								
	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya								
	1	Jumlah gelanggang/balai remaja/p	5 buah	5 buah	4 buah		0,8	0,8	5 buah
	Program : Pengembangan kepelop	Jumlah wirasahawan muda	0.2	0.18	18%		1	0,18	0.18
2	Program : Peningkatan pembinaan olahraga	Jumlah lapangan olahraga	9 buah	9 buah	9 buah		100%	100%	9 buah
		Terbangunnya sport center	1 Gedung	1 Gedung	-				1 Gedung
		Terfasilitasinya event olahraga	8 events	7 events	8 event		114%	114%	7 events
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	1	1	1		1	100%	1
4	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%	100%	100%
5	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 laporan	2 laporan	2 laporan		100%	100%	2 laporan
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan		100%	100%	1 laporan
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		100%	100%	12 laporan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
6	Program : Peningkatan sistem pelayanan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan		
		Tersusunnya data sector/urusan	3 data	3 data	3 data	100%	3 data		
7	Program : Peningkatan kualitas data	Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
8	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
9	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO							
119	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Prog : Peningkatan peran agama dalam pembangunan partisipatif	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap ormas keagamaan	34 kegiatan	6 kegiatan	7 keg	117%	6 kegiatan		
2	Program : Peningkatan kesadaran	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	28	6	6	100%	6		
		Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	22	4	4	1	4		
3	Peningkatan ketentraman dan ketertarikan	Jumlah kegiatan pembinaan/fasilitasi ormas	18	3	3	1	3		
4	Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	60%	55%	55%	100%	80%		
5	Program: Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	60%	50%	30%	60%	55%		
6	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	1	1	100%	1	1		
7	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	1	1	100%	1	1		
8	Program : Peningkatan sistem pelayanan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok	1	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok	100%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok		1 4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok		1 1 dok.		
9	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Renstra	100%	-		
10	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	1 Perda. 1 Per	1 Perda. 1 Perwa	1 Perda 1Perwa	100%			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPDP tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
120	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						Target		
1.20.1	Sekretariat Daerah								
1	Program : Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah urusan yang sudah menerapkan SPM	3 SPM	3 SPM	15 SPM	5	3 SPM		
		Meningkatnya kualitas kelembagaan pemkot (revisi SOTK)	5 OPD	5 OPD	5 OPD	1	5 OPD		
2	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD	15 Raperda	14 Raperda	11 raperda	79%	14 Raperda		
		Jumlah regulasi lain yg dihasilkan	2700 Produk	450 Produk Hukum	664 produk hukum	1.4755556	450 Produk Hukum		
3	Program : Penanganan permasalahan hukum	Berkurangnya masalah hukum	70 % (30 perkara)	70 % (5 perkara)	14 perkara	0.9333333	70 % (5 perkara)		
		Cakupan layanan LPSE	1	1	100% (671 paket)	1	1		
4	Program : Peningkatan akuntabilitas	Sertifikasi ahli pengadaan barang	900 orang	100 orang	150 orang	1.5	100 orang		
		Terbentuknya Unit Layanan Penga	1	1	1 unit	1	1		
5	Program : Peningkatan pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	1	10 Kegiatan		
		Meningkatnya peran DKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1	1 Kegiatan		
		Jumlah kerjasama dengan daerah lain	10 MOU	10 MOU	3 MoU	0.3	10 MOU		
		Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi	3 MoU	3 MoU	8 MoU	2.6666667	3 MoU		
		Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha	1 Mou	1 Mou	6 MoU	6	1 Mou		
6	Program : Peningkatan kerjasama	Jumlah kerjasama dengan para pi	1 Mou	1 Mou	5 MoU	5	1 Mou		
		Tingkat kinerja kecamatan	85%	0.85	0.85	1	0.85		
7	Program : Peningkatan peran dan	Tingkat kinerja kelurahan	74 Paket Bukti	-	Dilaksanakan oleh BPMK	-			
		Frekuensi kegiatan (kunker,kordin	85%	85%	0.85	1	85%		
8	Program : Peningkatan Pelayanan	Akomodasi (rumah dinas, jamkes,	100%	1	1	1	100%		
		Jumlah kebijakan ekonomi	24 dok. Kebijakan	4 dok. Kebijakan	7 dok. Kebijakan	175%	4 dok. Kebijakan		
9	Program: Peningkatan kebijakan da	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi	12 dok rekom	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	1	2 dok rekomendasi		
		Tersusunnya LAKIP Kota	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1	1 dok.		
		Tersusunnya LPPD dan ILPPD	2 dok.	2 dok.	2 dok.	1	2 dok.		
10	Program : Peningkatan pengendali	Tersusunnya LKPJ 1 tahun	1 dok.	1 dok.	-		1 dok.		
		Tersedianya standar harga belanja daerah	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPDP tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
	11 Program : Peningkatan kualitas per daerah	Tersedianya standar analisa belanja daerah	1 dok	1 dok	1 dok		1	1 dok	
	12 Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	-		1	100%	
13	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	90%	80%	80%		1	80%	
14	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%		1	100%	
15	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%		1	100%	
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	1	2 dok.	
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.		1	1 dok.	
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.		1	12 dok.	
	16 Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.		1	4 dok.	
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.		1	1 dok.	
	17 Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		1	-	
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016		1	1 Renja 2016	
	18 Pengembangan Keterbukaan Informasi	Efektivitas Sarana Informasi Publik							
109	Urusan Pertanahan								
1.20.1	Sekretariat Daerah								
		Luas lahan bersertifikat	13.052,69 ha(74%)	17.5 ha	Proses di BPN			17.5 ha	
		Jumlah kasus tanah Negara yang diselesaikan	1	1		1	1	1	
1	Program : Peningkatan pelayanan pertanahan	Jumlah ijin lokasi (ijin lokasi/tahun)	20	20		20	20		
	120 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1.20.2	Sekretariat DPRD								
	1 Program : Peningkatan peran dan fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui/jumlah Raperda yang diusulkan	100%	100%	77.78 % (9 Raperda)	78%	1	100%	
		Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	100%	100%		1	1	100%	
		Jumlah Perda Inisiatif	3	3	0		0	3	
		Frekuensi Pengawasan	5	5		5	1	5	
2	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	-		0%	100%	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	70%	65%	100 % (52 Org/52 Orang)	154%	65%		
4	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	1	1	1	1	1		
5	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dokumen	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dokumen	1	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dokumen	1	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dokumen	1	4 dok.		
7	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	0	0%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	0	0	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
1.20.3	Inspektorat Daerah								
1	Program : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	92,47% (jumlah temuan B	92%	100%		
		Jumlah Temuan Inspektorat yang Ditindaklanjuti	95%	90%	97% (jumlah temuan Insp 1.0777778	90%			
2	Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	-	0%	100%		
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	85%	80%	83% (Jumlah peserta 30 org)	104%	80%		
4	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	100%	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	1	4 dok.		
7	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Renstra 2016-2021	100%	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
8	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusun/tervisinya SOP/ISO	-	-	-		-		
9	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	-	-	-		-		

1.20.4 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu (Ditetapkan	1	Tepat Waktu		
		Belanja langsung/total APBD	55.69%	52.08%	0.663	1.2730415	52.08%		
		Belanja untuk pendidikan dan kesehatan/Total APBD	49.96%	51.10%	0.3662	0.7166341	51.10%		
		Rasio SILPA thdp total pendapatan	2.48%	4.17%	42,93 % (angka sementara	10.294964	4.17%		
1	Program : Peningkatan kualitas pe	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	92.79%	0.9146	67,98 % (angka sementara	74.33%	0.9146		
		Meningkatnya penerimaan pajak daerah	0.15	0.15	26,62 % (Angka Sementara	177.47%	0.15		
		Realisasi Peningkatan PAD	15.00%	15.00%	18,24 % (Angka Sementara	1.216	15.00%		
2	Program : Peningkatan penerimaa	Jml PAD/total pendapatan	27.95%	27.28%	32,16 % (Angka Sementara	117.89%	27.28%		
3	Program : Peningkatan penerimaan daerah selain PAD	Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain2 pendapatan yang sah	11,25%	11,15%	6,15% (Angka Sementara)	55.16%	11,15%		
		Meningkatnya tatakelola aset	100%	0.8569	0.7023	0.8195822	0.8569		
4	Program : Pengamanan dan pendayagunaan aset daerah	Jumlah kerjasama pemanfaatan aset	30	30	40	1.3333333	30		
5	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	100%	1	100%		
6	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	660	95%	125%	1.3157895	95%		
7	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1	100%		
8	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok		
9	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok	4 dok	4 dok	1	4 dok		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 data	1 data	3 data	300%	Target		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		1 data		
10	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016		1	1 Renja 2016	
11	Program : Standarisasi pelayanan publik	Tersusunnya SOP/ISO	5	4	0			4	
12	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	1 Perwa	1 Perwa	4 Perwal	400%		1 Perwa	
1.20.5	Satuan Polisi Pamong Praja								
		Jumlah penertiban	73%	63%	0.73	1.1587302		63%	
	1 Program : Peningkatan ketentraman	Rasio personil Satpol PP thd jumlah penduduk	1,5 (269 orang)	1,4 (244 orang)	0,47 (102 orang)	0.3357143		1,4 (244 orang)	
		Cakupan petugas Linmas	0.8	80%	756				
	Program : Gerakan Sadar Hukum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda	13	11	18	1.6363636		11	
2		Jumlah Kegiatan Tipiring	12	9	27	3		9	
3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	100%	0.8	0.83	1.0375		0.8	
4	Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%		1	100%	
5	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%		1	100%	
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok	2 dok	2 dok	100%		2 dok	
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100%		12 dok	
6	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok	4 dok	4 dok		1	4 dok	
		Tersusunnya data sector/urusan	1 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	
7	Program : Peningkatan kualitas data	Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 201 -	-	-			-	
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016		1	1 Renja 2016	
8	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	tersusun/revisi regulasi			1dok		100		
		Jumlah kegiatan pembinaan/fasilitasi ormas			-				
9	Peningkatan ketentraman dan ketertahanan	Cakupan petugas Linmas							
10	Penanganan Bencana Alam dan Sosial								
1.20.6	Dinas Pemadam Kebakaran								
1	Program : Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Respon waktu melayani (menit)	20 menit	20 menit	15,01 Menit	0.7505		20 menit	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
2	Program: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	Jumlah satlakar terbina		-	63 Satlakar & 6 Satlakar Pasar	100%	-		
3	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif		100%	100%	100	100%		
4	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	1	100%	100%		
7	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dokumen	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 Dokumen	1	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Dokumen	1	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 Dokumen	1	4 dok.		
8	Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 Dokumen	1	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	1 Renja 2016	100	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	-	1 Renja 2016			
9	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	1 Perda (revisi)	-		-			
1.20.7	Badan Kepegawaian Daerah								
1	Program : Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah	Ratio PNS terhadap jumlah penduduk	1 : 333,16	1 : 296,06	1 : 266.58		1 : 296,06		
		Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	99%	99%	92.29%(790 posisi)	0.9322222	99%		
		Tersedianya jabatan fungsional	25	24	29 jenis	120.83%	24		
2	Program : Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	1	100%	100%		
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan	100%	100%	0.846835443	0.8468	100%		
		Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	100%	100%	1	1	100%		
		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional	100%	100%	105.77% (330 org)	1.0577	100%		
4	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	1	1	100%	1	1		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPDP tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
		Meningkatnya kelembagaan penanaman modal	100%	90%		1 1.1111111	Target		
	1 Program : Peningkatan kualitas pe	Meningkatnya IKM perizinan	86%	85.5	0.8028	0.9389474	85.5		
		Tersedianya profil investasi			2 Dok	100%	1 dok		
	Program : Peningkatan investasi da	Jumlah kegiatan promosi potensi			4 Kali	1	1 kali		
	120 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintaha	n Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
	1.20.9 Kecamatan Beji								
	1 Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	10 kelompok	6 kelompok	2 Kelompok (150org)	33%	6 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningka	Meningkatnya kegiatan K3	100% (19 lokasi)	100% (19 lokasi)	100% (4 lokasi)	100%	100% (19 lokasi)		
	3 Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif	100%	100%	0%	-	100%		
	4 Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
	5 Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dok	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	100%	12 dok.		
	6 Program : Peningkatan sistem pela	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	100%	4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 201 -				-		
	7 Program : Peningkatan kualitas da	Tersusunnya Renja	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2015	100%	1 Renja 2016		
	8 Peningkatan Kualitas kehidupan pe	Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada	100%	100%	1 kali	100.00	100%		
	9 Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			-				
	10 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan	KS1		4 Jenis Lomba	100%			
	Peningkatan Pelayanan Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan			3 Keg	100%			
	11 Keagamaan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan							
	1.20.10 Kecamatan Pancoranmas								
	1 Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	7 kelompok	7 kelompok	7 Kelompok Tani Belimbir	100%	7 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningka	Meningkatnya kegiatan K3							
	3 Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif			-				
	4 Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.00%	100%		
	5 Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%		1	100%	
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.		1	2 dok.	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
	1 Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	3 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100%	5 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningkatan	Meningkatnya kegiatan K3	90%	80%	100% (12 kali k3, 1 kali so	125%	80%		
3	Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif							
4	Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.		1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.		12 dok.		
	6 Program : Peningkatan sistem pel	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	100%	4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
	7 Program : Peningkatan kualitas da	Tersusunnya Renja	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
	8 Peningkatan Kualitas kehidupan pe	Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%		
	9 Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			-				
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1			5 Lomba, 4 Kegiatan, 2 sosialisasi	100%			
	Peningkatan Pelayanan Sosial				3 kegiatan (100%)	100%			
11	Keagamaan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan							
1.20.13	Kecamatan Cilandong								
1	Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	6 kelompok	6 kelompok	11 kelompok (6 kelompok lidah buaya, 5 kelompok ikan lele)	183%	6 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningk	Meningkatnya kegiatan K3	100%	0.85	4 lokasi		0.85		
3	Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif	100%	90%	-		90%		
	4 Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	100%	12 dok.		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
	6 Program : Peningkatan sistem pelaks	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.		1 4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
	7 Program : Peningkatan kualitas da	Tersusunnya Renja	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
8	Peningkatan Kualitas kehidupan pe	Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%		
	9 Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			0 unit				
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1			7 jenis lomba	1			
	11 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan			30 orang peserta MTQ	1			
1.20.14	Kecamatan Cimanggis								
	1 Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	6 kelompok	6 kelompok	6 Kelompok	1	6 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningka	Meningkatnya kegiatan K3	100% (19 lokasi)	90%	1 Kecamatan, 4 Kelurahan		90%		
3	Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif	100%	90%	-		90%		
	4 Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1	100%		
5	Program : Peningkatan sarana dan	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	1	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 Dok	1	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 Dok	1	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 Dok	1	12 dok.		
	6 Program : Peningkatan sistem pelaks	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 Dok		1 4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
	7 Program : Peningkatan kualitas da	Tersusunnya Renja	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
8	Peningkatan Kualitas kehidupan pe	Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada	100%	100%	100% (1 Kegiatan)	100.00	100%		
	9 Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			-				
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1			4 Lomba	1			
	11 Peningkatan Pelayanan Sosial Keag	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan			2 kegiatan (45 org peserta Kec dan Kel)	1			
1.20.15	Kecamatan Tapos								
	1 Program : Pengembangan potensi	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM	12 kelompok	12 kelompok	4 Kelompok	33%	12 kelompok		
	2 Program : Konservasi dan peningka	Meningkatnya kegiatan K3	100%	0.7931	100% (1 kecamtan dan 4	127%	0.7931		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
9	Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			-				
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1			11 Lomba	100%			
11	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan			100% (40 org peserta MTQ)	100%			
1.20.19 Kecamatan Limo									
1	Program : Pengembangan potensi UKM Aloe Vera	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan	12 Kelompok	10 kelompok	4 Kelompok (60 peserta)	40%	10 kelompok		
2	Program : Konservasi dan peningkatan	Meningkatnya kegiatan K3 di 4 titik	100%	90%	0.9	100%	90%		
3	Program : Pengembangan sistem p	Tersedianya SIM yang efektif	100%	90%	0%	0	90%		
4	Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.		1 1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bula	12 dok.	12 dok.	12 dok.		1 12 dok.		
6	Program : Peningkatan sistem pela	Tersusunnya laporan pengendaliar	4 dok.	4 dok.	4 dok.		1 4 dok.		
		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 201 -		-		-		
7	Program : Peningkatan kualitas dat	Tersusunnya Renja	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016		1 1 Renja 2016		
8	Peningkatan Kualitas kehidupan pd	Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada		100%	100%	100%	100%		
9	Pengembangan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni			-				
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1			5 jenis lomba				
11	Peningkatan Pelayanan Sosial Keag	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan			8 Kali pembinaan, 1 kali kompetisi				
1.20.20 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI									
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%		100%	100%	100%		
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%		100%	100%	100%		
3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	90%		100% (150 orang)	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok		2 dok	100%	2 dok		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok		1 dok	100%	1 dok		
		Tersusunnya laporan RFK per bula	12 dok		12 dok	100%	1 dok		
4	Program : Peningkatan sistem pela	Tersusunnya laporan pengendaliar	4 dok		4 dok	100%	1 dok		
		Tersusunnya data sector/urusan	1 dok		1 dok	100%	1 dok, 100 buku		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 renstra 2011-2016		-		-		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
	5 Program : Peningkatan kualitas dan Tersusunnya Renja OPD		1 dok		1 Renja 2015	100%	-		
	6 Program : Penanganan permasalahan Berkurangnya masalah hukum		9 kasus		1 kegiatan 90 peserta (keg. Sosialisasi permasalahan hukum)	100%	2 kasus		
	7 Program : Peningkatan pembinaan olahraga	Terfasilitasinya event olahraga	3 event, 100 atlet		2 event 150 atlit	100%	2 event, 10 cabor		
	8 Program : Peningkatan pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan sosial	10 keg		150 orang	100%	150 org		
121	Urusan : Ketahanan Pangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan								
		Terkoordinasikannya peningkatan ketahanan pangan	0.8	80%	1	1.25	80%		
		Konsumsi beras							
		konsumsi protein							
	1 Program : Peningkatan kewaspadaan Tersalurkannya raskin			1	1	1	1		
122	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga								
		Jumlah LPM aktif	0.85	0.85	1	1	0.85		
	1 Program : Peningkatan kapasitas keJumlah PKK aktif				1	1			
	Program : Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Keswadayaan masyarakat	0.85	85%	1	1	85%		
124	Urusan : Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan								
		Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	100%	100%	92%	92%	100%		
		Jumlah SDM pengelola kearsipan y	300 orang	50 orang	1 Dok		50 orang		
		Terbangunnya Depo Arsip	1	1	-		1		
	1 Program : Peningkatan pengelolaJumlah Koleksi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1	-		1 dokumen		
	2 Program : Pengembangan sistem pTersedianya SIM yang efektif	1	0.75	-			0.75		
3	Program : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	100%	100%	-		100%		
	4 Program : Pelayanan administrasiTersedianya pendukung administ	1	1	1	100%		1		
	5 Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.		1 2 dok.		
	Program : Peningkatan sistem pelaTersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.			1 1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bula	12 dok.	12 dok.	12 dok.		1 12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendaliar	4 dok.	4 dok.	4 dok.		1 4 dok.		
6		Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.		1 1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 201 -		-		-		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
7	Program : Peningkatan kualitas dan Tersusunnya Renja OPD		1 Renja 2017	1 Renja 2016		1 Renja 2016	1	1 Renja 2016	
	Program : Penataan dan pengembangan produk hukum	Tersusun/revisinya regulasi	-	-		-	-		
125	Urusan : Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi								
	Program : Pengembangan layanan infrastruktur teknologi informasi	Cakupan layanan informasi	50%	40%	40% (20 Titik Hotspot, 1	100%	40%		
2	Program : Peningkatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi	Optimal dan terintegrasinya aplikasi TIK antar unit pelayanan	100%	75%	75,00% (1 Paket Event TIK	100%	75%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPd tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
3	Program : Pengembangan keterbukaan informasi publik	Efektivitas Sarana Informasi Publik	100%	88%	88,00% (Warta Depok 30	100%	88%		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
4	Program : Peningkatan kualitas su	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll	1	1	100% (128 Jenis dan 377	100.00	1		
5	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	100% (7 Unit Kendaraan d	100.00%	100%		
6	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	100%	100%	100% (100 Orang)	1	100%		
7	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan per semester	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100.00%	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	1	12 dok.		
		Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	1	4 dok.		
8	Program : Peningkatan kualitas dat	Tersusunnya data sektor/urusan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100.00%	1 dok.		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-	-	-		
		Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
9	Program : Penataan dan pengemb	Terselenggaranya Workshop dan Sosialisasi SOP	-	-	1 Perda (Penyelenggaraa	1	-		
126	Urusan : Perpustakaan								
	Kantor Arsip dan Perpustakaan								
1	Program : Pengembangan perpustakaan daerah	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	12000 eks	11000 eks	22.304 Eks	2.0276364	11000 eks		
		Jumlah pengunjung perpustakaan	12000 orang	6000 orang	25.961 Org	433%	6000 orang		
		Cakupan layanan perpustakaan keliling	204 lokasi	144 lokasi	224 Titik	1.5555556	144 lokasi		
		Terbangunnya Gedung Perpustakaan Daerah	100%	100%			100%		
		Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang terlatih	300 orang	50 orang	50 Org	1	50 orang		
2	Program : Peningkatan minat baca masyarakat	Jumlah perpustakaan/taman bacaan masyarakat	22 Kelurahan	22 Kelurahan	32 TBM	1.4545455	22 Kelurahan		
2 URUSAN PILIHAN									
201	Urusan : Pertanian								
2.01.1 Dinas Pertanian dan Perikanan									
1	Program Peningkatan Agribisnis Ur	Produksi tanaman hias (tangkai)	1654688.57	1622243.7	246825	0.1521504	1622243.7		
		Produksi belimbing (Ku)	55204	54122	24933	0.4606814	54122		
		Produksi Jambu biji merah (Ku)	20000	20000	5038	0.2519	20000		
2	Program : Pengembangan Rumah f	Kapasitas layanan (ekor)	36500	29500	30100	102.03%	29500		
		Jumlah kelompok tani aktif	116	109	132	1.2110092	109		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RPKD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
1	Program : Pengembangan dan Penataan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Pasar yang tertata	6	1	3	300%	1		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
1		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	1000	1000	900 pelaku usaha	0.9	1000		
	Program : Pengembangan dan Penataan	Tersedianya outlet produk unggulan	1 outlet	1 outlet	-		1 outlet		
		Frekuensi monitoring	48 kali	48 kali	48 kali	100%	48 kali		
2	Program: Pengawasan distribusi dan	Jumlah kegiatan/ cakupan pasar m	12	12	35 kali	2.9166667	12		
		Jumlah Temuan Penyimpangan	60	70	5 temuan minuman berakohol	0.0714286	70		
3	Program : Peningkatan perlindungan	Jumlah pelaku usaha yang dibina	320	300	90 (pembinaan pelaku us	0.3	300		
4		Nilai Ekspor bersih perdagangan (L	74281568,8	70076951.7	USD74.101.860,19 dan JPY 285.176.9	70076951.7			
	Program : Pengembangan perdag	Jumlah promosi produk dalam neg	10 kali	2 kali	8 kali	4	2 kali		
5	Program : Peningkatan Kemetrol	Terbentuknya UPTD Metrologi	1 UPTD dan	1 lab	Perda; SDM Penera; Gedu	10%			
		Jumlah Layanan Kemetrolgian Legal	120 kali	120 kali			120 kali		
6		Tersedianya SIM yang efektif	2 informasi	2 informasi	2 informasi		1 2 informasi		
	Program : Pengembangan sistem p	Terbangunnya e-commerce	Monev dan u	Monev dan update d	Monev dan update data		Monev dan update data		
7	Program : Peningkatan kualitas su	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/ fungsional			-				
8	Program : Pelayanan administrasi	Tersedianya pendukung administ	1	1	1	1	100%		
9	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarpras aparatur	16 Jenis	16 Jenis	1	1	16 Jenis		
		Tersusunnya Laporan keuangan pe	2 dok.	2 dok.	2 dok.	1	2 dok.		
		Tersusunnya LAKIP OPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1	1 dok.		
		Tersusunnya laporan RFK per bulan	12 dok.	12 dok.	12 dok.	1	12 dok.		
10	Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan	4 dok.	4 dok.	4 dok.	1	4 dok.		
		Tersusunnya data sector/urusan	2 urusan	2 urusan	2 urusan	1	2 urusan		
		Tersusunnya Renstra OPD	1 Renstra 2016-2021	-	-		-		
11	Program : Peningkatan kualitas dat	Tersusunnya Renja OPD	1 Renja 2017	1 Renja 2016	1 Renja 2016	1	1 Renja 2016		
12	Program : Penataan dan pengemb	Tersusun/revisinya regulasi	1 SOP TDP	1 SOP TDG	1 Raperda	100%	1 SOP TDG		
207	Urusan Industri								
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
1	Program : Peningkatan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Jumlah industri rumah tangga yar	145		25 300 industri rumah tangg	12	25		
		Jumlah industri kecil yang dilatih	350		50 300 industri kecil	6	50		
	Program : Pengembangan industri	Jumlah industri menengah yang d	255		25 20 industri menengah	80%	25		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja RPJMD Akhir Periode (Target 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			program / kegiatan RKPD tahun	target RPJMD sampai dengan	
				Target	Realisasi	% Capaian		Perkiraan Realisasi	% Capaian
							Target		
2		Jumlah Festival industri kreatif	2 kali	2 kali	1 kali	0.5	2 kali		
		Jumlah komunitas	50	4	4 komunitas	1	4		
3	Program : Penataan industri berba	Jumlah cluster industri lokal	1 cluster	1 cluster	-		1 cluster		
4	Program: Penanggulangan Kemisk	Jumlah pengrajin rumah tangga at	120 Orang	20 Orang	40 orang	2	20 Orang		
208	Urusan : Ketransmigrasian								
	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial								
11	Program : Peningkatan Penempata	Jumlah pencari kerja yang ditempa	21524 orang	3844 orang	3 KK		3844 orang		

2.4. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara Kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat Pperencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara Optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kota Depok Tahun 2017 diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai Sektor dari hasil evaluasi tahun 2015 baik yang terjadi pada skala lokal kota, Regional maupun global melalui pendekatan Prioritas Pembangunan, adapun hasil isu strategis setiap bidang Pembangunan Tahun 2017 dibagi menjadi tiga sektor pembangunan, yaitu :

A. Bidang Ekonomi

1. Integrasi Sistem transportasi di kota Depok dan Jabodetabek.

Perkembangan dan Dinamika Kota serta penambahan penduduk, akan berdampak langsung terhadap kemacetan. Sistem Transportasi yang ada saat ini diperkirakan akan sulit menangani kemacetan yang akan terus meningkat. Oleh karena itu perlu disancang manajemen Transportasi terintegrasi, berbasis pada **Demand Side**, dengan memperhatikan mode Transportasi, arah pergerakan manusia, dan Pusat-pusat Aktivitas (Pusat perkantoran dan Bisnis).

Pergerakan orang dan barang di Kota Depok dilayani dengan Sistem Transportasi umum yang terdiri dari Angkutan Kota (Angkot), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKADP), Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), dan Kereta Rel Listrik (KRL).

Kota Depok hanya memiliki satu terminal yaitu Terminal Terpadu Kota Depok yang merupakan terminal tipe C yang terletak di Pusat Kota yaitu di jalan Margonda, tetapi secara fungsi, terminal ini difungsikan sebagai terminal tipe A karena melayani juga jenis Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKADP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Terminal ini berhubungan langsung dengan Stasiun KRL Depok Baru sehingga memudahkan untuk pergerakan orang dan barang yang akan berganti moda dari angkutan jalan Raya (Angkot, AKDP & AKAP) ke angkutan KRL.

Selain Terminal Terpadu dalam Kota, Kota Depok juga ditunjang oleh beberapa Pangkalan / Sub Terminal. Keberadaan pangkalan / sub terminal ini ditetapkan berdasarkan rute trayek angkutan kota dan sebagian lagi timbul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan penumpang. Pangkalan angkutan kota di Kota Depok terletak di Pasar Cisalak, Pasar Palsigunung, Simpangan (Simpang Jl. Tole Iskandar dengan Jl. Raya Bogor), Jl. Raya Bogor, Simpang Meruyung, Kukusan, Jl. Raya Parung dan Jl. Sawangan.

Perkembangan Kota Depok menuntut adanya keseimbangan pertumbuhan dan konektivitas jaringan antar Wilayah. Memperhatikan pola jaringan jalan yang ada akan mengarahkan kegiatan peningkatan konektivitas pola jaringan jalan yang berorientasi pada Akomodasi Pergerakan Timur-Barat. Untuk mengurangi penumpukan pergerakan di pusat kota (konflik arah pergerakan Utara-Selatan dan Timur Barat), maka perlu pula dibangun pola jalan melingkar pada sisi Luar dan sisi dalam Kota.

Dengan demikian akan terjadi Pola pergerakan yang lebih baik. Disamping itu Pembangunan Pola melingkar akan melingkupi kawasan kawasan yang belum terakomodasi oleh jaringan jalan Utara-Selatan dan Timur-Barat.

Jaringan jalan yang mendukung Sistem Transportasi Kota Depok terdiri dari Jalan Margonda Raya sebagai jalan utama di Pusat Kota yang didukung Jaringan – jaringan Jalan Kota, Propinsi dan Nasional yang membentuk suatu sistem jaringan pendukung sistem transportasi kota Depok. Jalan Margonda Raya, ke arah Bogor terhubung dengan Jalan Raya Citayam sedangkan untuk ke arah Jakarta terhubung dengan Jalan Lenteng Agung Barat/Timur dan Jalan Akses UI. Jalan Margonda Raya terhubung juga dengan Tol Jagorawi melalui Tol Cijago. Oleh karena nya diperlukan Integrasasi Sistem transportasi dengan daerah sekitarnya yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi perlu di rancang. Begitupun Park and ride perlu dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalan utama serta koridor yang terintegrasi. Menurut RTRW 2012-2032, setidaknya ada 6 jalur transportasi massal yang harus diwujudkan dalam masa mendatang yaitu Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Raya Bogor-Kp. Rambutan, Angkutan Umum Massal Bojongsari-Ciputat-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Cinere-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Depok 2-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Depok-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Margonda Raya-Ragunan.

2. Perkembangan Sektor Ekonomi yang mengarah pada Sektor tersier belum didukung oleh ketersediaan Kualitas Infrastruktur penunjang Sektor tersebut.

Kondisi Ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut Sektor-sektor yang menunjukkan Struktur Perekonomian suatu Wilayah. Peranan kelompok Sektor Primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014), dengan perubahan penurunan sebesar 16,98 %. Sedangkan peranan kelompok Sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014). Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014). Dari data tersebut terlihat bahwa peranan sector tersier sangat mendominasi perekonomian Kota Depok, dimana sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank & lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha Jasa-jasa. Seiring dengan peningkatan PDRB sektor tersier, Persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor tersier yang saat ini sudah sangat besar, akan semakin meningkat di masa mendatang.

Tenaga kerja sektor tersier yang saat ini mencapai 74.12% dari total angkatan Kerja di Kota Depok, pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan pekerja di sektor ini rata-rata akan meningkat sebesar 24.22% pada tahun 2015, menjadi 28.42% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 32.55% di tahun 2025. Peningkatan ini karena terkait dengan Sektor unggulan Kota Depok yang merupakan kota pemukiman di sekitar wilayah DKI Jakarta. Jumlah tenaga kerja yang besar serta pertumbuhan Ekonomi Daerah sekitar menjadi Fokus kota Depok dalam meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur pendukungnya, seperti Jasa Perbankan, Infastruktur Elektronik, Akses jalan dan lainnya.

3. Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah yang ditandai dengan gap IPM antar Kecamatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran Komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan Manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan Pembangunan yang dilakukan di Daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan Indikasi peningkatan atau penurunan Kinerja Pembangunan manusia pada suatu Daerah.

Tabel 2.25. IPM Menurut Kecamatan dengan Metode Baru

Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015*)
Sawangan	75,09	75,75
Bojongsari	74,22	74,70
Pancoran Mas	77,99	78,39
Cipayung	72,23	72,94
Sukmajaya	84,40	84,86
Cilodong	77,46	77,84
Cimanggis	82,06	82,60
Tapos	73,89	74,47
Beji	79,44	80,03
Limo	76,94	77,44
Cinere	82,38	83,25
Kota Depok	78,58	79,11

Sumber : BPS 2015

Jika dilihat dari data tersebut bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2015 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 84,86. Namun masih terdapat 7 kecamatan dengan nilai IPM kurang dari 79. Bahkan kecamatan Cipayung memiliki IPM terendah 72,94. Ketimpangan pembangunan antar Kecamatan secara dilihat dari tiga sektor yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Usaha peningkatan Pembangunan di Kecamatan tersebut tentunya menjadi fokus pemerintah Kota Depok misalnya dengan penambahan Anggaran pada Kecamatan dengan IPM terendah dan juga Pembangunan pada ketiga sektor baik Fisik maupun non fisik yang diikuti oleh pengurangan angka gini Ratio dan peningkatan pendapatan perkapita.

4. Pengangguran masih tinggi.

Dari data BPS bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok Tahun 2014 sebesar 63,34 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Sedangkan Tingkat kesempatan kerja (TKK) Kota Depok tahun 2014 sebesar 91,56 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92 orang merupakan penduduk bekerja, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok Tahun 2014 sebesar 8,44 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 8 sampai 9 orang yang merupakan pengangguran. Pengangguran di Kota Depok Tahun 2014 ternyata sebagian besar tamatan SLTA yaitu sebesar 69,22 persen. Selanjutnya secara berurutan adalah tamatan SMP, perguruan tinggi, SD dan yang terakhir tidak atau belum pernah atau belum tamat SD. Hal ini bisa jadi disebabkan karena Penduduk yang baru lulus/tamat SLTA belum terserap ke pasar kerja atau dalam proses mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Jika mereka yang menunggu diterima di suatu pekerjaan (sebagai buruh/karyawan) tanpa menciptakan lapangan usaha baru, maka mereka termasuk ke dalam pengangguran.

Salah satu Solusi masalah pengangguran adalah dengan mengubah Pola pikir masyarakat bahwa bekerja tidak hanya sebagai Buruh/Karyawan akan tetapi bisa juga sebagai wirausaha.

5. Pelayanan Publik berbasis Profesional Aparatur.

Secara umum kualitas pelayanan Publik Pemerintah Kota Depok dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 dengan didapatkannya nilai agregat IKM sebesar 80,66 yang termasuk pada kategori BAIK. Angka tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014 yaitu 80,18. Pada Tahun 2015 jumlah unit pelayanan yang dinilai dalam IKM sebanyak 21 pelayanan. Dari 21 unit layanan publik yang dikaji, terdapat 14 unit layanan memiliki kinerja sangat baik (kategori A) dan 7 unit layanan memiliki Kinerja baik (kategori B) sesuai dengan kriteria Menpan No.Kep/25/M. PAN/2004. Dari hasil kajian terlihat dari nilai gap antara harapan dan kenyataan berada pada angka 10,37%, hal ini menunjukkan masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Perbaikan pelayanan di Kota Depok didorong oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas pendukungnya yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan secara On-Line dan *real time*.

Permasalahan utama dalam pelayanan Publik adalah menyangkut Kapasitas dan Integritas Aparatur, sehingga dibutuhkan upaya Pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas melalui berbagai diklat dan bimbingan Teknis sehingga terwujud Pelayanan Publik yang berstandar dan memuaskan Publik.

6. Pelayanan Perijinan usaha yang lebih sederhana.

Terintegrasi kegiatan Perijinan dan Pelayanan dalam satu atap memberikan dampak yang baik bagi Pelayanan Masyarakat, dengan terbangunnya dan terintegrasinya Organisasi Perangkat Daerah dalam satu Wilayah sangat membantu masyarakat dalam mengurus perijinan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Pada Tahun 2014 pelayanan masyarakat sudah terpusat pada satu wilayah yaitu gedung Dibaleka I dan Dibaleka II yang memudahkan akses dan peningkatan kecepatan pelayanan, hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat tentang pelayanan satu atap. Berdasarkan hasil kajian Indeks kepuasan masyarakat bahwa Pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPMP2T cenderung bernilai homogen, berkisar antara 80 sd 83. Faktor yang mempengaruhi pelayanan relatif sama, yang membedakan adalah persyaratan dan biaya. Hal inilah yang perlu dilakukan perubahan dalam percepatan perijinan misalnya dengan pelayanan perijinan secara online dan perijinan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat dan percepatan waktu penerbitan ijin.

7. Penegakan regulasi/Perda yang mendukung perkembangan UMKM.

Depok sebagai Kota Niaga dan Jasa yang didominasi oleh para pelaku UMKM memerlukan suatu reformasi dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan dalam adalah melakukan penertiban terhadap para pelaku UMKM yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Penertiban ini guna memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada para pelaku maupun penerima manfaat UMKM. Selain itu pelimpahan kewenangan pemberian ijin atau legalitas UMKM ke level yang lebih rendah

atau Kecamatan harus dapat segera di selesaikan guna percepatan dan peningkatan usaha bagi para UMKM.

8. Masalah alih fungsi lahan pertanian

Isu tentang tataruang adalah terkait dengan regulasi baru di bidang penataan ruang yaitu Perda Penataan Ruang Kota Depok 2012-2032, yang sarat dengan muatan dan amanat baru, antara lain tentang pengaturan RTH salah satunya dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan LP2B dalam upaya mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada termasuk didalamnya adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian tanaman pangan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas

9. Kualitas SDM terkait law enforcement

Pembangunan kualitas sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kemampuan penduduk, modal manusia memegang peran sentral dalam proses pembangunan karena memberikan keuntungan yang tinggi, menghemat penggunaan modal fisik dan modal alam, menghasilkan pembangunan yang lebih cepat, berkesinambungan, serta lebih merata.

Peningkatan kualitas SDM adalah suatu upaya pembangunan kemampuan diri manusia, yang mengandung empat unsur, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia dalam hal ini peningkatan

kapasitas SDM ke arah yang lebih baik. Terbatasnya jumlah SDM bukanlah menjadi halangan dalam penegakan hukum, pemerintah Kota Depok diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada ASN sesuai bidang keahlian.

Tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi modal dalam upaya peningkatan kualitas SDM sehingga penegakan hukum bukanlah menjadi solusi utama. Pencegahan melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi hukum akan mudah diterapkan jika kualitas SDM manusianya sesuai merata di setaip sektor dan lembaga pemerintah.

10. Sarana pemasaran/tempat usaha UMKM yang masih kurang.
Berdasarkan data BPS Kota Depok, sejak tahun 2011, struktur ekonomi Kota Depok memperlihatkan bahwa peran sektor sekunder dan sektor tersier masih mendominasi dan cenderung meningkat. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Depok, produktivitas dan nilai tambah (*value added*) industri kecil dan menengah, industri rumah tangga, agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM dibutuhkan kerjasama lintas OPD, serta penataan sentra-sentra IKM serta sentra IKM yang terpusat yang berada di Jalan Margonda Raya sebagai *show windows* bagi para pelaku UKM/IKM yang ada di Kota Depok.

Pengembangan ekonomi lokal di Kota Depok melalui kajian input output memiliki nilai tertinggi jika dikembangkan melalui industri kreatif. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mendampingi kluster-kluster industri

kreatif kreatif yang potensial. Hal ini sudah diinisiasi sejak 2010, namun perkembangannya perlu terus ditingkatkan terutama dari sisi penyederhanaan birokrasi, akses pemasaran, akses modal dan bimbingan inovasi produk yang berdaya saing serta usaha dalam meningkatkan peran swasta dalam mensukseskan program tersebut.

11. Pengembangan obyek pariwisata

Dalam mengembangkan potensi pariwisata, Kota Depok memiliki banyak sumber daya wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Namun sector pariwisata Kota Depok belum berkembang secara optimal terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari aspek produk pariwisata maupun pengelolaan. Berbagai potensi wisata unggulan Kota Depok yaitu wisata agro, wisata buatan, wisata rohani, wisata aquatic, wisata belanja, wisata budaya serta potensi situ yang dapat dikembangkan di Kota Depok. perkembangan ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari berbagai jenis antara lain, fesyen, kuliner juga dapat dikembangkan sebagai unggulan kota DEpok. selain itu juga danya taman hutan raya dan cagar alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan.

B. Bidang Infrastruktur

1. Pencegahan pencemaran dan konservasi air yang belum memadai membutuhkan peran serta masyarakat agar tidak mengancam ketahanan air kota.

Ketersediaan air tawar di muka bumi sangat terbatas, hanya 2,4% dari total volume air di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut 13% yang dalam berwujud cair, di mana 95% di antaranya dalam bentuk air tanah dan 3% dalam bentuk air permukaan. Sebagian air permukaan ini secara alamiah menguap dan kemudian turun kembali sebagai hujan. Ketidakbijakan kita dalam mengelola air hujan dan air permukaan dapat menyebabkan krisis air. Di musim hujan air berlimpah namun cenderung tidak termanfaatkan dan bahkan menyebabkan banjir, sementara di musim kemarau terjadi kekeringan.

Meskipun belum meluas ke seluruh wilayah Depok, kondisi air di kota Depok mulai mengkhawatirkan. Di musim hujan jumlah lokasi genangan meningkat, sedangkan di musim kemarau beberapa kelurahan seperti Meruyung dan Bedahan pada tahun ini mengalami kesulitan air bersih. Tinggi muka air tanah di kota Depokpun mengalami penurunan hingga 20 cm per tahun. Krisis ketahanan air tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitas. Berdasarkan survey Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 2015, masih terdapat 6,6% KK yang membuang limbah kotoran manusia ke sungai/situ/kolam/kebun/lubang sehingga sangat berpotensi mencemari air tanah dan air permukaan. Selain itu sebagian industri baik skala besar maupun kecil masih secara membuang air limbah industry ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Padahal tingginya tingkat pencemaran air sungai akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan PDAM untuk mengolah air baku sebelum didistribusikan ke masyarakat kota Depok. Yang artinya masyarakat kota Depok sendirilah yang akan membayarnya.

2. Pertumbuhan panjang jalan yang rendah,

Target pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mobilitas lalu lintas darat Kota Depok adalah dengan pembangunan 1 ruas jalan baru per tahun serta 1 ruas jalan tuntas per kecamatan per tahun, mengingat masih rendahnya akses internal Kota Depok baik lintas barat – timur maupun utara-selatan. Atas dasar itu maka pada tahun 2016, pemerintah Kota Depok masih memprioritaskan program perbikan dan peningkatan kualitas jalan yang tersebar di 11 Kecamatan, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan akses ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2014 jalan negara 36,25 km, jalan provinsi 17,75 km dan jalan kota sepanjang 476,15 km. Secara umum, kondisi jalan kota yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 454,84km (95,52%). Jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton) pada tahun 2014 sebesar 77,38 %. Dari data tersebut pertumbuhan jalan di Kota Depok sangatlah rendah, hal ini dikarenakan mahalnya harga lahan di Kota Depok serta lambatnya realisasi proyek jalan toll yang ada di Kota Depok.

3. Pengembangan dan integrasi sistem angkutan masal yang masih terbatas.

Survei titik kemacetan Tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik kemacetan di Kota Depok, prioritas yang perlu ditangani adalah ruas-ruas jalan utama, dalam hal ini ruas jalan terusan Jalan Juanda. Selain itu, pemisahan pergerakan lokal dan regional melalui relokasi terminal bus regional ke Jatijajar juga merupakan salah satu solusi sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya, disamping pembangunan sub terminal di kecamatan yang belum ada dan terbangunnya 1 (satu) Koridor Angkutan Pemandu Moda Depok-Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu transportasi massal serta APTB Depok

Jakarta. Realisasi *Transit Oriented Development* (TOD) kawasan terminal Depok dengan Stasiun Kereta Api serta kawasan lainnya merupakan pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan suatu kota yang efisien yang dirancang untuk memaksimalkan akses ke transportasi umum.

4. Ketersediaan lahan untuk mewujudkan pelayanan dasar dan ruang terbuka public

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang penataan ruang yaitu Perda Penataan Ruang Kota Depok 2012-2032, yang sarat dengan muatan dan amanat baru, antara lain tentang pengaturan RTH, zonasi, penegakan sanksi, dan penyediaan ruang kota bagi sektor informal dan pejalan kaki. Pengendalian tataruang dan banjir perlu dibarengi dengan upaya penghijauan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Kedua masalah ini masih merupakan isu penting dalam pembangunan perkotaan yang cenderung "boros" lahan sehingga tidak menyisakan pepohonan, dan menciptakan berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2032, bahwa setiap pemerintah daerah dapat menyediakan RTH publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10 %, hal ini masih menjadi kendala di Kota Depok. Pencapaian kinerja RTH di Kota Depok sampai dengan Tahun 2014 baru mencapai 9,085 % RTH publik dan 6,27 % RTH privat. Perlu upaya keras dan komitmen yang tinggi untuk dapat mewujudkan RTH publik mencapai 20% di Kota Depok. Permasalahan pelaksanaannya RTH seringkali terkendala dengan pembebasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan di

lingkungan masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan gerakan pengelolaan sampah, serta mendorong sektor swasta khususnya di bidang perumahan untuk berkontribusi dalam pengembangan RTH.

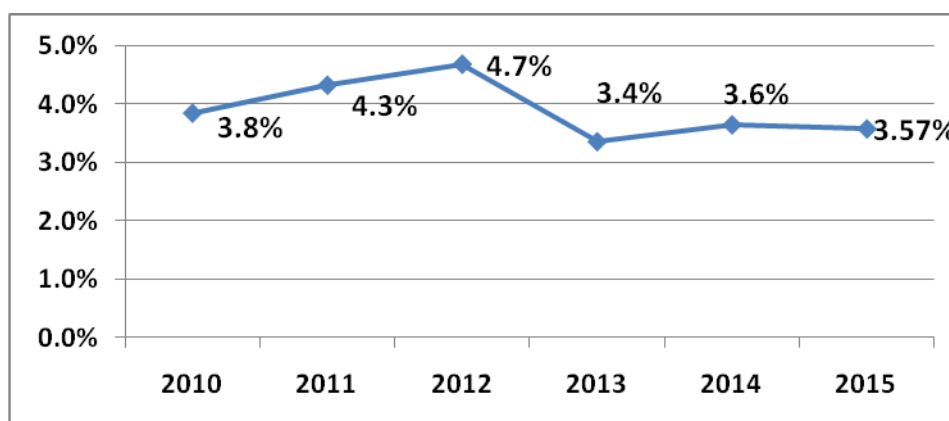
C. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

1. Permasalahan Demografi di kota Depok:

a. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

Pertumbuhan penduduk kota Depok masih di atas angka Jawa Barat (1,78 persen tahun 2013) dan Nasional (1,49 persen tahun 2015). Angka pertumbuhan penduduk di Kota Depok dalam enam tahun terakhir rata-rata 3,9 persen pertahun, dengan pertumbuhan per tahunnya seperti grafik di bawah ini:

Grafik. 2.15. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Kota Depok

Pertumbuhan yang tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan kelahiran di Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat strategis dilihat dari seluruh fungsi kota, terutama jasa, perdagangan dan permukiman.

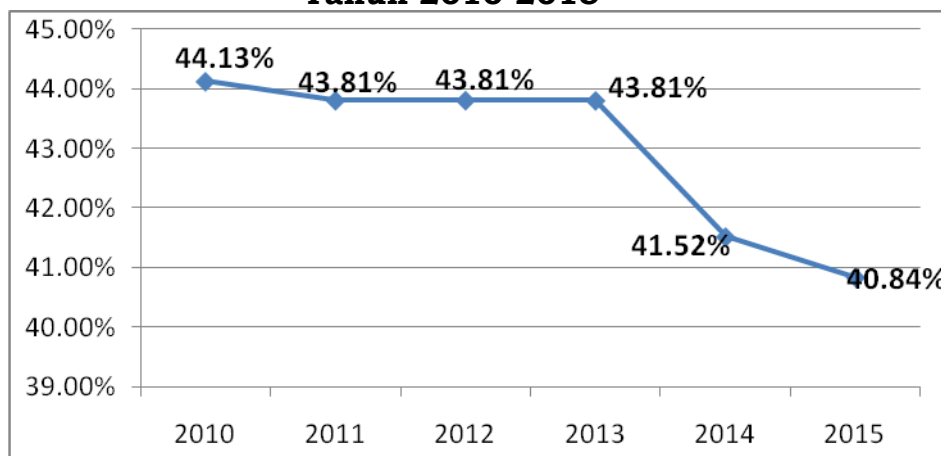
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh angka kelahiran

pasangan usia muda. Tahun 2014 perempuan berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin berusia pada 19-24 tahun sebesar 49,52 persen. Sedangkan perempuan yang menikah pada usia 15-49 tahun yang menjadi akseptor KB mencapai 55,32 persen. Sedangkan berdasarkan angka Dinas Kesehatan, Kota Depok, jumlah kelahiran tahun 2014 terdapat 46.679 kelahiran atau 62,9 persen dari pertumbuhan penduduk kota Depok. Data kelahiran yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh tingkat migrasi yang tinggi pula (kelahiran dari pasangan muda yang bermigrasi ke kota Depok. Dari data-data tersebut, program pengendalian penduduk menjadi masalah utama di Kota Depok, dan pengendalian penduduk terkait dengan data di atas salah satunya adalah dengan revitalisasi program keluarga berencana bagi pasangan usia subur.

b. Perkembangan bonus demografi yang belum diiringi dengan optimalisasi penyiapannya.

Bonus demografi ditandai salah satunya dengan semakin menurunnya angka beban tanggungan (*dependency ratio*) yaitu usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibanding non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Grafik. 2.16. Angka Ketergantungan Kota Depok Tahun 2010-2015



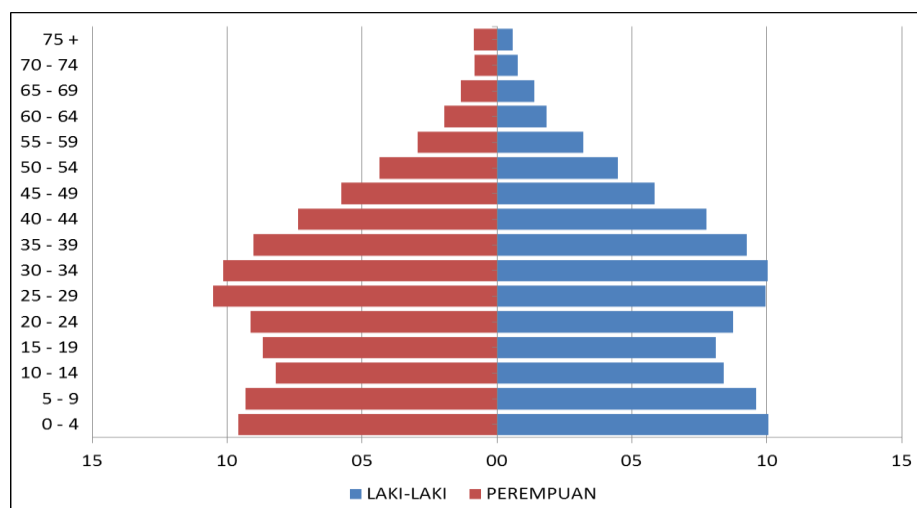
Sumber: BPS Kota Depok

Bonus demografi tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari usia non produktif saja, namun dilihat dari kondisi penduduk yang sehat dan terdidik, meningkatnya lapangan kerja, tenaga kerja produktif meningkat serta pada akhirnya dicapainya stabilitas ekonomi yang baik.

Jika melihat beberapa permasalahan seperti: pengangguran yang masih tinggi, prevalensi penyakit menular khususnya TBC, HIV AIDs, DBD masih relative tinggi, angka partisipasi sekolah khususnya SMP dan SMA yang masih relative rendah, maka hal ini yang menjadi tantangan pemerintah kota Depok dalam menghadapi permasalahan bonus demografi yang harus diselesaikan.

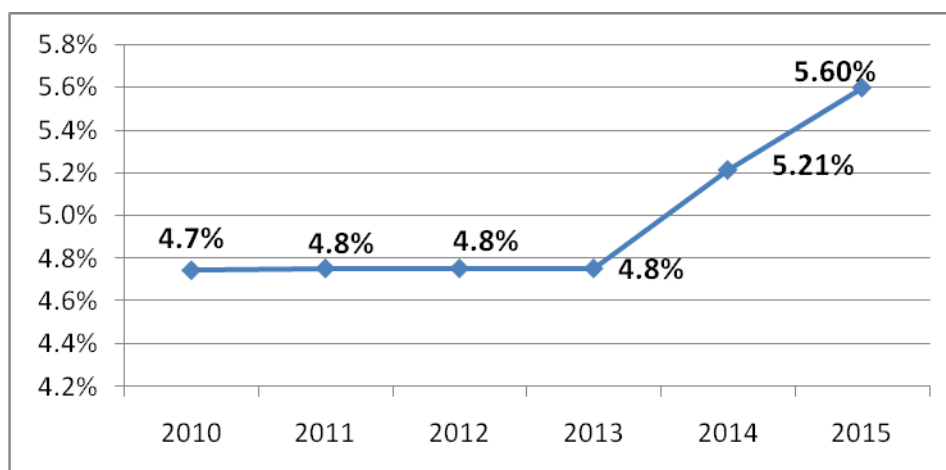
- c. Perkembangan *pyramida* penduduk kota Depok yang menunjukkan peningkatan pergeseran jumlah usia produktif menjadi usia lanjut (Lansia) belum optimal penyiapannya. Gambaran prediksi pergeseran kelompok usia produktif menjadi usia lanjut dapat dilihat pada grafik pyramida berikut ini:

Grafik. 2.17. Pyramida Penduduk Kota Depok Tahun 2015



Sumber Data: BPS Kota Depok

Grafik. 2.18. Jumlah Penduduk Lansia (usia 60 tahun keatas) Kota Depok Tahun 2010-2015



Sumber Data: BPS Kota Depok

Grafik di atas, menunjukkan pertumbuhan jumlah lansia yang cukup signifikan dari 4,7 persen tahun 2010 menjadi 5,6 persen tahun 2015. Angka Jawa Barat maupun Nasional tahun 2015 jumlah Lansia telah mencapai kurang lebih 8 persen. Berdasarkan data BPS tahun 2014 jumlah lansia laki-laki sebagian besar berpendidikan SD (12.289 orang) dan SMA (11.371 orang), sedangkan untuk lansia perempuan sebagian besar berpendidikan SD (16.604 orang) dan SMA (9.393 orang). Jika dilihat dari aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh para lansia, maka jumlah lansia laki-laki yang masih bekerja sebanyak 15.078 orang, dan jumlah lansia perempuan yang masih bekerja sebanyak 4.168 orang. Melihat data tersebut, maka Depok harus sudah bersiap dalam menangani penduduk lansia dan perlu adanya penyiapan yang lebih dini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan Lansia. Penyiapan tersebut tidak hanya dari sisi kebutuhan kesehatan dan psikologi lansia saja, namun juga pemenuhan sarana dan

prasarana baik fisik maupun sarana informasi yang ramah lansia, penyediaan lapangan pekerjaan dan ketrampilan serta keterlibatan sosial, perlakuan dan penghormatan kepada lansia. Hal ini merupakan upaya demi mewujudkan lansia menjadi lebih aktif dan produktif tidak menjadi beban dalam keluarganya dan nantinya terwujud sebuah kota yang ramah lansia.

2. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Depok.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indeks kompositnya adalah Indeks kesehatan yang diukur dengan UHH, di kota Depok yang memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun, bahkan menjadi peringkat ke dua propinsi Jawa Barat. UHH Kota Depok pada Tahun 2015 meningkat dari 73,96 Tahun 2014 menjadi 74,10 Tahun 2015. Namun demikian, tingginya UHH tersebut tidak lantas kota Depok terbebas dari permasalahan kesehatan, karena masih ada beberapa masalah kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah kota Depok untuk diselesaikan. Adapun UHH dipengaruhi oleh:

a. Kematian Ibu dan Bayi

Peningkatan kualitas kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif, angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Depok. Tahun 2014, jumlah kematian ibu adalah 17 orang/46.679 KH atau 36,42 dari 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi ada 83 orang/46.679 kelahiran hidup atau 1,78/1000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian bayi merupakan dampak positif dari program peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA). Namun demikian, hal ini perlu ada upaya penurunan kasus kematian ibu/bayi, mengingat kota Depok yang notabene daerah perkotaan

memiliki akses fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup serta ketersediaan tenaga dokter spesialis Obsgyn dan spesialis anak yang relative lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain seharusnya jumlah kematian ibu dan bayi dapat ditekan seminimal mungkin.

b. Angka kesakitan.

Selain AKI/AKB, UHH dipengaruhi juga oleh angka kesakitan. Saat ini, salah satu permasalahan penanggulangan penyakit di Kota Depok adalah adanya *Double burden* atau beban ganda penanggulangan penyakit, artinya kota Depok yang masih belum selesai dengan permasalahan penyakit menular saat ini telah berkembang dengan meningkatnya penyakit tidak menular atau *degenerativeseperti* Diabetes Melitus, Hypertensi, Jantung, Kanker, dan lainnya. Beberapa penyakit yang masih harus diselesaikan permasalahannya di Kota Depok adalah TBC, HIV/AIDs, DBD dan Filariasis.

Salah satu upaya menekan peningkatan dan belum terkendalnya penyakit di Kota Depok adalah dengan upaya kesehatan terutama promotif dan preventif untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) baik untuk kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungannya. Selain itu kuratif dan rehabilitatif dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas, mudah serta pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, pemerintahkota Depok telah memberikan bantuan pelayanan rawat inap DBD gratis di rumah sakit kelas 3 untuk menekan dampak akibat DBD.

c. Status Gizi

Jumlah Balita Gizi Buruk di kota Depok terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penderita gizi buruk sebanyak 75 Anak atau 0,04 persen. Keberhasilan ini ditopang oleh adanya Pusat Pemuliaan Gizi (PPG) yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya, Cimanggis dan Pancoran Mas, Pos Gizi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di seluruh Kota Depok serta RW Siaga. Namun demikian, upaya penurunan kasus gizi buruk harus terus menjadi prioritas, karena kota Depok bukan merupakan daerah yang memiliki kendala dalam hal akses ketahanan pangan maupun layanan kesehatan. Komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memberikan asupan gizi kepada Balita, merupakan hal yang harus menjadi fokus dalam upaya ini.

d. Peningkatan akses layanan kesehatan rujukan

Saat ini di Kota Depok terdapat 35 Puskesmas yang tersebar di 11 Kecamatan dan 4 Puskesmas Pembantu. Sarana pelayanan kesehatan lain yang tersedia adalah 1 Rumah sakit umum daerah, 14 Rumah Sakit Umum Swasta, 3 Rumah Sakit Ibu dan anak swasta, 129 Balai Pengobatan, dan 18 rumah bersalin. Kondisi ini belum secara merata mencukupi semua kebutuhan layanan kesehatan di Kota Depok karena di Kecamatan Tapos, Cipayung, Bojongsari dan Limo belum tersedia rumah sakit. Pelayanan puskesmas yang ada saat ini juga belum seluruhnya memberikan layanan 24 jam. Hingga tahun 2015, puskesmas yang telah menyediakan layanan 24 jam ada 9 puskesmas dengan cakupan layanan poli umum, poli gigi, poli anak dan ibu, poli KB dan UGD. Selain itu, kebutuhan layanan rawat inap puskesmas dan puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED) menjadi kebutuhan

yang harus dipenuhi juga untuk masyarakat dalam mengantisipasi kasus kematian ibu/bayi. Saat ini, dari 11 puskesmas kecamatan, yang telah memberikan layanan rawat inap baru ada 2 puskesmas yaitu Cimanggis dan Pancoran Mas. Sedangkan untuk PONED pada tahun 2015 baru ada 6 puskesmas yaitu: Beji, Kedaung,

Sebagaimana dijelaskan di atas, Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas atau klinik atau pelayanan kesehatan tingkat pertama, keberadaannya di kota Depok masih ada beberapa kecamatan yang belum ada, serta jenis layanan RS yang belum lengkap. Upaya yang menjadi fokus perencanaan ke depan adalah peningkatan kelas RSUD kota Depok untuk meningkatkan jenis layanan dan menambah daya tampung ruang inap pasien, akan dituntaskan pembangunannya pada tahun 2016 dan 2017, serta dengan menambah RSUD yang berada di Wilayah Timur sebagai upaya peningkatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan daya tampung sekolah baik SD, SMP dan SMA

Upaya meningkatkan prestasi suatu daerah, dimulai dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pendidikan Kota Depok. Upaya tersebut dilakukan dengan strategi peningkatan pelayanan jasa atau layanan penyediaan pendidikan (*service*), kualitas pendidikan (*quality*) dan kepuasan masyarakat atas pendidikan (*satisfaction*) dengan arah pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta

tata kelola, dan akuntabilitas publik. Salah satu keunggulan kompetitif Kota Depok terhadap regional Jawa Barat maupun Bodetabek adalah pada kualitas SDMnya, yang dilihat dari capaian Indeks Pendidikan Kota Depok yaitu Rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai 11,07 pada Tahun 2015 yang relatif lebih tinggi dari regionalnya.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Kota Depok perlu terus memacu pengembangan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan data Inkesra tahun 2014, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 78,02%. Salah satu penyebab belum optimalnya angka tersebut, adalah karena alasan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, fokus perhatian pemerintah adalah melalui fasilitasi BOS bagi siswa siswi SDN, SMPN, bantuansiswa miskin di SD dan SMP swasta.

Daya tampung pendidikan dapat dilihat dari rasio siswa per kelas atau rombel. Data Dinas Pendidikan Kota Depok, rasio siswa SD per rombel adalah 32 siswa atau rasio siswa per kelas 64 siswa sedangkan standar nasional adalah 32. Dari data di atas, masih harus ada tambahan ruang kelas baru serta beberapa kecamatan yang membutuhkan unit sekolah baru dan fasilitas/sarana pendukungnya.

Hal lain yang harus dilaksanakan dalam rangka menghapuskan buta aksara dan ketertinggalan bagi masyarakat yang telah putus sekolah adalah dengan kejar Paket A, B dan C serta penyediaan sekolah terbuka dan sekolah jauh/siang. Upaya lain yang tidak tertinggal adalah dengan pemberian beasiswa ke perguruan tinggi bagi siswa miskin dan siswa berprestasi, hal ini untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan tinggi.

Dari sisi kualitas, baik kota Depok sudah tergolong sebagai daerah yang memiliki banyak prestasi bidang pendidikan, baik siswa maupun tenaga pendidik nya. Terbukti menjadi pemenang tingkat nasional maupun internasional pada penyelenggaraan berbagai kejuaraan/olympiade pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, kualitas pendidikan yang telah menuai berbagai prestasi tersebut harus dapat merata dimiliki oleh setiap sekolah. Selain kualitas dan prestasi pendidikan, pembangunan karakter untuk kualitas mental spiritual di sekolah baik bagi siswa maupun tenaga pendidik **sangat** dibutuhkan sebagai fundamental perkembangan kualitas siswa. Permasalahan ini justru yang harus lebih menjadi penekanan dalam upaya perbaikan kualitas mental di sekolah. Mengingat beberapa kejadian siswa terlibat dalam berbagai tindak kriminal maupun kejahatan serta penyimpangan moral.

Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan karakter adalah peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi siswa, ketrampilan dan kewirausahaan siswa, metode pembelajaran/kurikulum sekolah, implementasi pendidikan karakter bagi siswa dan tenaga pendidik perlu dibuat tata kelola untuk pelaksanaannya.

4. Pengarusutamaan Gender dan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan data BPS kota Depok, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kota Depok pada tahun 2013 sebanyak 128 kasus, 91 orang korban diantaranya adalah perempuan dan 37 anak. Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kota Depok pada

tahun 2013 diantaranya kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Sedangkan tempat kejadian tindak kekerasan pada umumnya terjadi di rumah tangga dan lainnya. Pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Depok pada tahun 2013 ada sebanyak 29 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Para pelaku ini 42 orang berumur di atas 25 tahun, 9 orang berumur 18-24 tahun, dan 12 orang berumur 0-17 tahun.

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, pemerintah Kota Depok telah membentuk forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Depok yang berfungsi memberikan pelayanan konseling, pelayanan penegakan dan bantuan hukum dan mendapatkan pelayanan pemulangan dan reintegrasi serta upaya pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak.

Pengembangan RW layak anak, kelurahan layak anak untuk pencapaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya untuk pemenuhan hak anak sekaligus pencegahan kasus kekerasan anak. Konsep program KLA dilaksanakan secara terintegrasi dari semua urusan pembangunan. Implementasi program tersebut masih bersifat sektoral dari aspek administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan, fisik sarana prasarana. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada Tahun 2015 telah terbentuk 74RW layak anak di Kota Depok dan 12 rintisan kelurahan layak anak yang telah membentuk gugus tugas serta forum anak.

Pengarusutamaan gender menjadi prioritas di setiap sektor pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan lengkap mengenai tingkat pencapaian pembangunan gender sebagai dampak dari kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menitikberatkan pada pengukuran peningkatan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan sehingga tercapai kesetaraan dalam hal pencapaian kemampuan dasar manusia. Angka indeks pembangunan gender Kota Depok sudah cukup baik, yaitu 72,94 pada tahun 2012 dan 72,68 pada tahun 2011. Peningkatan IPG ini memperlihatkan bahwa pembangunan berwawasan gender di Kota Depok semakin membaik.

Kesetaraan dalam pencapaian bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya dari segi status dan kedudukan, tetapi lebih kepada persoalan pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan inilah yang coba diungkap oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Seperti yang telah diulas sebelumnya, IDG sendiri merupakan indeks komposit yang berupaya mengungkap peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Secara teoritis, semakin tinggi pencapaian pembangunan gender akan berdampak pada peningkatan peranan perempuan khususnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

5. Pemenuhan penyediaan sarpras posyandu (gedung dan sarana penunjang).

Pencapaian pembangunan Kota Depok bukanlah semata-mata hasil pembangunan pemerintah, peranan masyarakat terutama peran ibu menjadi hal utama, kegiatan yang terorganisir dalam gerakan PKK, posyandu dan posbindu sangatlah membantu dalam mensukseskan pencapaian tersebut. Pada saat ini pemerintah Kota Depok telah memiliki 999 Posyandu dan 680 Posbindu yang tersebar di 11 Kecamatan dan telah aktif 100%. Kegiatan berbasis masyarakat menjadi andalan program Posyandu dan posbindu dalam menterjemahkan 10 program PKK dan program prioritas Kota Depok. Fasilitasi posyandu dan pembangunan gedung Posyandu dan posbindu menjadi prioritas pembangunan sejak tahun 2014 dengan Workshop Pokjantal Posyandu, Rakor Pokjantal Posyandu, Lomba posyandu tingkat kota Depok, Lomba kader posyandu tingkat kota Depok, Pembentukan 75 Posyandu Percontohan, Pelatihan 1000 Kader Posyandu. Pengadaan Alat peraga penyuluh kader (10 jenis), Timbangan Lansia dan Timbangan Inovatif Permata Hati, alat cek dan dan kertas periksa (trips) gula darah, asam urat dan colesterol, meja dan kursi kerja kader, tempat tidur periksa/pasien, buah Spygmanometer/tensimeter, papan data untuk posyandu di Kota Depok. Selaian alat-alat tersebut diperlukan berbagai media lainnya dalam upaya meningkatkan peran posyandu dalam mendukung pembangunan Kota Depok.

6. Peningkatan kualitas pelayanan yang professional di bidang perpustakaan dan serta peningkatan minat baca masyarakat.

Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 telah dibangun gedung perpustakaan umum kota Depok yang terdiri dari 3 lantai dan diresmikan oleh Walikota Depok pada tanggal 27 April 2015.

Setelah Perpustakaan menempati gedung baru, pengunjung mengalami lonjakan yang cukup signifikan ditambah lagi mulai bulan Oktober 2015 Perpustakaan Umum Kota Depok buka setiap hari (senin sd minggu kecuali libur nasional). Selain memberi kenyamanan bagi pengunjung, Gedung Perpustakaan yang baru juga menawarkan fasilitas wifi gratis dan sejak tahun 2015 perpustakaan juga telah memberi layanan keanggotaan dan sirkulasi (pem injaman/pengembalian buku). Selain itu dengan adanya ruang teater menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat dan sekolah untuk datang dan berkunjung secara rombongan. Semua fasilitas yang ada di Perpustakaan Umum Kota Depok diberikan oleh Pemerintah Kota Depok secara gratis sehingga Perpustakaan menjadi salah satu alternatif ruang publik yang baru bagi masyarakat Kota Depok.

Titik layanan Perpustakaan Keliling juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun terakhir karena adanya penambahan tenaga pustakawan yang juga ikut membantu pengolahan buku yang ada di perpustakaan keliling. Selain itu mulai tahun 2015 Perpustakaan Keliling secara rutin melakukan layanan setiap hari minggu di area car free day Kota Depok. Namun demikian, dirasakan masih minim minat baca di berbagai kalangan masyarakat Kota Depok masih menjadi fokus perhatian penting Pemerintah Kota Depok, karena dampak dari membaca adalah mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua orang, sehingga kegemaran dalam membaca patut untuk ditingkatkan, agar generasi penerus dapat mencintai buku, berbagai program kegiatan yang akan diusung dalam meningkatkan gemar membaca yaitu melalui sinergitas antara para komunitas dan pelajar di Kota Depok. Khususnya untuk kalangan pelajar masih sangat membutuhkan berbagai informasi

dan edukasi untuk pengetahuannya. Dengan melakukan sinergitas ini, maka para pelajar akan lebih mudah memperoleh buku atau informasi yang dibutuhkan. Sehingga secara tidak langsung mereka membutuhkan buku dan targetnya lambat laun akan menggemarinya

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi Perekonomian Daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kota Depok Tahun 2015 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2016-2017. Bab ini juga mengulas mengenai tantangan perekonomian Kota Depok serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah secara lebih lengkap sebenarnya diperlukan data dari sisi *supply* (produksi) dan dari sisi *demand* (konsumsi). Namun karena keterbatasan data dari sisi *demand* yang dimiliki Kota Depok, maka pada bagian ini kondisi ekonomi wilayah Kota Depok akan dijelaskan lebih banyak dari sisi produksi, dan hanya sebagian kecil yang akan dijelaskan dari sisi konsumsi.

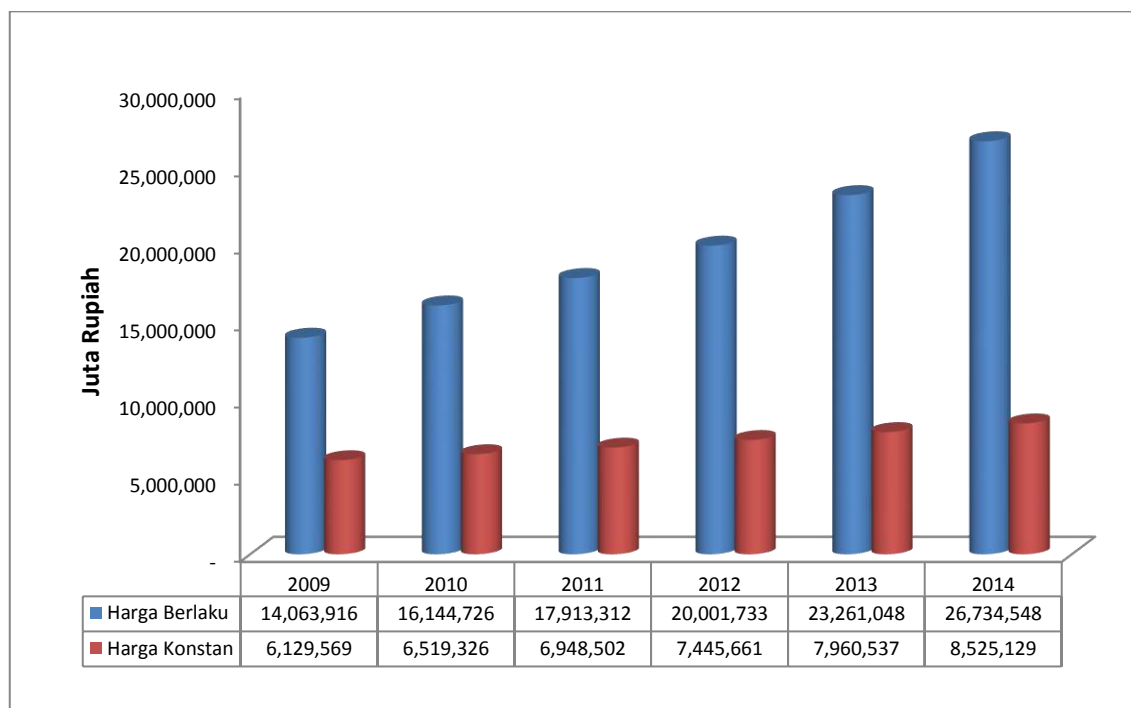
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017

PDRB. Dari sisi produksi (*supply side*), dengan tolok ukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Tahun 2015, kondisi ekonomi wilayah Kota Depok mencapai besaran kurang lebih Rp. 8,53 triliun atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2013 yang dipublikasikan pada Tahun 2014 (ADHK 2000) yang mencapai Rp. 7,96 triliun, maka dimensi ekonomi wilayah Kota Depok mengalami peningkatan. Perlu diketahui bahwa PDRB ADHK ini menurut ahli-ahli ekonomi adalah tolok ukur yang paling baik untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah karena faktor inflasi (kenaikan harga) tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga

menunjukkan kenaikan/penurunan yang riil terjadi. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dikhawatirkan analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat berakhir pada sebuah kesimpulan yang memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat harga produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari 2009-2014 dapat dilihat pada Grafik 3.1. Pada rentang waktu 2009-2014 terjadi peningkatan ukuran ekonomi wilayah secara berturut-turut (dalam Rp. Trilyun): 6,13; 6,52; 6,95, 7,45; 7,96; 8,53 Data ini menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil di Kota Depok. Peningkatan nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan para pekerja (masyarakat).

Grafik 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2009 – 2014

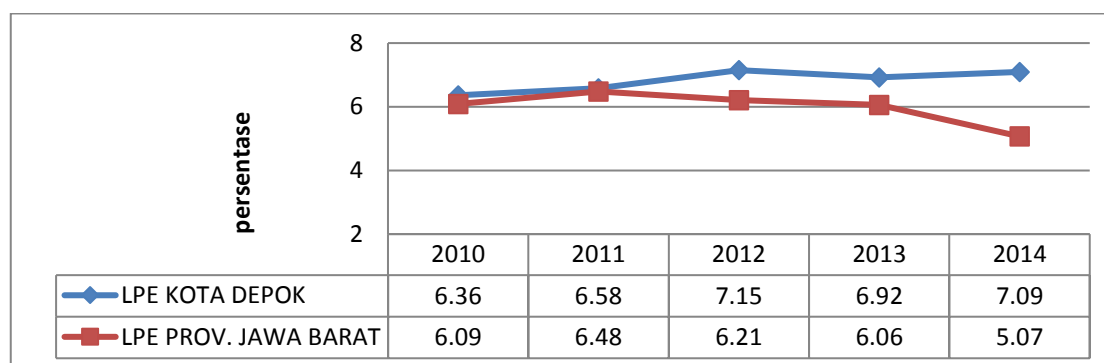


Sumber: BPS Kota Depok 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada rentang Tahun 2009 - 2014 relatif mengalami percepatan. Hanya pada rentang Tahun 2012-2014 mengalami perlambatan pertumbuhan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Depok tumbuh rata-rata sebesar 6,79 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dalam kurun 5 tahun (2010-2014) dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2010– 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000



Sumber: BPS 2015

Pada Grafik 3.2. juga disajikan tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Barat. Karakter histori tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Depok dan wilayah Provinsi Jawa Barat sedikit mengalami perbedaan, pada rentang 2010-2011 sama-sama mengalami pertumbuhan positif, kemudian mengalami perlambatan pada rentang 2012-2014 dan perkembangan ekonomi Kota Depok pada Tahun 2012 berbeda dengan perkembangan Jawa Barat, dimana pada tahun tersebut ekonomi Kota Depok mengalami pertumbuhan cukup baik dan

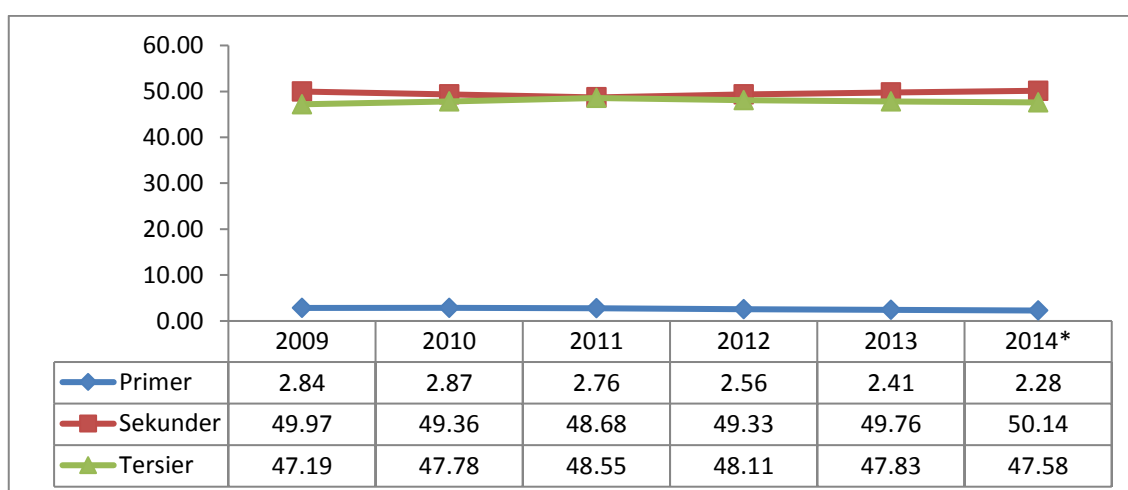
kembali mengalami pertumbuhan pada Tahun 2014 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang sebagai daerah pendukung. Jika dibandingkan tahun per tahun, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan Kota Depok lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat, sebagai contoh pada Tahun 2014 Kota Depok mengalami pertumbuhan 7,09persen pertahun, sementara itu Provinsi Jawa Barat hanya 5,07persen pertahun. Ini berarti ekonomi Kota Depok tumbuh lebih cepat daripada ekonomi Provinsi Jawa Barat dan beberapa Kota /Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat.

LPE Kota Depok 2013-2014 tumbuh sebesar 7,09 persen (yoy), jikadilihat dari kelompok sektor, pada tahun 2014 seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terkecil. Bahkan jika dilihat lebih dalam pada sub sektor pertanian ini, sub sektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pertumbuhan kelompok Tersier mengalami peningkatan menjadisebesar 6,53 persen pada tahun 2014 dari 6,30 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan secara melambat terjadi empat sektor, yaitu sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa. Laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor menunjukkan bahwa sektor bangunan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Depok sedang sangat pesat.

Struktur perekonomian. Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor (lihat Grafik 3.3). Distribusi persentase menunjukkan struktur perekonomian. Di dalam literatur dikenal salah satu strukturnya dikelompokkan menjadi tiga :

sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Data empirik menunjukkan bahwa semakin maju suatu wilayah, maka struktur perekonomiannya akan semakin didominasi oleh sektor tersier. Pada Grafik 3.3. dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Tahun 2015, didominasi oleh sektor sekunder (50,14%) dan sektor tersier (47,58%). Peranan sektor sekunder masih mendominasi PDRB Kota Depok dan kecenderungan terus tumbuh sejak tahun 2011 yang di kuasai oleh sector industri pengolahan. Sedangkan peran sektor primer juga menunjukkan *trend* yang semakin menurun dari 2,41% menjadi 2,28% pada tahun 2014. Fakta ini mengindikasikan bahwa Kota Depok tengah bergerak menuju terbentuknya wilayah ekonomi yang lebih maju.

Grafik 3.3. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2009 – 2014(ADHK) (Dalam %)



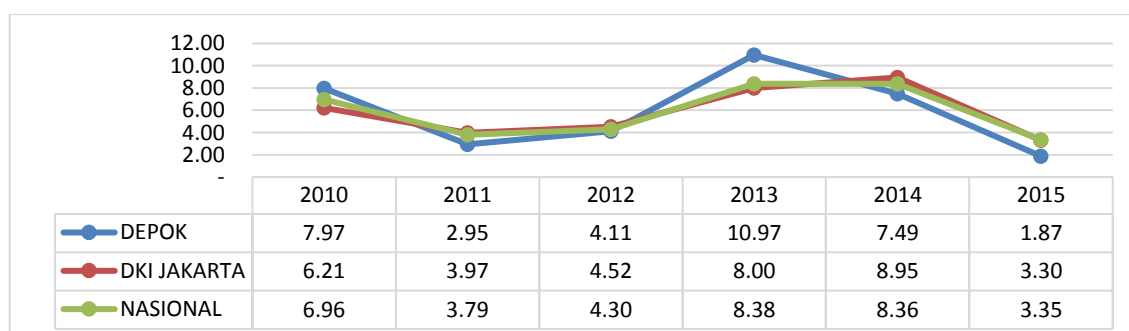
Sumber : BPS Kota Depok

Inflasi. Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Grafik 3.4. menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok, DKI Jakarta, dan Nasional pada rentang waktu 2009-2015. Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua

wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang kemungkinan besar disebabkan oleh mudahnya akses/aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya. Pada Grafik 3.4. ditunjukkan bahwa pada 2015 inflasi di Kota Depok (1,87) lebih rendah jika dibandingkan dengan DKI Jakarta (3,30) dan Nasional (3,35). Naik-turunnya inflasi di tiga wilayah ini memiliki pola yang sama pada 2009-2015. Jika dikaitkan dengan pola pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu 2008-2012, kesimpulan sementara yang dapat diperoleh untuk kasus Kota Depok adalah tidak ada kaitan yang jelas antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyebabkan inflasi, atau sebaliknya inflasi tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dinamika diantara keduanya kemungkinan ditentukan oleh faktor lain.

Dinamika inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar serta kebijakan-keijakan lain disektor perbankan maupun perilaku transaksi spekulatif para pelaku ekonomi.

Grafik 3.4. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Kota Depok

Pengangguran. Indikator lainnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok pada Tahun 2014 sebesar 8,44%, meningkat dibandingkan tingkat pengangguran pada Tahun 2013 yang masih 7,67%. Peningkatan pengangguran di Kota Depok sebesar 0,77% di dominasi oleh tamatan SLTA yaitu sebesar 69,22 persen. Selanjutnya secara berurutan adalah tamatan SMP, perguruan tinggi, SD dan yang terakhir tidak atau belum pernah atau belum tamat SD. Hal ini bisa jadi disebabkan karena penduduk yang baru lulus/tamat SLTA belum terserap ke pasar kerja atau dalam proses mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Meskipun tingkat pengangguran mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Depok tetap terus berupaya lebih serius untuk menangani masalah pengangguran diantaranya pengembangan wirausaha muda atau pemula dengan memberikan pelatihan baik pada sector informal dan formal. Diharapkan target pencapaian kinerja Tahun 2017 dapat menurunkan angka pengangguran dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis wilayah dan ekonomi lokal.

Gini rasio. Kondisi ekonomi wilayah bisa juga dilihat dari gini ratio, yaitu suatu koefisien yang menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu. Koefisien Gini (Gini ratio) berkisar antara 0 hingga 1. Makin besar koefisien makin timpang. Gini ratio Kota Depok pada 2009-2014 berturut-turut: 0,296; 0,318; 0,355; 0,398; 0,398 dan 0,9365 (Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok 2014). Meskipun dapat dikategorikan sedang, koefisien Gini untuk Kota Depok memperlihatkan kecenderungan naik, mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan.

Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi wilayah Kota Depok dilihat dari aspek ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada rentang 2013-2014 terjadi penambahan jumlah pekerja dari 826.191 pekerja (2013) menjadi 877.684 pekerja (2014), terdapat kenaikan 6,23% (sumber:

Inkesara 2013 dan 2014). Dalam hal lapangan kerja, mayoritas dikontribusikan dari sektor Perdagangan, Rumah makan dan Hotel sebesar 33,52%, sektor jasa kemasyarakatan lainnya sebesar 28,35% dan sektor pertambangan/penggalan, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebesar 24,27%, ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja di Kota Depok. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga kerja yang paling sedikit sebesar 1,74 persen. Hal ini sejalan dengan semakin minim dan berkurangnya lahan pertanian di Kota Depok.

Tabel 3.1. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2014

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	14.282	2,44	1.033	0,35	15.315	1,74
2. Industri Pengolahan	73.528	12,56	32.827	11,24	106.355	12,12
3. Perdagangan, Rumah makan dan Hotel	167.117	28,54	127.090	43,50	294.207	33,52
4. Jasa Kemasyarakatan	137.537	23,49	111.287	38,10	248.824	28,35
5. Lainnya (pertambangan/penggalan, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan)	193.091	32,98	19.892	6,81	212.983	24,27
Jumlah	585.555	100,00	292.129	100,00	877.684	100,00

Tabel 3.2. TPAK, TPT dan TKK Tahun 2011 – 2014 Di Kota Depok

Indikator/Tahun	2011	2012	2013	2014
TPAK (persen)	63,18	63,81	62.74	63,34
TPT (persen)	10,60	9.42	7.67	8,44
TKK (persen)	89,40	90,58	92.33	91,56

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Depok Tahun 2014 sebesar 63,34 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. TKK Kota Depok tahun 2014 sebesar 91,56 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92 orang merupakan penduduk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 2014 sebesar 8,44 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 8 sampai 9 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Kesempatan Kerja Kota Depok dari Tahun 2011 hingga 2014 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula Tingkat Pengangguran Terbuka dalam rentang waktu yang sama

memperlihatkan trend penurunan. Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya disebabkan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, migrasi penduduk berpendidikan tinggi ke Kota Depok, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di sekitarnya.

Ekonomi kreatif.

Di luar sektor makro di atas, Kota Depok juga memiliki berbagai produk potensial yang memiliki keunggulan komparatif, antara lain komoditas belimbing, ikan hias, tanaman hias, serta beberapa produk ekonomi kreatif. Sumbangan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Depok terhadap PDRB (ADHB) pada Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Tahun 2014 mencapai Rp. 3,17 triliun atau 11,86% dari total PDRB Kota Depok. Dibandingkan pada tahun sebelumnya (2013), sumbangan PDRB Industri Kreatif mencapai Rp. 2,73 triliun atau 11,73% dari total PDRB.

Ekonomikreatif di Kota Depok pada Tahun 2014 secara riil melaju dengan baik dibandingkan Tahun 2013, dimana pada Tahun 2013 tumbuh sebesar 7,04 persen, dan pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 10,05 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif ini lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu sebesar 7,09 persen pada tahun 2014. Terdapat 15 kelompok kegiatan dikategorikan sebagai ekonomi kreatif: periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan, disain, fashion, film-video-fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan-percetakan, layanan komputer-piranti lunak, tv-radio, riset, dan kuliner. Pada Tahun 2014, kontribusi terbesar sektor ekonomi kreatif disumbang dari fashion sebesar 30,63% dengan pertumbuhan 12,68% dan sumbangan kedua terbesar adalah dari kerajinan sebesar 30,06% dengan pertumbuhan

10,10% serta kuliner dengan kontribusi sebesar 10,25% dengan laju pertumbuhan sebesar 10,25%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2014, perkembangan sektor musik mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 16,03% diikuti oleh sektor fashion sebesar 12,68% dan kuliner sebesar 10,25%.

Peranan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Kota Depok secara umum selalu di atas 12 persen setiap tahunnya. Sektor fashion dan sektor kerajinan sangat mendominasi Ekonomi Kreatif di Kota Depok. Bahkan kontribusi kedua sektor tersebut dalam Ekonomi kreatif Kota Depok mencapai lebih dari 60 %. Sehingga sektor fashion dan sektor kerajinan perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena fluktuasi kedua sektor ini akan berdampak sangat besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum. Sektor Kuliner yang secara khusus dimasukkan ternyata juga mempunyai andil yang cukup besar. Sektor ini menempati peringkat ketiga atas kontribusinya terhadap ekonomi kreatif di kota Depok. Sektor Kuliner sebaiknya semakin dikembangkan, mengingat potensi sektor ini masih sangat terbuka lebar. Pemerintah bisa menyediakan tempat-tempat khusus sebagai pusat wisata kuliner supaya kuliner di Kota Depok dapat semakin berkembang

Ada fenomena baru dalam industri kreatif di Kota Depok yaitu sektor jasa seni yang mendukung industri kreatif sehingga meningkatkan nilai tambah industri kreatif Kota Depok. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya arus informasi sehingga segala informasi mudah di akses dan jasa seni semakin kompetitif dalam mendukung nilai tambah industri kreatif. Usaha di sektor ini semakin berkembang dan basis potensinya adalah kekuatan intelektual individu yang berkembang di masyarakat kaum muda Kota Depok. *(Sumber : BPS dan Bappeda Kota Depok "PDRB Industri Kreatif Kota Depok 2013 dan 2014")*.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

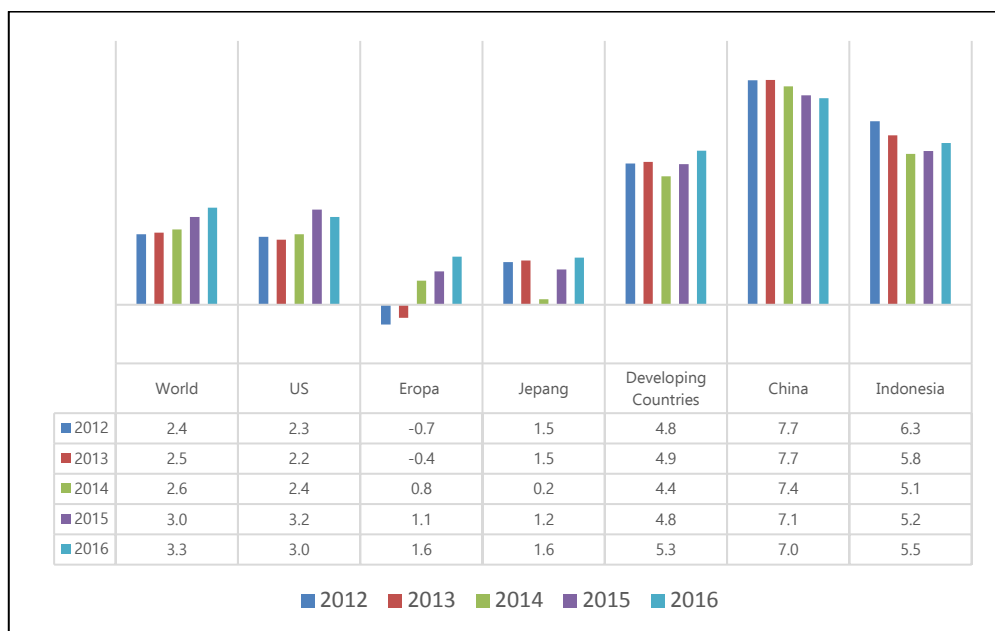
Dalam era ekonomi terbuka seperti saat ini, keadaan ekonomi Kota Depok Tahun 2017 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi periode sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Global, Nasional, regional maupun kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat.

3.1.2.1. Ekonomi Nasional

Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Berdasarkan analisis dari World Bank, perkiraan kinerja perekonomian global pada tahun 2015 dan 2016 cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada (Gambar 3.5).

Grafik 3.5. ECONOMIC OUTLOOK GLOBAL DAN NASIONAL



Sumber : Worldbank (2015)

Melihat dari perkiraan Worldbank, laju pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 2.99% di tahun 2015 dan 3.31% di tahun 2016. Kondisi ini didukung oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara dan kawasan termasuk Jepang yang

dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini diharapkan akan berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang diperkirakan akan tumbuh ke angka 5.2% di tahun 2015 yang sebelumnya turun drastis dari 5.8% di tahun 2013 menuju angka 5.02% di tahun 2014. Dengan Indonesia memasuki masa penyesuaian ditengah pergantian presiden dan penentuan harga BBM yang didasarkan kepada mekanisme pasar, pertumbuhan tersebut tentunya merupakan kabar baik bagi kondisi perekonomian nasional walaupun kemungkinan akan dicapai dengan upaya yang cukup berat. Upaya-upaya tersebut harus didukung oleh peningkatan kualitas perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk Provinsi Jawa Barat

Kebijakan ekonomi makro pada Tahun 2017 merupakan penjabaran dari **RPJMN Tahap 3 (2015-2019) yang** mengacu pada agenda 9 prioritas nasional RPJMN 2015-2019 yang dikenal dengan NAWA CITA:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan Nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2017

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia yang sedang menjalani proses pemulihan setelah

mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang dipicu oleh ketidakpastian dan memburuknya perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang dalam perekonomian dunia seperti menurunnya harga komoditas dunia, isu *tapering off*, menurunnya harga minyak dunia, serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter.

Pemerintah melalui Bappenas memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 diperkirakan 7,1%, dengan tingkat inflasi 4% dan penurunan angka pengangguran 5,0-5,3% serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,5-9,5%.

Kesepakatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam RKPD masih menjadi hal yang dipertahankan pada Tahun 2017 adalah peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penyiapan landasan pembangunan dan infrastruktur.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut serta dengan konsistensi capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 5,94 persen hingga Agustus 2014, pengangguran diperkirakan dapat terus menurun di Tahun 2016 diharapkan menjadi berkisar antara 5,2 – 5,5% . Dengan tingkat pengangguran tersebut diharapkan dapat memberi dampak pada menurunnya jumlah kemiskinan paling tinggi 10 persen di Tahun 2016.

Dalam periode Tahun 2015-2019, dengan berbagai upaya yang dilakukan, diperkirakan kinerja faktor-faktor ekonomi yang meliputi *capital stock*, *human capital stock* dan Total Factor Productivity akan meningkat. Peningkatan tajam akan terjadi sejak Tahun 2016, yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 mencapai lebih dari 6 persen.

Darisisi pengeluaran, upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi untuk tumbuh

lebih tinggi. Diperkirakan pada Tahun 2016 investasi akan terus tumbuh. Dorongan yang kuat terhadap investasi akan memberikan kontribusi pada sektor ekspor barang dan jasa serta sektor konsumsi. Dengan peningkatan sektor konsumsi masyarakat maupun pemerintah, hal ini akan menopang struktur perekonomian nasional. Dari sisi produksi, reformasi secara komprehensif di setiap bidang diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor industri, sehingga kontribusi sektor industri melalui Pendapatan Domestik Bruto (PDB) akan mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor primer, sekunder dan tersier seharusnya akan memberikan dampak pada pengurangan tingkat pengangguran sehingga tingkat kemiskinan akan turun secara bertahap. Dalam RKP Tahun 2016, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Nasional di topang oleh pertumbuhan ekspor Non Migas sebesar 9,9 persen dengan rasio ekspor terhadap PDB sebesar 2,8 persen serta target PMDN sebesar 35 persen dengan sebasaran pada 6 wilayah ekonomi.

Tabel 3.3 Gambaran Ekonomi Makro 2015-2019

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp) *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara **)						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

*) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

**) Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015, penerimaan pajak tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB

***)) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.

Sumber : Bappenas, 2015

3.1.2.2 Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Tantangan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Berdasarkan perkiraan LPE pada tingkat global dan nasional tersebut, Provinsi Jawa Barat diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan yang cukup mirip dengan pertumbuhan nasional mengingat data historis menunjukkan beberapa pergerakan yang sama. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% pada tahun terakhir merupakan sebuah signal bahwa upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki tantangan yang cukup berat. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan tuntutan dari masyarakat tentunya menuntut adanya suatu pembenahan terutama dalam pengembangan produksi sektoral dan perbaikan infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi dan skala produksi yang tentunya akan berdampak pada kondisi sosial daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional 5,2% di tahun 2015, Jawa Barat diperkirakan akan mencapai kondisi yang hampir sama dengan catatan adanya perbaikan dalam penyerapan investasi yang ada.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai ICOR 2014 sebesar 5.26 yang artinya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka diperlukan pertumbuhan nilai investasi sebesar 5.26% dari nilai PDRB di tahun 2014. Angka ICOR ini menunjukkan akan yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan terjadi inefisiensi dalam penggunaan modal. Dengan asumsi kondisi ini masih terjadi untuk tahun 2015 dan 2016 yakni ICOR sebesar 5,26, jika kemampuan investasi tahun 2015 dan 2016 sama dengan tahun 2014 sebesar 305 triliun (harga konstan tahun dasar 2010) maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 melambat menjadi 4,83% dan 4,61% tahun 2016. Tentunya kondisi demikian bukan yang diharapkan. Sebaliknya, realisasi investasi ditargetkan meningkat setiap tahunnya dan diharapkan terjadi efisiensi penggunaan modal yang tercermin dalam besaran ICOR yang lebih rendah. Dengan asumsi ICOR sebesar 5

untuk tahun 2015 dan 2016 dan realisasi investasi sebesar 306 – 358 trilyun rupiah

Tabel 3.4. Target Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Indikator	Proyeksi	
		2016	2017
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,3-6,9	6,3-6,9
2.	Inflasi (persen)	4,5-5,5	4,0-5,0
3.	Kemiskinan (persen)	5,9-5,00	5,00-4,10
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,50-7,00	7,00-6,50

Sumber : RPJMD Jawa Barat 2013-2018

Arah Kebijakan Perekonomian Jawa Barat

Tahun 2016 merupakan tahapan ke-3 pada rangkaian pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018, sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2014-2019. Ada beberapa rekomendasi implementasi RPJMN dalam konteks kepentingan pembangunan ekonomi regional Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Produk pangan harus jadi perhatian dan komitmen karena jumlah penduduk besar. Implikasinya, alokasikan anggaran yang memadai.
2. Berdasarkan hasil kajian Tabel Input Output Jabar, sektor pertanian memiliki nilai *backward linkage* yang besar namun relative kecil untuk angka *forward linkage*. Artinya potensi pertanian Jabar perlu didorong untuk industrialisasi (agroindustri).
3. Penekanan pembangunan sektor pertanian seyogianya tidak hanya di aspek produksi, namun juga sisi pasar. Harus dibangun institusi pasar sebagai option market yang akan meningkatkan

pendapatan petani dan menjamin redistribusi pendapatan antara pedagang dengan petani yang lebih adil.

4. Review Program yang ada di RPJMD saat ini agar lebih fokus untuk peningkatan produktivitas dan perwujudan option market output sektor pertanian Jabar.
5. Guna peningkatan daya saing industri Jabar, berikan insentif bagi industri yang menggunakan komponen lokal relative tinggi (diatas 60%).
6. Menjelang implementasi UU tentang Desa, siapkan kebijakan untuk mengembangkan instrumen mendorong pembangunan perdesaan. Diantaranya, dorong agar BUMDES dikelola secara professional, misalnya oleh sarjana desa dan para pendamping dari LSM.
7. Dana alokasi desa (sesuai janji gubernur) arahkan untuk mendukung program pembangunan lainnya dalam konteks misalnya peningkatan ketahanan pangan, atau yang lainnya sesuai prioritas utama target pembangunan desa yang bersangkutan.
8. Untuk implementatif sebuah kebijakan, harus fokus pada data mikro (lingkup data lebih detil).
9. Produktivitas perekonomian regional dibangun atas kekuatan kinerja ekonomi di level mikro, arahkan kegiatan untuk peningkatan produktivitas sub sektor yang lebih mikro.
10. Dalam membangun kedaulatan pangan, ciptakan instrumen pasar yang dapat memperbaiki harga jual komoditas yang dihasilkan petani. Pilihannya, Bulog harus bias beli komoditas tersebut atau melalui BUMD.
11. Dalam membangun kedaulatan energi, optimalkan eksploitasi panas bumi yang ada di wilayah Jawa Barat.
12. Dalam pengelolaan pembangunan, selain pengaturan pembagian peran, perlu dipertegas siapa yang bertanggungjawab dalam menentukan *action and cut*.

13. Dalam memanfaatkan meluasnya pasar MEA, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Bea Cukai, selain dilakukan promosi produk Jawa Barat secara gencar. Hal penting lain adalah menyebarluaskan informasi tentang fasilitas sesuai kesepakatan dagang yang dapat dinikmati oleh para eksportir.
14. Dalam rangka meningkatkan investasi, promosi peluang investasi harus terus ditingkatkan. Perkuat dengan kebijakan yang lebih pro bisnis.
15. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan membenahan karakter SDM nya untuk lebih produktif.

3.1.2.3 Ekonomi Kota Depok

Tantangan Kota Depok

Seperti halnya kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat, keadaan dan prospek ekonomi Kota Depok di Tahun 2016 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi regional, nasional dan Global pada periode sebelumnya, kesiapan SDM, infrastruktur, serta program kerja yang akan dilakukan.

Dalam perkembangannya Kota Depok masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai berikut :

- a. Perubahan struktural ekonomi dari kontribusi sektor primer yang semakin mengecil, dan meningkatnya peran sektor tersier dan sekunder, ditambah dengan belum diikuti penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut dalam jumlah yang optimal, serta semakin menipisnya ketersediaan lahan untuk kegiatan sektor primer terdesak oleh meningkatnya kebutuhan untuk hunian maupun industri dan pergudangan.

- b. Jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan perkembangan sektor industri belum optimal, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembina.
- c. Masih cukup tingginya angka pengangguran.
- d. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang lebih banyak disebabkan oleh faktor kelahiran.
- e. Ketimpangan pendapatan antar wilayah.
- f. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
- g. Pentingnya Iklim (daya tarik) investasi dan regulasi yang lebih mendukung perkembangan UMKM.
- h. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, antara lain jalan, pasar, hotel, dan lainnya.
- i. Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan daerah.
- j. Produktivitas UKM-K (usaha kecil menengah, koperasi) yang masih rendah, termasuk pertanian. Selain itu juga perlunya diversifikasi produk serta sarana pemasaran atau tempat usaha UMKM.
- k. Belum berkembangnya sektor pariwisata dan industri kreatif.

Ekonomi Makro Kota Depok

Terhadap fenomena perekonomian di tingkat regional Jawa Barat dan kondisi perekonomian sebagaimana dijelaskan di atas, Kota Depok perlu mencermati kemungkinan dampaknya terhadap kinerja perekonomian di tingkat kota diantaranya:

- a. Angka Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Depok dan perkembangan ekonomi regional yang menjadi persoalan tersendiri yang berpotensi meningkatnya biaya produksi yang memungkinkan terjadinya migrasi industri/perusahaan mencari daerah-daerah dengan UMK lebih rendah atau terjadinya pengurangan jumlah pekerja (PHK, daya beli menurun, jatuh miskin, ketimpangan meningkat, kesenjangan sosial dan rawan terjadi penyakit sosial/

- tindak kriminal) atau sebaliknya dimana tenaga kerja akan melakukan migrasi ke Kota Depok karena tingginya angka UMK.
- b. Tingginya daya serap tenaga kerja sektor sekunder dan tersier patut dipertimbangkan dalam upaya-upaya penataan ruang publik untuk menghindari hilangnya kesempatan berusaha terutama pada kelompok UMKM.
 - c. Tingginya LPE pada sub sektor bangunan sebaiknya diposisikan dalam pemahaman bahwa bangunan-bangunan yang dikembangkan secara horisontal cenderung mengkonsumsi lahan secara cepat dan masif berakibat dalam jangka panjang menuntut pelayanan infrastruktur perkotaan dalam jumlah besar dan biaya pemeliharaan yang akan terus meningkat. Bangunan vertikal cenderung berkembang pada kawasan-kawasan strategis namun memiliki keterbatasan daya dukung lahan berpotensi menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumber-sumberdaya yang bersifat *public goods*.
 - d. Menurunnya peran sektor primer (terutama pertanian), baik dari sisi produksi maupun kemampuannya menyerap tenaga kerja, perlu diantisipasi dengan upaya-upaya tahap transisi dari skill bertani berubah menjadi skill non bertani.
 - e. Langkah-langkah antisipatif terhadap dampak peningkatan inflasi tetap dilakukan dalam kerangka menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah penurunan daya beli masyarakat terutama yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.

LPE Kota Depok Tahun 2017 secara makro diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 6,62 %.

Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 yaitu : **“Memantapkan Pembangunan menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat ”**

Tema pembangunan tersebut sangat selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Depok, khususnya dengan Misi ke-2, yakni **“Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan Berbasis Industri Kreatif”**. Sesuai dengan dokumen Rancangan RPJMD Kota Depok 2016-2021, beberapa isu strategis pembangunan Kota Depok untuk Tahun 2017 menjadi tema RKPD Tahun 2017 adalah : **“Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Depok Unggul, Nyaman, dan Religius”**

Pengertian dari tema tersebut mengandung maksud :

Pembangunan Infrastruktur : *pembangunan infrastruktur yang menciptakan suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah yang merupakan satu kesatuan sehingga fokus pada lokus.*

Pengembangan Ekonomi Kreatif: *pengembangan ekonomi untuk mendorong peningkatan kontribusi ekonomi kreatif dalam PDRB dan Menciptakan Iklim bisnis yang positif, Membangun citra dan identitas kota, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif serta Memberikan dampak sosial yang positif dalam menghadapi MEA dan peningkatan pendapatan masyarakat.*

Peningkatan Pelayanan Publik : *peningkatan pelayanan dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan*

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif tanpa diskriminatif dan memiliki kepastian.

Tema pembangunan 2017 berupaya untuk tetap melanjutkan pembangunan Berkelanjutan yaitu Pembangunan yang telah dilaksanakan pada dua periode RPJMD perlu dijaga keberlanjutannya pada tahap selanjutnya (tahap ketiga) agar cita-cita menjadi Kota Niga dan Jasa dapat tercapai, dengan harapan Pembangunan yang dilaksanakan harus mengedepankan prinsip smart planning (specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/dapat dicapai, resources availability/ketersediaan sumberdaya, time/dibatasi waktu) agar sasaran pembangunan/ impact dapat dicapai serta dirasakan oleh masyarakat dengan memperhatikan Kearifan Lokal dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat.

Sesuai dengan kebijakan nasional dan isu strategis tersebut, serta dengan memperhatikan Misi RPJMD Kota Depok, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok adalah :

1. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta menjaga sektor ekonomi basis;
2. Menurunkan angka pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
3. Peningkatan dan pementapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
5. Mengembangkan potensi wisata dan wisata unggulan;

6. Peningkatan kualitas UMKM yang berdaya tawar tinggi, produktif dan efisien serta pembangunan sarana pemasaran atau tempat usaha bagi UMKM
7. Meningkatkan peran industri kreatif dalam pertumbuhan perkonomian kewilayahan melalui pembangunan sentra industri kreatif
8. Mengoptimalkan penerimaan PAD, dan sumber pendanaan lain;
9. Meningkatkan perolehan pendanaan dari APBN, APBD Jabar, BUMD dan pemanfaatan aset daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;

- b. Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2017 adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok selama 6 tahun (2011-2016) pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Depok Tahun 2006-2015

NO	Tahun	PAD	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi PAD (%)
			Rp	(%)		
1	2011	257.464.813.546,74	129.235.604.669,80	100,78	1.297.830.341.645,21	19,84
2	2012	387.942.005.405,00	130.477.191.858,26	50,68	1.551.899.020.090,97	25,00
3	2013	458.641.602.021,00	70.699.596.616,00	18,22	1.552.243.507.538,00	29,55
4	2014	588.606.351.921,00	129.964.749.900,00	28,34	2.229.209.498.346,61	26,40
5	2015	669.967.429.646,00	81.361.077.725,00	13,82	2.162.654.892.839,29	30,98
6	2016	795.350.560.845,00	125.383.131.199,00	18,17	2.263.644.040.977,52	35,14
Rata-rata per tahun			111.186.891.995	38,34	1.842.913.550.240	27,82

Berdasarkan data series kurun waktu 2011-2016, secara keseluruhan baik PAD dan total pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Dari tabel di atas terlihat bahwa

secara rata-rata PAD mengalami kenaikan sebesar 38,34% per tahun dengan rata-rata kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 27,82 % per tahun.

Apabila melihat Tabel 3.5 di atas, terjadi kenaikan atau pertumbuhan PAD yang berfluktuatif setiap tahunnya maka penentuan target PAD Tahun 2017 tidak dapat menggunakan rata-rata angka pertumbuhan mengingat selama kurun waktu 2011-2016 terjadi perubahan kebijakan dalam pengelolaan PAD, terutama terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya adalah pengalihan kewenangan pemungutan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah dan penetapan jenis-jenis retribusi daerah yang cenderung bersifat *closed list* sehingga ada beberapa jenis retribusi yang tetap diproses perijinannya namun tanpa ada pungutan retribusinya, seperti : Retribusi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Retribusi Ijin Penyelesaian Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dsb. termasuk pula penerimaan PAD dari pemakaian air bersih sejak berdirinya PDAM Tirta Asasta. Secara umum Penerimaan Asli Daerah (PAD) tumbuh diatas 10 pertahun, hal ini sesuai dengan target RPJPD Kota Depok 2006-2025.

Disisi lain, apabila melihat besaran kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Depok menunjukkan bahwa dengan beralihnya PBB (dimulai Tahun 2012) dan BPHTB (dimulai Tahun 2011) menjadi pajak daerah hal ini membuat kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Depok mulai menunjukkan adanya peningkatan dengan kontribusi diatas 30%.

3.2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan, didefinisikan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAU). Perkembangan Dana Perimbangan selama 6 tahun (2011-2016) pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Perkembangan Target dan Kontribusi Dana Perimbangan pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi DP (%)
			Rp	(%)		
1	2011	670.534.565.738,00	2.999.339.384,00	0,45	1.297.830.341.645,21	51,67
2	2012	804.427.210.250,00	133.892.644.512,00	19,97	1.551.899.020.090,97	51,84
3	2013	850.715.828.330,00	46.288.618.080,00	5,75	1.552.243.507.538,00	54,81
4	2014	968.617.194.665,00	117.901.366.335,00	13,86	2.229.209.498.346,61	43,45
5	2015	977.223.332.192,00	8.606.137.527,00	0,89	2.162.654.892.839,29	45,19
6	2016	951.143.625.000,00	-26.079.707.192,00	-2,67	2.263.644.040.977,52	42,02
		Rata-rata per tahun	47.268.066.441,00	6,38	1.842.913.550.239,60	48,16

Berdasarkan Tabel 3.6. tersebut, dapat dilihat target pertumbuhan rata-rata pertahun mengalami kenaikan sebesar 6,36% dan kontribusi rata-rata per tahun berkisar sebesar 48,16% (2011-2016).

Apabila memperhatikan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD Kota Depok (2011-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap Penerimaan Dana Perimbangan, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih cukup kuat namun dengan kecenderungan yang menurun, hal ini menunjukkan secara bertahap berkurangnya ketergantungan Kota Depok terhadap Dana Perimbangan sejalan dengan pengalihan pemungutan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah. Mengingat Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah maka kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Depok tetap mengharapkan adanya peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Depok dalam 6 tahun terakhir 2011-2016 (Tabel 3.7).

Tabel 3.7. Perkembangan Target dan Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2011-2016

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi Lain-lain PD (%)
			Rp	(%)		
1	2011	369.830.962.360,47	95.289.893.509,54	34,71	1.297.830.341.645,21	28,5
2	2012	359.529.804.435,97	-10.301.157.924,50	-2,79	1.551.899.020.090,97	23,17
3	2013	242.886.077.187,00	-116.643.727.248,97	-32,44	1.552.243.507.538,00	15,65
4	2014	300.125.237.001,16	57.239.159.814,16	23,57	2.229.209.498.346,61	13,46
5	2015	515.464.131.001,29	215.338.894.000,14	71,75	2.162.654.892.839,29	23,83
6	2016	517.149.855.132,52	1.685.724.131,23	0,327	2.263.644.040.977,52	22,85
Rata-rata per tahun			40.434.797.713,60	15,85	1.842.913.550.239,60	21,24

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dari Tahun 2011-2016 dan rata-rata pertumbuhannya per tahun cenderung meningkat sebesar 15,85 persen. Hal ini dikarenakan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Provinsi sehingga kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah Pusat dan Provinsi, antara lain kebijakan penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang dialihkan dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Belanja Transfer Daerah (masuk ke Kas Daerah) namun mulai Tahun 2016 sebagian dana akan dialihkan melalui APBD Provinsi mengikuti ketentuan pembagian urusan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan dana BOS yang bersumber dari APBN penyalurannya pada Tahun 2011 melalui APBD Kota Depok namun dialihkan kembali melalui APBD Provinsi Jawa Barat mulai Tahun 2012. Namun demikian, diharapkan adanya peningkatan dari sumber pendapatan ini, khususnya pada dana bagi hasil pajak dari provinsi serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2017 antara lain :

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi dari segi Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, OPD penghasil dan instansi vertikal lainnya;
- c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam rangka integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dengan sistem perijinan.

- f. Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan Standar Operasional dan Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Melakukan sosialisasi dan upaya pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. Memberikan kemudahan pembayaran kepada masyarakat dengan melakukan operasi pelayanan secara *off line* maupun memperluas jaringan sistem pembayaran melalui ATM/*Internet Banking*;
- i. Peningkatan etos kerja para pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Peningkatan pengelolaan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Belanja daerah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, dan dikelompokan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Penyediaan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan volume pekerjaan. Perkembangan belanja daerah Kota Depok selama kurun waktu 10 tahun (2011-2016) dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel. 3.8. Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2016

No	Tahun	Rencana Belanja	Pertumbuhan	
			Rp	%
1	2011	1.579.042.037.163,03	295.467.967.752,27	23,02
2	2012	1.854.609.216.016,55	275.567.178.853,52	17,45
3	2013	1.817.100.741.345,00	-37.508.474.671,55	-2,02
4	2014	2.097.914.920.123,16	280.814.178.778,16	15,45
5	2015	2.534.771.028.583,64	436.856.108.460,48	20,82
6	2016	2.820.344.040.977,52	285.573.012.393,88	11,27
Rata-rata per tahun			256.128.328.594,46	14,33

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa secara nominal besaran belanja daerah dari Tahun 2011-2016 cenderung meningkat (Belanja Daerah Tahun 2016 belum memperhitungkan alokasi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) tetapi apabila melihat angka pertumbuhan belanja daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, naik dan turun namun apabila dilihat dari rata-rata angka pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,33 %.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2017 diarahkan untuk :

- a. Pencapaian Prioritas Pembangunan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan (Urusan Wajib, urusan Pilihan dan fungsi penunjang) dengan fokus pada pembangunan prioritas daerah, serta dalam

rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 % (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan secara bertahap akan dipenuhi sebesar 10% (tidak termasuk gaji dan tunjangan).

- b. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
- c. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
- d. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta fungsi penunjang pemerintahan

atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Selain belanja langsung, belanja daerah juga dialokasikan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada OPD yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan besaran paling tinggi sebesar 5 persen yang diberikan berdasarkan target kinerja triwulanan;
- c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang/barang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan, memenuhi persyaratan penerima hibah dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan daerah;

- d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang memiliki resiko sosial dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, Pembiayaan Daerah ini terdiri atas *penerimaan pembiayaan* dan *pengeluaran pembiayaan*. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah. Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto yang harus

dapat menutup defisit anggaran. Perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel. 3.9. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2011-2016

NO	Tahun	PENERIMAAN			PENGELUARAN		
		JUMLAH	Pertumbuhan		JUMLAH	Pertumbuhan	
			Rp	%		Rp	%
1	2011	282.545.035.377,82	55.801.896.311,00	24,61	1.306.314.860,00	-3.755.325.702,00	-74,19
2	2012	311.245.973.725,58	28.700.938.347,76	10,16	8.535.777.800,00	7.229.462.940,00	553,42
3	2013	383.057.233.807,00	71.811.260.081,42	23,07	15.200.000.000,00	6.664.222.200,00	78,07
4	2014	262.916.136.536,00	-120.141.097.271,00	-31,36	22.350.000.000,00	7.150.000.000,00	47,04
5	2015	386.816.135.744,35	123.899.999.208,35	47,13	14.700.000.000,00	-7.650.000.000,00	-34,23
6	2016	570.400.000.000,00	183.583.864.255,65	47,4602	13.700.000.000,00	-1.000.000.000,00	-6,80
	Rata-rata /Tahun	366.163.419.198,46	57.276.143.488,86	20,18	12.632.015.443,33	1.439.726.573,00	93,88

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,18%. Di satu sisi peningkatan penerimaan pembiayaan ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun disisi lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Ditinjau lebih lanjut, sumber SiLPA ini dapat berasal dari *over* target pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran serta kegiatan lanjutan yang harus/perlu dianggarkan kembali sebagai akibat belum selesainya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu program/kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan sesuatu hal. Perlu menjadi perhatian khusus apabila SiLPA ini berasal dari program/kegiatan yang belum/tidak dapat dilaksanakan meskipun SiLPA yang berasal dari *over* target pendapatan dan dari penghematan anggaran juga perlu mendapatkan perhatian karena mengindikasikan penyusunan dan perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat dan akurat.

Kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 tetap akan diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah melalui Penerimaan Pembiayaan yang akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), sementara untuk pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk penyertaan modal air minum pada PDAM Kota Depok Tirta Asasta.

Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah :

- a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas *achievable* (dapat dicapai) dan *time bond* (terikat waktu).
- b. Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga berakibat kurang/lebih anggaran, gagal lelang karena harga terlalu rendah, dll.
- c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi *cut off*, dll;
- d. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
- e. Kendala dalam proses pelelangan karena perubahan aturan, seperti SBUJK yang diakui untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi menyebabkan tingginya gagal lelang.
- f. Regulasi pertanahan yang belum tuntas setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
- g. Permasalahan belum jelasnya status aset lahan seperti pada pengadaan lahan;
- h. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial, lahan, hukum, cuaca/iklim, dll);

- i. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Juknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);
- j. Keterbatasan jumlah SDM;
- k. Kendala pihak ketiga dalam realisasi kegiatan dan administrasi.

Permasalahan di atas secara umum juga terjadi pada beberapa daerah, sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Untuk itu mulai Tahun 2013, setiap daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja fisik dan keuangan melalui Provinsi Jawa Barat.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok diantaranya adalah :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja : 1) kajian kelayakan yang memadai sehingga layak dilaksanakan secara teknis, hukum, ekonomi, sosial, keuangan, 2) *smart planning*, dan 3) data dan informasi yang akurat;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pendekatan **3 E** (Ekonomis, Efisien, Efektif);
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;
- d. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (*e-controlling*);
- e. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan;
- g. Pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan;

- h. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta;
- i. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI mulai Tahun Anggaran 2015, maka Pemerintah Kota Depok perlu melaksanakan persiapan yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari perangkat teknologi informasi sebagai sarana pendukung.

Penjabaran skenario APBD dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017 dijelaskan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10. Skenario APBD dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017

No.	Uraian	Rencana Anggaran				Ket
		RKPD 2017	P-RKPD 2017	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6	4
1.	PENDAPATAN DAERAH	2,581,918,838,349.76	2,203,926,181,718.77	(377,992,656,630.99)	(14.64)	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	919,790,789,698.07	919,753,949,479.92	(36,840,218.15)	(0.00)	
1.1.1	Pajak Daerah	714,142,257,787.11	694,473,511,887.87	(19,668,745,899.24)	(2.75)	
1.1.2	Retribusi Daerah	42,388,312,462.60	49,318,514,572.00	6,930,202,109.40	16.35	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12,928,504,124.36	13,068,642,020.05	140,137,895.69	1.08	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150,331,715,323.99	162,893,281,000.00	12,561,565,676.01	8.36	
1.2	Dana Perimbangan	1,137,585,840,819.20	951,512,449,440.00	(186,073,391,379.20)	(16.36)	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,116,565,419.20	85,631,493,440.00	30,514,928,020.80	55.36	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,082,469,275,400.00	865,880,956,000.00	(216,588,319,400.00)	(20.01)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	524,542,207,832.49	332,659,782,798.86	(191,882,425,033.64)	(36.58)	
1.3.1	Hibah	-	-	-		
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	519,542,207,832.49	327,659,782,798.86	(191,882,425,033.64)	(36.93)	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-		
	Jumlah Pendapatan	2,581,918,838,349.76	2,203,926,181,718.77	(377,992,656,630.99)	(14.64)	
2.	BELANJA DAERAH	3,081,918,838,349.77	2,646,229,446,060.11	(435,689,392,289.66)	(14.14)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,179,446,177,043.77	1,012,074,133,969.22	(167,372,043,074.55)	(14.19)	
2.1.1	Belanja Pegawai	1,034,520,012,688.52	880,158,860,406.00	(154,361,152,282.52)	(14.92)	
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-		
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-		
2.1.4	Belanja Hibah	58,965,210,333.33	53,151,367,250.00	(5,813,843,083.33)	(9.86)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	49,784,480,097.20	27,884,893,200.00	(21,899,586,897.20)	(43.99)	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	870,816,804.00	870,816,804.00	-	-	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	35,305,657,120.71	50,008,196,309.22	14,702,539,188.51	41.64	
2.2	Belanja Langsung	1,902,472,661,306.00	1,634,155,312,090.89	(268,317,349,215.11)	(14.10)	
	Jumlah Belanja	3,081,918,838,349.77	2,646,229,446,060.11	(435,689,392,289.66)	(14.14)	
	Surplus/(Defisit)	(500,000,000,000.00)	(442,303,264,341.34)	57,696,735,658.67	(11.54)	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	600,000,000,000.00	563,003,264,341.34	(36,996,735,658.66)	(6.17)	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	600,000,000,000.00	563,003,264,341.34	(36,996,735,658.66)	(6.17)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-		
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	600,000,000,000.00	563,003,264,341.34	(36,996,735,658.66)	(6.17)	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000.00	120,700,000,000.00	20,700,000,000.00	20.70	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	-	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	20,700,000,000.00	20,700,000,000.00	100.00	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000.00	120,700,000,000.00	20,700,000,000.00	20.70	
	Pembiayaan neto	500,000,000,000.00	442,303,264,341.34	(57,696,735,658.66)	(11.54)	

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 selaras dengan arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006 – 2025 untuk pembangunan daerah tahap ketiga. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga (RPJMD III) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religiøs didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi satu : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi

aparatus yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi dua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi tiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misiempat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi lima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kota Depok 2016 – 2021.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Depok

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi I (Satu): Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.	1. Meningkatnya standar pelayanan publik.
	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan.	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel. 2. Terwujudnya proses pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi II (dua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan. 3. Terwujudnya kawasan pendidikan tinggi, pusat riset inovasi nasional, internasional dan sebagai pusat inkubator pemerintah daerah. 4. Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas. 5. Berkembangnya dan meningkatnya prestasi olahraga, seni budaya.
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju <i>smart healthy city</i> . 2. Meningkatnya jaminan kesehatan universal.
	3. Membangun ketahanan keluarga sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi III (tiga) :Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif.	1. Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 2. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota dan pengembangan klaster ekonomi kreatif .

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan usaha dan investasi melalui pelayanan yang cepat dan transparan.
	2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pada sektor jasa, niaga dan ekonomi kreatif. 2. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dan penyediaan fasilitasi permodalan kerja yang fleksibel dan terjangkau. 3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
	3. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.	1. Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal. 2. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah. 3. Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal.

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		4. Meningkatnya sinergi pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah.
Misi IV (empat): Memban- gun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	1. Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah;	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik jalan arteri maupun kolektor. 2. Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau.
	2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif.	1. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau; 2. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
	3. Menanggulangi banjir dan menjaga ketahanan air kota.	1. Meningkatnya pengendalian banjir. 2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
	4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman.	1. Tertatanya permukiman dan kawasan permukiman kumuh perkotaan. 2. Meningkatnya penyediaan perumahan vertikal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		sosial, ekonomi dan keberagamaan
	5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (<i>zero waste city</i>). 2. Terwujudnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan. 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Misi V (lima): Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	1. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kehidupan keberagamaan di rumah tangga, sekolah dan masyarakat ; 2. Meningkatnya keharmonisan dan kohesi sosial di masyarakat yang dicirikan dengan semangat gotong royong dan toleransi; 3. Meningkatnya pelayanan sosial keagamaan di masyarakat.
	2. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rasa kebanggaan akan Indonesia dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI; 2. Tumbuhnya kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan melibatkan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan;

4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1. Permasalahan dan Tantangan

Pada Tahun 2017, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari Tahun 2016 Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, dalam upaya mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 dapat tumbuh mencapai 7,1 persen. Dengan mempertimbangkan faktor pendorong pertumbuhan adalah pertumbuhan ekspor non migas sebesar 11,9 persen, rasio ekspor terhadap PDB sebesar 2,9 persen, target PMDN 36,3 % dari total investasi. Sementara pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2015, mencapai 5,04persen. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 sebesar 6,6 persen dan target pendapatan per kapita pada Tahun 2016 diharapkan mencapai Rp. 52.686 ribuserta pada Tahun 2017 ditargetkan akan naik lagi menjadi Rp.58.489 ribu.

Target peningkatan PDB ini diharapkan dapat tercapai dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0-5,3 persen dan tingkat kemiskinan menjadi minimal 8,5-9,5 persen pada Tahun 2017. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2015 mencapai 6,18persen dan tingkat kemiskinannya perSeptember 2015 mencapai 11,13 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, dan investasi serta ekspor barang dan jasa. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut akan terjadi apabila daya beli masyarakat meningkat, karenanya perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

Pertumbuhan ekonomi juga dipacu oleh pertumbuhan tingkat ekspor. Beberapa faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekspor tersebut, diantaranya, perlu adanya peningkatan akses pasar internasional terutama pasar nontradisional, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor, dan peningkatan fasilitas ekspor.

Dampak dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia pada Tahun 2017 akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Tahun 2014 yang berada pada kisaran 7,09 % (BPS, 2015), mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2013 sekitar 6,92 % (BPS, 2014).

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2017 dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data pada tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kecenderungan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data jumlah penganggur terbuka, angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	LPE (%)	6,58	7,15	6,92	7,09	
2	IPM (poin)	79,23	79,83	80,14	80,58	80,79
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4,31	4,32	3,34	3,64	3,57
4	Penganggur terbuka (%)	10,6	9,42	7,67	8,44	
5	Angka kematian bayi (‰)	3,21	2,82	2,34	1,57	
6	Angka kematian ibu (per seratus ribu persalinan)	59,32	54,48	39,84	34,84	
7	Prevalensi gizi buruk (%)	0,11	0,1	0,08	0,06	
8	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10,97	10,98	10,98	11,16	11,17
9	Daya beli (ribu rupiah)	651,46	654,95	658,25	661,30	661,35

Sumber : LKPJ 2011, 2012, 2013, dan 2014 Bappeda

Berdasarkan capaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun sebelumnya yang menunjukkan kecenderungan membaik, maka pada Tahun 2017 diperkirakan aspek kesejahteraan masyarakat akan menunjukkan *trend* yang sama. Dengan demikian maka capaian kinerja RPJMD Kota Depok 2011-2016 pada Tahun 2016 akan terselesaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 sebesar 7,09% (Publikasi BPS Tahun 2015) diperkirakan akan meningkat lagi pada Tahun 2017; jumlah pengangguran terbuka sebesar 8,44% (publikasi tahun 2015) akan menurun menjadi 6,56-7,63% pada Tahun 2017; IPM diperkirakan akan mencapai sekurang-kurangnya 80,11 (2017) meningkat dari 79,11 (2015); angka kematian bayi pada Tahun 2017 diperkirakan akan turun dibawah target 2016 yaitu kurang dari 60 kasus, angka kematian ibu diperkirakan akan turun menjadi 14 kasus (2017) dari Tahun 2014 sebesar 17 ibu meninggal dari 46.679 persalinan; prevalensi gizi buruk pada Tahun 2017 diharapkan akan turun dibawah target menjadi kurang dari 0,06%; dan daya beli akan meningkat sekurang-kurangnya menjadi 661,40 ribu rupiah. Selengkapanya target kinerja aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. Target Indikator Kinerja Daerah tahun 2017 terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok

No.	Indikator Kinerja	Target 2017
1	LPE (%)	7,56
2	IPM	80,11
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3,43
4	Penganggur terbuka (%)	6,56-7,63%
5	Angka kematian bayi (‰)	60 kasus
6	Angka kematian ibu (per seratus ribu persalinan)	14 kasus
7	Prevalensi gizi buruk (%)	0,06%
8	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10,96
9	Gini Rasio	0,366
10	Daya beli (pengeluaran perkapita disesuaikan) (ribu rupiah)	661,40

4.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil penjarangan isu strategis melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tahun 2016, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017 adalah:

A. Bidang Ekonomi

1. Integrasi sistem transportasi di kota Depok dan Jabodetabek.
2. Perkembangan sektor ekonomi yang mengarah pada sektor tersier belum didukung oleh ketersediaan kualitas infrastruktur penunjang sektor tersebut.
3. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditandai dengan gap IPM antar kecamatan.
4. Pengangguran masih tinggi.
5. Pelayanan publik berbasis profesional aparatur.
6. Pelayanan perijinan usaha yang lebih sederhana.
7. Penegakan regulasi/Perda yang mendukung perkembangan UMKM.
8. Masalah alih fungsi lahan pertanian
9. Kualitas SDM terkait law enforcement

10. Sarana pemasaran/tempat usaha UMKM yang masih kurang.
11. Fenomena rentenir yang merajalela.
12. Pengembangan obyek pariwisata

B. Bidang Infrastruktur

1. Pencegahan pencemaran dan konservasi air yang belum memadai yang disebabkan masih kurangnya peran serta masyarakat dapat mengancam ketahanan air kota
2. Pertumbuhan panjang jalan yang rendah,
3. Pengembangan dan integrasi sistem angkutan masal yang masih terbatas
4. Ketersediaan lahan untuk mewujudkan pelayanan dasar dan ruang terbuka publik

C. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

1. Usia harapan hidup yang tinggi serta penyiapan optimalisasi bonus demografi serta upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
2. Penurunan jumlah kematian ibu dan bayi
3. Double burden penanggulangan penyakit (penyakit menular dan tidak menular).
4. Peningkatan akses layanan kesehatan rujukan
5. Peningkatan kelas RSUD
6. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Kota Depok diantisipasi dengan didukung melalui peningkatan program Keluarga Berencana
7. Peningkatan daya tampung sekolah baik SD, SMP dan SMA
8. peningkatan bantuan siswa miskin di sekolah swasta.
9. Penambahan jumlah tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas dan kompetensi guru
10. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan dan kewirausahaan siswa.

11. Penurunan jumlah kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
12. Pengembangan kelurahan layak anak dan ramah lansia.
13. Pengarusutamaan gender menjadi prioritas di setiap sektor pembangunan.
14. Pemenuhan penyediaan sarpras posyandu (gedung dan sarana penunjang).
15. Peningkatan kualitas pelayanan yang professional di bidang kepastakaan dan serta peningkatan minat baca masyarakat.
16. Peningkatan dan Pengembangan seni budaya lokal.

Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2017, yang meliputi:

- 1) penanganan masalah infrastruktur kota fokus pada kemacetan dan banjir
- 2) kota layak anak dan ramah lansia melalui peningkatan infrastruktur yang mengakomodasi lansia dan penyediaan taman yang terintegrasi antara lansia dan anak
- 3) pengembangan ekonomi kreatif
- 4) peningkatan peran keluarga
- 5) pengembangan wisata berbasis potensi lokal
- 6) ketertiban dan kerawanan sosial

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2017

Berdasarkan capaian-capaian pada tahun sebelumnya, isu strategis yang berkembang (isu tahunan), serta dengan berpedoman pada isu strategis RPJMD Kota Depok (isu lima tahunan), arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, maka fokus pembangunan Kota Depok Tahun 2017 dikelompokkan menjadi **prioritas pembangunan** sebagai berikut ini:

- 1. Prioritas 1** : penanganan masalah infrastruktur kota fokus pada kemacetan dan banjir
- 2. Prioritas 2** : kota layak anak dan ramah lansia melalui peningkatan infrastruktur yang mengakomodasi lansia dan penyediaan taman yang terintegrasi antara lansia dan anak
- 3. Prioritas 3** : pengembangan ekonomi kreatif
- 4. Prioritas 4** : peningkatan peran keluarga
- 5. Prioritas 5** : pengembangan wisata berbasis potensi local
- 6. Prioritas 6** : ketertiban dan kerawanan sosial

Selain prioritas tahunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2017, ditetapkan pula program janji walikota dan program unggulan walikota/wakil walikota terpilih (program lima tahunan) sebagai berikut :

Program Unggulan Kota Depok

Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City

Pemerintah Indonesia telah menargetkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 (Gambar 5.1). Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Depok mempunyai peranan penting untuk memastikan cakupan kepesertaan yang menyeluruh serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai untuk seluruh warga Kota Depok. Sistem Kesehatan Daerah perlu mengacu pada SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah

dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam subsistem:

1. Upaya kesehatan.
2. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
3. Pembiayaan kesehatan.
4. Sumber daya manusia kesehatan.
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan
7. Pemberdayaan masyarakat.

Saat ini Kota Depok masih mempunyai permasalahanyaitu masih rendahnya cakupan warga yang terlindungi asuransi kesehatan. Saat ini diperkirakan hanya setengah warga Kota Depok yang tergabung dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN). Cakupan ini perlu diperluas untuk memastikan seluruh warga Kota Depok memiliki akses mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan andal.

Pelaksanaan SJKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk itulah Kota Depok membuat program terkait kesehatan menjadi program strategis. Program ini diberi nama Depok Kota Sehat atau *Smart Healthy City*. Program ini mempunyai rincian sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan
2. Cakupan Jaminan Kesehatan
3. Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan 24 Jam
4. Program Kota Sehat
5. Pengembangan Sistem Manajemen Kesehatan Daerah Berbasis TI

Depok Kota Bersih atau Zero Waste City

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah *overload*. Pada awal pendiriannya tahun 1987, kapasitas TPA ini direncanakan untuk usia pakai 5 tahun saja, namun saat ini masih digunakan. Usia pakai yang lebih dari 18 tahun membuat TPA Cipayung tidak dapat menampung sampah yang semakin lama semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kota Depok ini, sekitar 4% per tahun. Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 kg per orang per hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 1.321 ton per hari. Namun hanya sekitar 600 ton yang dapat diangkut atau terlayani oleh pemerintah Kota Depok dan sampah yang terangkut ke TPA hanya 550 ton perhari. Sementara itu, biaya pengelolaan sampah cukup besar yaitu sekitar 64 persen dari anggaran biaya langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, meskipun kondisi jumlah sampah terus meningkat. Program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah sampah.

Di tingkat nasional pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Di Kota Depok Pengelolaan sampah melalui *3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)* diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015. Perda tersebut memberikan insentif berupa pembebasan retribusi sampah rumah tangga. Konsep pemilahan sampah di sumbernya adalah sampah dipilah menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik dan sampah residu. Sampah organik dibawa ke Unit Pengolahan Sampah (UPS) untuk dibuat kompos, sedangkan sampah anorganik disetorkan oleh masing-masing warga ke bank sampah unit. Bank sampah induk mengambil sampah anorganik dari masing-masing

bank sampah unit sesuai jadwal kesepakatan. Sementara itu, sampah residu dibuang ke TPA Cipayung.

Kebijakan pengelolaan sampah 3R disesuaikan dengan komposisi dan sumber sampah. Komposisi sampah di Kota Depok sebagian besar berupa sisa makanan (40 persen), kayu, ranting dan daun (15 persen) serta sisanya berupa kertas, plastik, logam, kain dan tekstil, karet dan kulit, kaca dan lainnya. Sejak tahun 2006, Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa program seperti sosialisasi komposting rumah tangga dengan Takakura system dan pendirian UPS (unit pengolahan sampah). UPS pada awal pendiriannya ditujukan untuk menampung sampah untuk kemudian dipilah di UPS. Ada lebih dari 40 lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi UPS. Dalam perkembangannya, UPS ditujukan khusus menjadi tempat mengolah sampah organik. Saat ini, ada 32 UPS yang sudah berjalan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.

Pada tahun 2009, berdiri Bank Sampah di beberapa lokasi. Mulai akhir tahun 2012, perkembangan Bank Sampah sangat pesat, hingga saat ini mencapai lebih dari 500 unit yang sudah berdiri, dengan 2500 ibu rumah tangga yang terlibat aktif.

Kota Depok saat ini menjadi referensi bagi beberapa daerah di Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan sampah organik dan pengembangan bank sampah.

Berdasarkan perkembangan pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kota Depok menetapkan program Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City* menjadi salah satu program unggulan Kota Depok.

Prinsip pengelolaan sampah Kota Depok didasarkan pada empat hal, yaitu:

1. Perencanaan. Kota Depok merupakan kota yang berkembang sangat pesat. Karena itu perlu diperhatikan apa yang akan terjadi di masa mendatang terutama dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat

dan jumlah timbunan sampah serta komposisinya. Karena itu dalam perencanaan perlu digunakan perspektif jangka panjang. Selain itu Kota Depok perlu mandiri dalam mengelola sektor persampahan dan memperhatikan kepentingan para pihak dalam membuat perencanaan sektor persampahan.

2. Efisiensi. Kota Depok merupakan kota yang padat dengan migrasi masuk yang tinggi, ketersediaan lahan menjadi semakin terbatas. Karena itu pengelolaan sampah kota juga perlu memikirkan keterbatasan lahan ini. Selain itu, pilihan teknologi dan manajemen pengelolaan yang dibangun perlu dicari model yang menghasilkan biaya yang minimum, mengingat APBD Kota Depok yang terbatas.
3. Perubahan budaya dengan edukasi. Dalam pengelolaan sampah 3R, budaya yang harus diubah adalah bagaimana masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Perubahan budaya ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Untuk itu, selain usaha edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, perlu juga digerakkan gerakan mengurangi dan memilah sampah oleh masyarakat dan sektor bisnis. Sektor bisnis juga dapat membantu program ini melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.
4. Industrialisasi. Pengelolaan sampah kota melalui mekanisme 3R yang efektif perlu didukung oleh industri terkait untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sampah. Untuk itu diperlukan riset yang mendalam untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok dengan karakteristik sampah Kota Depok. Selain itu, pusat training juga perlu didirikan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R baik ke masyarakat Depok maupun kota-kota lain di Indonesia.

Pengelolaan sampah di Kota Depok dari sumbernya, sampah dipilah menjadi 3, yaitu organik, anorganik dan residu. Sampah organik disalurkan ke UPS untuk kemudian diproses menjadi kompos berkualitas tinggi. Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur yaitu : Bank Sampah, *Drop off system* dan pemulung. Pada wilayah yang

memiliki bank sampah, masyarakat menyalurkan sampah melalui bank sampah. Di wilayah yang belum memiliki bank sampah, perlu dibuat *drop off point* sebagai tempat masyarakat menyalurkan sampah organiknya. Sampah anorganik yang disalurkan melalui bank sampah dan titik *drop off* kemudian disalurkan ke bank sampah induk untuk kemudian disalurkan ke *recycle center*. Beberapa jenis sampah juga bisa disalurkan melalui pemulung, untuk kemudian dijual ke pengepul. Seluruh sampah anorganik yang dikumpulkan ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh industri *recycle*. Sampah *non-recyclable* atau sampah residu terdiri atas beberapa jenis. Limbah minyak goreng, sampah B3 dan sampah elektronik (*e-waste*) akan disalurkan ke bank sampah atau *drop off point* untuk disalurkan ke tempat pengolahan khusus. Untuk residu lainnya disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah menjadi energi (*waste to energy*) dan/atau produk lainnya. Pada tahun 2021, ditargetkan Kota Depok dapat mengelola sampah terpilah dengan cakupan layanan 50% dari total area Kota Depok. Untuk mencapai target tersebut, disusunlah program Depok Kota Bersih sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota,
2. Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis,
3. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern,
4. Pusat Riset dan Training

Depok Kota Ramah Keluarga atau *Family Friendly City*

Masuknya isu kota ramah keluarga atau ketahanan keluarga menjadi regulasi bukan tanpa alasan, pada saat ini Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga telah disahkan sebagai Rancangan Undang-undang dalam Prolegnas periode 2015-2019. Selain itu isu ketahanan keluarga juga telah dituangkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kota Depok telah menyinggung beberapa sisi terkait ketahanan keluarga dalam Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kota Layak Anak. Pada tahun 2015, Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya.

Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi bonus demografi. Bonus tersebut tidak akan memberikan manfaat jika penduduk usia produktif yang akan mencapai angka maksimum tidak dapat memberikan kontribusi yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kenegaraan. Dalam hal ini, keluarga memberikan peran yang sangat besar dalam pembentukan SDM yang berkualitas. Negara dapat melihat peran keluarga dapat dilihat dari aspek sosiologis maupun dari aspek psikologis. Dari aspek sosiologis, keluarga merupakan suatu pranata sosial yang memiliki peran yang penting dalam perkembangan suatu negara. Sedangkan dari aspek psikologis, keluarga mempunyai peran dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari seorang individu, mulai dari kemampuan berinteraksi, kematangan emosi, sampai dengan kinerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga ini juga menyampaikan pesan bahwa permasalahan keluarga bukanlah masalah privat tetapi juga masalah publik karena ketahanan keluarga akan mempengaruhi ketahanan suatu negara.

Dalam perjalanannya menjadi kota urban, Depok mengalami transisi yang cukup besar selama tiga dekade terakhir. Transisi ini berdampak pada perubahan cara hidup dan cara berinteraksi masyarakatnya. Sampai saat ini Depok masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hidup dan kehidupan yang layak dan nyaman. Secara khusus, Depok juga mempunyai permasalahan dengan tingkat perceraian yang semakin tinggi, penyakit mental, paparan pornografi, penyimpangan seksual, kecanduan *game* terutama kepada anak-anak, dan narkoba. Semua masalah tersebut bermuara pada pentingnya meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat

menghasilkan SDM dalam keluarga yang berdaya guna dan berkualitas. Ketahanan keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir sumber daya manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok. Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan interaksi sosial.

Berbagai permasalahan di atas melatar belakangi diangkatnya Program Ketahanan Keluarga menjadi program strategis pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Pemerintah Kota Depok, program ini perlu menjadi ruh bagi semua OPD dalam membuat program dan menjalankan kegiatan rutinnnya.

Ketahanan Keluarga dapat didefinsikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam kemampuannya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkualitas dan berdaya. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan batin. Berkualitas yaitu anggota keluarga memiliki kompetensi keimanan, moralitas dan intelektualitas. Berdaya yaitu anggota keluarga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memiliki daya tahan terhadap tantangan.

Untuk membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan suatu sistem sosial yang mendukung, mulai dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas seperti yang digambarkan melalui bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula unsur yang sepatutnya dibangun agar terbentuk ketahanan keluarga di Kota Depok.

Untuk membangun kompetensi tersebut, Program Strategis Depok Kota Ramah Keluarga menyusun beberapa program sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kelembagaan Ketahanan Keluarga
2. Pembinaan Keluarga Harmonis,
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga,

4. Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan,
5. Pembangunan Infrastruktur Ramah Anak, Lansia dan Disabilitas
6. Peningkatan Pembangunan Kota Layak Anak

Janji Walikota dan Wakil Walikota

Di samping penjelasan visi dan misi, serta program unggulan, yang nantinya akan dijabarkan hingga program dan indikasi kegiatan, dokumen RPJMD Kota Depok 2016 – 2021 merupakan dokumen strategis yang tepat dalam mengawal janji-janji kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Terdapat 10 (sepuluh) janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.4** sebagai berikut:

Tabel 4.4. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No	Program Janji Walikota	Indikator	2017
1	Program Depok Peduli Pendidikan		
	Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honorer		
a.	Bantuan Siswa Miskin		
	Bantuan Sosial Siswa Rawan DO		
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan	4713
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan	5298
	- SMA/SMK/MA	siswa miskin yang mendapat bantuan	2527.8
b.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer		
	- SDN	Jumlah guru honorer SDN	1322
	- SMPN	Jumlah guru honorer SMPN	216
	- SMAN/SMKN	Jumlah guru honorer SMA/KN	232
c.	Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta		
	- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8105
	- PKBM	Jumlah guru swasta	224
	- SLB	Jumlah guru swasta	96
	- SD/MI	Jumlah guru swasta	4693

No	Program Janji Walikota	Indikator	2017
	- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3979
	- SMA/SMK/MA	Jumlah guru swasta	3078
2	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.		
a.	Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	RSUD di wilayah Timur yang terbangun	Perencanaan
b.	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan		
	-PONED	Unit Puskesmas	1 unit (Cinere)
	-24 Jam	Unit Puskesmas	11 Kecamatan
	-Perwatan	Unit Puskesmas	2 unit (Bojongsari dan Sukmajaya)
3	Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan	Jumlah Taman yang terbangun	5 lokasi
4	Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Pangung Budaya & Kreatif.	Unit Terbangun	perencanaan
5	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.		
a	Pembangunan Pasar Rakyat		perencanaan
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	3 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los	200 buah
6	Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).		
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun	perencanaan
b	Rumah Kemasan	Unit Terbangun	perencanaan
7	Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.		
	RT	Jumlah RT	5235
	RW	Jumlah RW	935
	LPM	Jumlah LPM	63
8	Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.		
	Posyandu	Jumlah Kader	10150
	Posbindu	Jumlah Kader	3525
9	Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.	Orang	154
10	Pembangunan Alun-alun Kota Depok.	Unit Terbangun	perencanaan

4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2017

Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 103 ayat (2) yang mengamanatkan pentingnya keselarasan dengan RPJMD Kota Depok, prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, dan Prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat. Maka Prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2017 telah sesuai dengan amanat Prioritas Nasional dan Jawa barat sesuai pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.5. Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kota Depok
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara	CG.1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;	1. penanganan masalah infrastruktur kota fokus pada kemacetan dan banjir
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	CG.2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;	2. kota layak anak dan ramah lansia melalui peningkatan infrastruktur yang mengakomodasi lansia dan penyediaan taman yang terintegrasi antara lansia dan anak
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	CG.3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;	3. pengembangan ekonomi kreatif
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan	CG.4. Meningkatkan ekonomi non pertanian;	4. peningkatan peran keluarga
	CG.5. Meningkatkan ekonomi pertanian;	5. pengembangan wisata berbasis potensi lokal
	CG.6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;	
	CG.7. Meningkatkan pengelolaan seni,	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kota Depok
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia	budaya dan wisata serta kepemudaan; CG.8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan; CG.9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan; CG.10. Modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan	6. ketertiban dan kerawanan sosial

Sesuai Arahana Tata Ruang (RTRW 2012-2032), Kota Depok telah menentukan Pusat pelayanan Kota yang terbagi menjadi Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) dengan arahan sesuai pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Depok

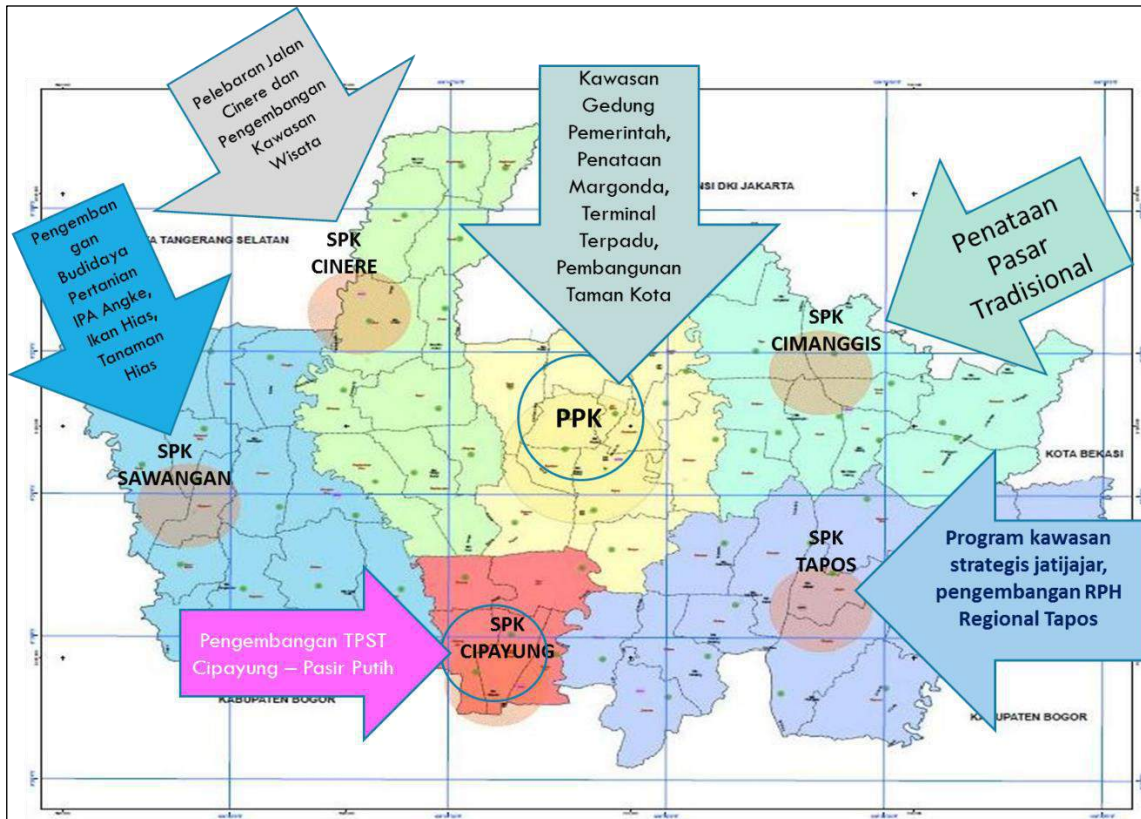


Gambar 4.2. Rencana Pusat Pelayanan di Kota Depok



Sesuai arahan RPJMD 2016-2021, terdapat beberapa fokus capaian program dan kegiatan pada sub pusat pelayanan kota tersebut dalam rangka mendorong pusat pertumbuhan baru dan menggerakkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3. Tematik Kewilayahan RTRW



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021. Rencana Kerja tersebut disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja RPJMD pada Tahun 2017 dan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Depok yang tertuang dalam visi dan misi, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini termuat program dan kegiatan prioritas disertai pagu indikatif pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2017.

Sumber pendanaan program/kegiatan prioritas dalam P-RKPD Kota Depok Tahun 2017 ini berasal dari APBD Kota Depok yang digunakan untuk belanja prioritas pembangunan Kota Depok sebagaimana sudah diuraikan pada Bab IV.

BAB VI

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyusun rancangan APBD. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka Perubahan RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Walikota.
3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota melalui Bappeda.

5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada Perubahan RKPD ini.
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2017, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS